



UNIVERSITAS INDONESIA

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DENGAN PENGGUNAAN
MODEL CLEAR DI KELURAHAN KALIABANG TENGAH,
KECAMATAN BEKASI UTARA, KOTA BEKASI**

SKRIPSI

**IRMA SEPTIANY
1006816855**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**DEPOK
2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DENGAN PENGGUNAAN
MODEL CLEAR DI KELURAHAN KALIABANG TENGAH,
KECAMATAN BEKASI UTARA, KOTA BEKASI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi

IRMA SEPTIANY

1006816855

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

DEPOK

2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Irma Septiany

NPM : 1006816855

Tanda Tangan :



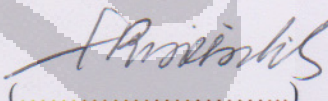
Tanggal : 30 Juni 2012

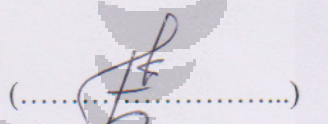
HALAMAN PENGESAHAN

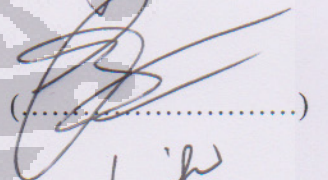
Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Irma Septiany
NPM : 1006816855
Program Studi : Administrasi Negara
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Nasional (PNPM) Mandiri Perkotaan Dengan Penggunaan Model CLEAR Di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi)

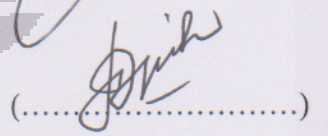
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Sri Susilih, M.Si (.....) 

Penguji : Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si (.....) 

Ketua Sidang : Drs. Kusnar Budi, M.Bus (.....) 

Sekretaris Sidang : Dra. Siti Djuhro, M.Si (.....) 

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dengan Penggunaan Model CLEAR Di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Sarjana Ekstensi Administrasi Negara Universitas Indonesia.

Dalam penulisan tugas akhir skripsi ini, penulis mendapatkan berbagai dukungan semangat, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc selaku Dekan FISIP Universitas Indonesia.
2. Drs. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi.
3. Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Indonesia dan selaku Penguji Ahli sidang skripsi.
4. Dra. Sri Susilih, M.Si selaku Pembimbing skripsi yang dengan sabar dan selalu menyediakan waktu untuk mengarahkan dan mengevaluasi setiap penulisan tugas akhir hingga tugas akhir ini terselesaikan.
5. Drs. Kusnar Budi, M.Bus selaku Ketua Sidang skripsi yang telah memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Dra. Siti Djuhro, M.Si selaku Sekretaris Sidang skripsi yang telah memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis.

7. Desy Hariyanti, S.Sos. yang telah memberikan masukan yang bermanfaat.
8. Kedua Orang tua dan keluarga yang tiada henti mendukung, mendoakan dan membiayai sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
9. Dosen-dosen pengajar Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat terbaik, Fajryatul, Ludia, Amanda, Tanti yang selalu menyemangati dan memberikan keceriaan di sela-sela waktu penyusunan penulisan.
11. Teman-teman Administrasi Negara angkatan 2010 yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kebersamaan selama perkuliahan khususnya Padma, Raisa, Lidya, Viska, Cika, Panduwinata, Tira Destira, Dinda, Utrika, Mbak Ndaru, Amanda, Erliana, Stephanie, Wythesa, Adi Purnomo dan Marcelina.
12. Drs. Andi M. Syafrudin (Alm.) dan Ahmad Hidri yang telah banyak membantu selama pengerjaan skripsi ini.
13. Petugas dari Korkot, Faskel PNPM Mandiri Perkotaan Kota Bekasi dan BKM Kelurahan Kaliabang Tengah yang telah membantu dalam kelengkapan data penulisan.
14. Semua informan yang bersedia menyediakan waktu untuk diwawancara.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juni 2012

Irma Septiany

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Septiany
NPM : 1006816855
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

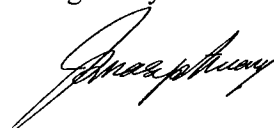
demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dengan Penggunaan Model CLEAR Di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Juni 2012
Yang Menyatakan



(Irma Septiany)

ABSTRAK

Nama : Irma Septiany
Program Studi : Sarjana Administrasi Negara Universitas Indonesia
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dengan Penggunaan Model CLEAR Di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Kelurahan Kaliabang Tengah memiliki pencapaian partisipasi yang paling rendah dibandingkan dengan Kelurahan lainnya. Partisipasi dewasa yang terserap hanya 1.5% dari jumlah penduduk dewasa. Pencapaian partisipasi dewasa yang rendah di Kelurahan Kaliabang Tengah diikuti juga dengan rendahnya partisipasi penduduk miskin dan partisipasi perempuan. Penyebab rendahnya partisipasi di Kelurahan Kaliabang Tengah dengan menggunakan Model CLEAR antara lain: sosialisasi yang belum dilakukan secara luas, sehingga banyak masyarakat yang belum paham apa maksud dan tujuan dari PNPM Mandiri Perkotaan. Kemampuan menyediakan waktu untuk terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kaliabang Tengah masih kurang. Partisipasi miskin juga rendah karena ketidakmampuan warga miskin untuk berswadaya sebesar 30% dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Sementara itu, partisipasi perempuan rendah karena program yang dikhususkan untuk perempuan masih kurang.

Kata Kunci:
Partisipasi, kemiskinan, perempuan, pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

Name : Irma Septiany
Study Program : Bachelor of Public Administration University of Indonesia
Title : Civil Participation in the Implementation of PNPM Mandiri Program with CLEAR Model at Kaliabang Tengah Village, North Bekasi Sub-district, Bekasi City.

Compare to other villages, Kaliabang Tengah Village has the lowest participation achievement. Adult participants are only 1.5% of the adult population. The low adults participation the Kaliabang Tengah Village followed by low participation of poor and women participants belonging to the adult participants. The result of this study with Model CLEAR participation is the socialization which has not been implemented extensively. There's so many people who do not understand what purpose of PNPM. As formal workers, the ability to provide their own time-being the low participation factor in Kaliabang Tengah Village. 30% of the low poor participation is because of the poor inability to do the self-help in PNPM. Meanwhile, the low female participation is because there are not many programs for women in the Kaliabang Tengah Village. The program mostly preferred in environment activities. So that woman are less facilitated in PNPM of Kaliabang Tengah Village.

Key Words:
Participation, Poverty, Women, Community Empowerment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Signifikasi Penelitian	12
1.5 Pembatasan Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Pustaka	15
2.2 Kerangka Teori	23
2.2.1 Kemiskinan	23
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik dan Partisipasi Publik	25
2.2.3 Partisipasi	28
2.2.3.1 Tingkat Partisipasi.....	31
2.2.3.2 Model Partisipasi	35
2.3 Operasionalisasi Konsep	38
BAB 3 METODE PENELITIAN	40
3.1 Pendekatan Penelitian	40
3.2 Jenis Penelitian	41
3.3 Metode Dan Teknik Pengumpulan Data	42
3.4 Proses Penelitian	43
3.5 Lokasi Penelitian.....	43
3.6 Hipotesis Kerja	43
3.7 Keterbatasan Penelitian	44
BAB 4 GAMBARAN UMUM.....	45
4.1 PNPM Mandiri Perkotaan	45

4.1.1	Tujuan dan Sasaran	45
4.1.2	Prinsip PNPM Mandiri Perkotaan	46
4.1.3	Pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan	47
4.1.4	Dasar Hukum	48
4.1.5	Kelompok Sasaran.....	48
4.1.6	Penerima Manfaat Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan	49
4.1.7	Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan.....	49
4.2	PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kaliabang Tengah	52
4.2.1	Kondisi Umum Kaliabang Tengah	52
4.2.2	Keadaan Geografis	53
4.2.2.1	Penduduk	53
4.2.2.2	Kesehatan	55
4.2.2.3	Pendidikan	56
4.2.3	Kondisi Kemiskinan Menurut Sumber Daya.....	56
4.2.3.1	Penyebab Kemiskinan	56
4.2.3.2	Kriteria Kemiskinan	57
4.2.4	Permasalahan	58
4.2.4.1	Permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana	58
4.2.4.2	Permasalahan Bidang Pendidikan	59
4.2.4.3	Permasalahan Bidang Ekonomi	59
4.2.4.4	Permasalahan Bidang Kesehatan	59
4.2.5	Organisasi, Visi, Misi dan Tujuan PNPM-MP Kaliabang Tengah	60
4.2.5.1	Organisasi	60
4.2.5.2	Visi	60
4.2.5.3	Misi	60
4.2.5.4	Pemberdayaan.....	60
4.2.5.5	Kegiatan Pokok	62
4.2.5.6	Target Yang Akan Dicapai.....	63
BAB 5 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DENGAN PENGGUNAAN MODEL CLEAR DI KELURAHAN KALIABANG TENGAH, KECAMATAN BEKASI UTARA, KOTA BEKASI.....		64
BAB 6 PENUTUP		108
6.1	Simpulan	108
6.2	Saran	109
DAFTAR PUSTAKA		xvi
LAMPIRAN		xx
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		xxi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 2010	6
Tabel 1.1 Capaian Partisipatif Kecamatan Bekasi Utara 2011	9
Tabel 2.1 Matrikulasi Penelitian Sebelum dan Penelitian Sekarang	21
Tabel 2.3 Operasionalisasi Konsep	38
Tabel 4.1 Kelompok Sasaran	48
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Kaliabang Tengah	53
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kaliabang Tengah Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	54
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kaliabang Tengah Menurut Pada Pekerjaan	54
Tabel 4.5 Jumlah Sarana Kesehatan Kelurahan Kaliabang Tengah	55
Tabel 4.6 Jumlah Sarana Pendidikan Kelurahan Kaliabang Tengah	55
Tabel 4.7 Nama-nama Anggota BKM Terpilih Masa Bakti 2010-2013	60
Tabel 4.8 Kegiatan Infrastruktur di Kelurahan Kaliabang Tengah.....	60
Tabel 4.9 Kegiatan Ekonomi di Kelurahan Kaliabang Tengah	61
Tabel 4.10 Kegiatan Sosial di Kelurahan Kaliabang Tengah	61
Tabel 4.11 Kegiatan Kemitraan BKM dengan Pihak Lain	61
Tabel 5.1 Capaian Partisipatif Kecamatan Bekasi Utara 2011	65
Tabel 5.2. Nama-nama Pimpinan Kolektif BKM Kaliabang Tengah	69
Tabel 5.3. Jumlah Penduduk Kelurahan Kaliabang Tengah menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan	70
Tabel 5.4 Kegiatan Infrastruktur di Kelurahan Kaliabang Tengah	76
Tabel 5.5 Kegiatan Ekonomi di Kelurahan Kaliabang Tengah	76
Tabel 5.6 Kegiatan Sosial di Kelurahan Kaliabang Tengah	76
Tabel 5.7 Jumlah Penduduk Menurut Pada Pekerjaan	79
Tabel 5.8 Nama-nama KSM di Kelurahan Kaliabang Tengah	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kota di Jawa Barat 2010.....	7
Gambar 2.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan (Nugroho)	27
Gambar 4.1 Diagram Siklus PNPM Mandiri Perkotaan	51
Gambar 5.1 Foto Saluran Air Yang Dipenuhi Sampah	75
Gambar 5.2 Foto Kondisi Jalan Rusak	75
Gambar 5.3 Foto Kondisi Rumah Tidak Layak Huni	76
Gambar 5.4 Diagram Siklus	89
Gambar 5.5 Foto Pelatihan Tata Boga di Kelurahan Kaliabang Tengah	101
Gambar 5.6 Foto partisipan perempuan yang mengikuti pelatihan tata boga.....	102
Gambar 5.7 Salah satu oven peninggalan pelatihan tata boga akhir tahun 2010 yang tidak terpakai dan tersimpan di kantor BKM Kelurahan Kaliabang Tengah	102

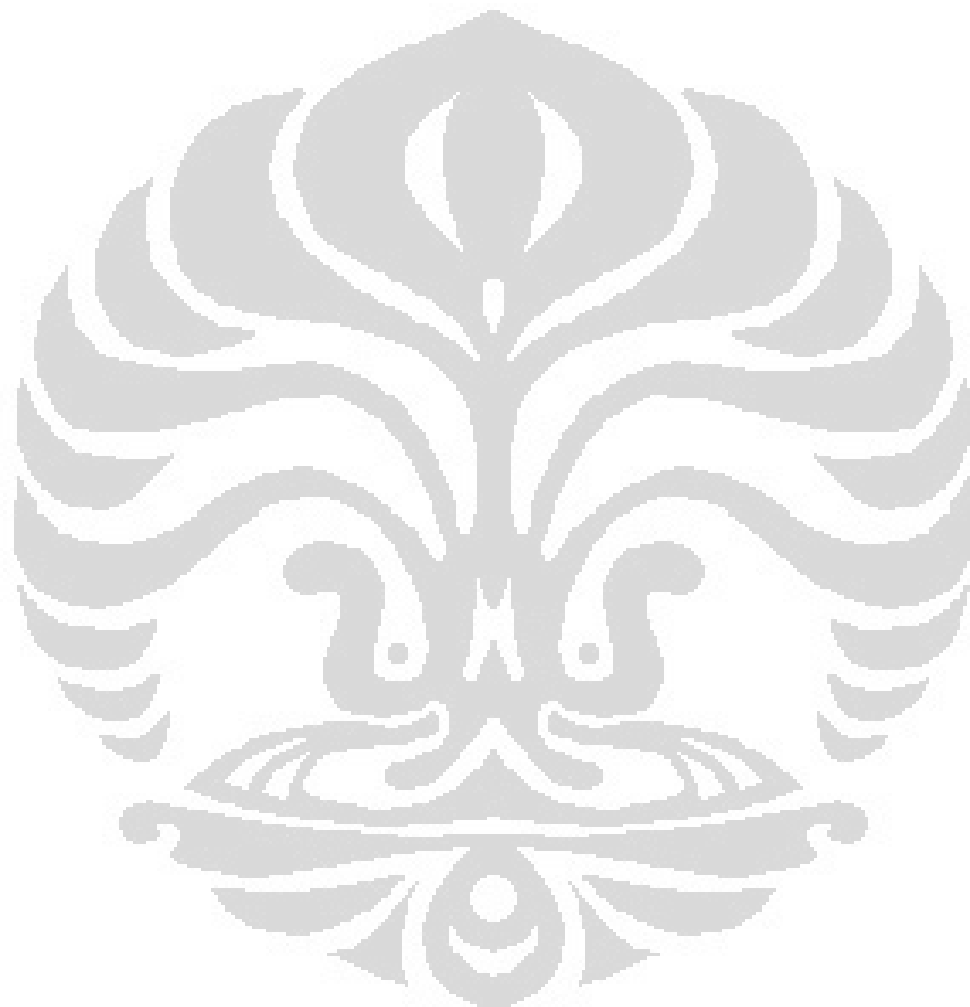
DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Indikator Penilaian BKM Award
- Lampiran 2 Data SIM Rekap Partisipasi Kota Bekasi Menurut Kelurahan
- Lampiran 3 Profil BKM Kaliabang Tengah
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara Untuk BKM
- Lampiran 5 Transkrip Wawancara
- Lampiran 6 Struktur Organisasi BKM Kelurahan Kaliabang Tengah
- Lampiran 7 Nama-Nama KSM Kelurahan Kaliabang Tengah
- Lampiran 8 Foto-Foto Kondisi Infrastruktur di Kelurahan Kaliabang Tengah
- Lampiran 9 Foto-Foto Kegiatan Lingkungan PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahan Kaliabang Tengah
- Lampiran 10 Foto-Foto Kegiatan Sosial Pelatihan Tata Boga

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

A	APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
B	BKM	: Badan Keswadayaan Masyarakat
	BOP	: Biaya Operasional
F	Fasilitator	: Tenaga Pengembangan Masyarakat PNPM
G	Grassroot	: Akar rumput, masyarakat
I	IDB	: <i>Islamic Development Bank</i>
K	Korkot	: Koordinator Kota
	KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
L	LKM	: Lembaga Keswadayaan Masyarakat, merupakan nama generik yang dahulu dinamakan BKM
M	MDG's	: Millenium Development Goals
	Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
P	P2KP	: Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
	PAD	: <i>Project Appraisal Document</i>
	PAKET	: Penanggulanagn Kemiskinan Terpadu
	PimKol	: Pimpinan Kolektif
	PJM	: Perencanaan Jangka Menengah
	PJOK	: Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
	PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
	Pronangkis	: Program Penanggulangan Kemiskinan
	PS	: Pemetaan Swadaya
R	Relawan	: Warga setempat yang peduli membantu warga miskin di wilayahnya tanpa pamrih
	Renta	: Rencana Tahunan
	RK	: Refleksi Kemiskinan
	RKM	: Rembug Kesiapan Masyarakat
	RT/RW	: Rukun Tetangga/ Rukun Warga
	RWT	: Rembug Warga Tahunan

T Tridaya : Pemberdayaan Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan
Pemberdayaan Ekonomi.
UP : Unit Pengelola yang dibentuk BKM
UPK : Unit Pengelola Keuangan
UPL : Unit Pengelola Lingkungan
UPS : Unit Pengelola Sosial



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sulit terpecahkan di Indonesia dan menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh Pemerintah. Badan Pusat Statistik menyatakan penduduk miskin di Indonesia dari Maret 2010 ke Maret 2011 mengalami penurunan sebesar 1,00 juta orang. Pada Maret 2010 penduduk miskin sebesar 31,02 juta orang (13,33%) sementara sampai Maret 2011 penduduk miskin menurun menjadi (12,49%) sebanyak 30,02 juta orang (BPS, 2011: dds.bps.go.id). Penduduk miskin di Indonesia memang mengalami penurunan dari tahun 2010 ke 2011, tetapi disparitas kemiskinan antara kota dan desa masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan. Masih dalam data yang sama, pada tahun 2011 saja penduduk miskin di perkotaan sebesar 9,23% dan penduduk miskin di desa sebanyak 15,72%. Angka ini menunjukkan masyarakat desa menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan penduduk Indonesia dan masyarakat miskin lebih tersebar di daerah pedesaan. Di dalam kota sendiri ketidakmerataan kesejahteraan atau disparitas kemiskinan ini masih sering dijumpai, terutama untuk daerah-daerah setingkat kelurahan yang letaknya jauh dari pusat kota dimana masalah kemiskinan masih menjadi momok dan jauh dari kalimat “kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya”. Pemerintah terus berupaya yang untuk mengatasi masalah kemiskinan, Pemerintah menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan rencana kerja pemerintah tahun 2012 dengan tema “Percepatan dan Perluasan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Kebijakan pembangunan nasional yang dibuat mengarahkan pada kebijakan *Pro-Growth*, *Pro-Poor*, *Pro-Job* dan *Pro-Environment* yang diharapkan menurunkan tingkat kemiskinan melalui kebijakan 4 (kluster) penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari (Menko Kesra, 2011):

1. Kluster 1 : Bantuan dan Perlindungan Sosial;
2. Kluster 2 : PNPM Mandiri;
3. Kluster 3 : Penyaluran KUR dan;
4. Kluster 4 : Program Murah

Dari keempat kluster penanggulangan yang disebutkan di atas menyebutkan salah satu kebijakan yang dimunculkan adalah PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri yang merupakan program yang mengupayakan penanggulangan kemiskinan dengan meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan kondisi yang lebih baik lagi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam penelitian ini akan lebih membahas tentang PNPM Mandiri sebagai kebijakan pro rakyat yang memfokuskan pada partisipasi masyarakat untuk mencapai kemandirian. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan. PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri wilayah khusus dan daerah tertinggal.

Pembangunan di perkotaan sejauh ini masih terpusat di tengah kota sebagai upaya melakukan pembangunan dengan maksud pencitraan bagi para pendatang terhadap kota itu sendiri, tetapi masih mengesampingkan pembangunan di daerah-daerah yang letaknya jauh dari pusat kota. Program nasional PNPM Mandiri Perkotaan ini yang dapat dijadikan salah alternatif bagi daerah-daerah yang jauh dari pusat kota untuk memberdayakan daerahnya juga masyarakatnya untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan sehingga tingkat kemiskinan dapat dikurangi dari adanya pembangunan. PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan kelanjutan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) tahun 1999, masyarakat diajarkan untuk tidak lagi pasif dan apatis dalam membangun hidupnya untuk

mengatasi masalah kemiskinan melalui partisipasi. Masyarakat itu sendiri yang mengetahui apa yang dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan di daerahnya dan menyumbangkan solusi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Peran birokrasi pemerintah hingga tingkat desa/kelurahan yang memiliki akses langsung selaku unsur penanggungjawab, pelaksana dan pendamping (fasilitator) melalui penyelenggaraan PNPM Mandiri Perkotaan harus mampu merangsang tumbuhnya “*development creativity and motivating*” di masyarakat. Ragam usaha menumbuhkan kreativitas dan motivasi masyarakat miskin agar memiliki “*self confidence*” untuk berkiprah dalam pembangunan yang memerlukan “*capability and capacity organization*” atau unsur birokrasi pemerintahan yang kuat, baik aspek *internal administrative* maupun *external administrative* berupa transformasi sosial budaya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat sosial (Adi,2001:24-25).

Masyarakat dalam pemerintahan sangat besar perannya, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintah yang berkenaan dengan kebijakan publik menandakan demokrasi telah berjalan. Demokrasi disini adalah demokrasi deliberatif, yang menurut Jurgen Habermas adalah demokrasi yang “radikal” yang menekankan pada unsur partisipasi dan kesetaraan setiap anggota masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan publik (Karianga,2011:194). Setiap pengambilan keputusan dan kebijakan diperlukan adanya partisipasi masyarakat agar pemenuhan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan untuk pemecahan masalah dalam masyarakat guna membangun daerahnya sendiri. Pengikutsertaan publik (masyarakat) yang terwujud dalam perencanaan yang partisipatif dapat membawa keuntungan yang substantif, di mana keputusan publik yang diambil dapat membawa kepuasan publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan (Sinambela, 2006:37). Partisipasi juga sebagai rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai keterlibatan masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Kemiskinan dan partisipasi menjadi dua hal yang sangat erat kaitannya, kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin ke dalam lembaga-lembaga

utama masyarakat, merupakan salah satu ciri kebudayaan kemiskinan (Suparlan, 1993:7). Menurut Kartasmita (dalam Setiana,2005:6) mengatakan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Program PNPM Mandiri Perkotaan dianggap tepat untuk menjadikan masyarakat yang mandiri melalui penyertaan masyarakat di dalamnya dan mengatasi kemiskinan di perkotaan, keterlibatan masyarakat dapat dilihat dengan cara yang berbeda-beda dalam program ini. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai sebuah lembaga kepemimpinan kolektif dan berperan sebagai representasi warga dengan proses pemilihan langsung oleh warga masyarakat, tertulis, rahasia, tanpa pencaloan, dan tanpa kampanye maupun rekayasa dari siapapun. Kekuasaan atau kewenangannya dan legitimasinya BKM bersumber dari masyarakat setempat (Pedum PNPM Mandiri Perkotaan,2010:35). BKM selaku penggerak program PNPM Mandiri Perkotaan, sangat penting kedudukannya sebagai ujung tombak terlaksananya program PNPM Mandiri Perkotaan dan juga sebagai wadah perjuangan kaum miskin kota dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan kaum miskin kota tersebut. BKM sifatnya sukarela, setiap kelurahan memiliki BKM sebagai representasi kelurahan mewakili warga di lingkup kelurahan tersebut agar kebutuhan kelurahan yang terwakilkan dapat diaspirasikan kepada pemerintah daerah dan daerah yang terwakilkan itu dapat menikmati pembangunan yang dibutuhkan.

Dalam program PNPM Mandiri Perkotaan terdapat KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), KSM sebagai sebagai kelompok pemanfaat BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). KSM juga sebagai implementor dari perencanaan yang akan dilaksanakan. Jika BKM bentuk partisipasinya melalui partisipasi pikiran dan partisipasi ketrampilan, maka KSM bentuk partisipasinya adalah partisipasi tenaga. Keduanya bersifat partisipatif aktif dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Menurut Sanoff (Indrawijaya, Pranoto, 2011:61) peran serta masyarakat memiliki arti yang berbeda untuk masyarakat yang berbeda, cara untuk berperan juga berbeda berdasarkan

situasinya. Peran serta masyarakat bervariasi dalam bentuk, tingkat intensitas, cakupan dan frekuensinya. BKM dan KSM memiliki peran yang penting masing-masing, keduanya saling membutuhkan untuk menanggulangi masalah kemiskinan secara bersama-sama. BKM membutuhkan KSM untuk menjalankan perencanaan sedangkan KSM membutuhkan BKM sebagai badan yang menampung kemudian menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.

PNPM Mandiri Perkotaan setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada BKM terbaik, BKM terbaik nantinya akan menerima serapan bantuan dari pemerintah daerah sebagai *reward* atas kinerja BKM terbaik. Pemberian penghargaan ini juga untuk memotivasi BKM-BKM untuk meningkatkan kinerjanya. Pemilihan BKM terbaik dinilai dengan indikator sebagai berikut: (1) Keaktifan BKM, (2) BKM mempunyai sekretariat, (3) BKM telah melaksanakan Pemilu sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, (4) BKM telah melaksanakan audit, (5) BKM berpartisipasi dalam musrebang Kelurahan dan Kecamatan, (6) Pertemuan dengan Pemerintah Kelurahan, (7) Pengelolaan PPM (Penanganan Pengaduan Masyarakat), (8) Media warga/bulletin, (9) Keaktifan unit-unit Pengelola, (10) Kinerja sekretariat, (11) Jadwal buka sekretariat, (12) Kelengkapan administrasi sekretariat, (13) BKM telah melaksanakan tinjauan partisipatif, (14) BKM telah melaksanakan RWT (Rembug Warga Tahunan), (15) Swadaya Masyarakat, (16) Partisipasi Masyarakat, (17) BKM telah melaksanakan channeling, dan (18) Peta tematik. Berdasarkan indikator pemilihan BKM terbaik, partisipasi mendominasi indikator penilaian BKM terbaik. Indikator partisipasi di poin 1,5,13 dan 16 (dapat dilihat dalam lampiran 1).

Pelaksanaan PNPM Mandiri pada tahun 2009 sudah dilaksanakan di 33 Provinsi. Pelaksanaannya sudah berlangsung di 465 Kabupaten/Kota dan di 6.408 Kecamatan. Tahun 2010 PNPM Mandiri dilaksanakan di 6.328 Kecamatan, berkurang 80 Kecamatan dari tahun 2008 karena dianggap telah mandiri. Sementara itu, PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan bagian dari PNPM Mandiri inti pada tahun 2008 dilaksanakan di 8.813 Kelurahan/Desa, 955 Kecamatan, 245 Kota/Kabupaten di 33 Provinsi (<http://sosekling.pu.go.id>). Salah satu Provinsi

pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah Provinsi Jawa Barat yang juga merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

Tabel 1.1 Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 2010

Provinsi	Penduduk 2010*)	Provinsi	Penduduk 2010*)
Aceh	4,494,410	B a l i	3,890,757
Sumatera Utara	12,982,204	Nusa Tenggara Barat	4,500,212
Sumatera Barat	4,846,909	Nusa Tenggara Timur	4,683,827
R i a u	5,538,367	Kalimantan Barat	4,395,983
J a m b i	3,092,265	Kalimantan Tengah	2,212,089
Sumatera Selatan	7,450,394	Kalimantan Selatan	3,626,616
B e n g k u l u	1,715,518	Kalimantan Timur	3,553,143
L a m p u n g	7,608,405	Sulawesi Utara	2,270,596
Kep. Bangka Belitung	1,223,296	Sulawesi Tengah	2,635,009
Kepulauan Riau	1,679,163	Sulawesi Selatan	8,034,776
DKI Jakarta	9,607,787	Sulawesi Tenggara	2,232,586
Jawa Barat	43,053,732	Gorontalo	1,040,164
Jawa Tengah	32,382,657	Sulawesi Barat	1,158,651
DI Yogyakarta	3,457,491	M a l u k u	1,533,506
Jawa Timur	37,476,757	Maluku Utara	1,038,087
Banten	10,632,166	Papua Barat	760,422
		Papua	2,833,381
INDONESIA	237,641,326		

*) Angka Sementara

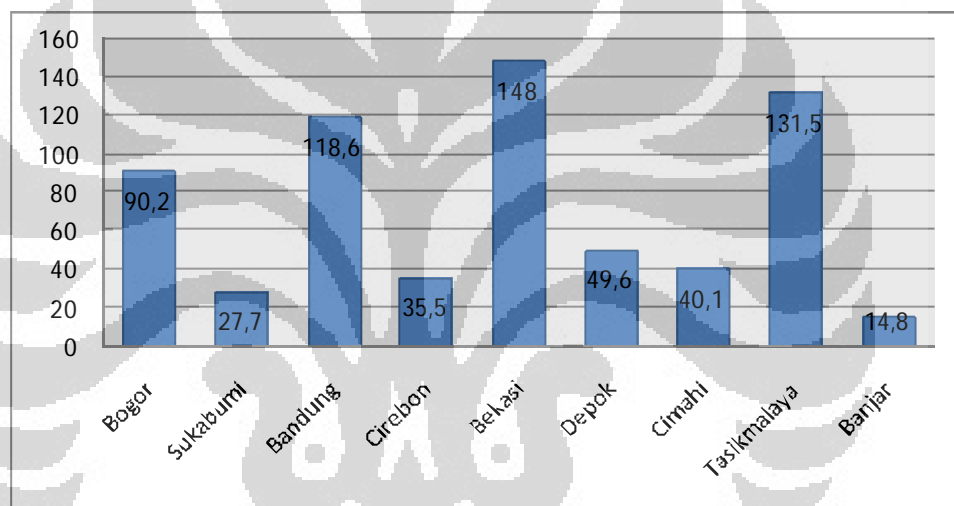
Sumber : BPS Nasional 2010

Sebanyak 43.053.732 penduduk menempati Provinsi Jawa Barat menjadikan Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak penduduknya di Indonesia. Pelaksanaan

Universitas Indonesia

PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, di Jawa Barat angka kemiskinan sampai Maret 2011 mengalami penurunan sebesar 125.090 penduduk dibandingkan dengan Maret 2010 (<http://www.tribunnews.com>). Meski mengalami penurunan, kemiskinan masih saja tetap menjadi permasalahan yang harus diselesaikan bersama-sama terutama di Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Kehadiran PNPM Mandiri Perkotaan diharapkan dapat mengakomodir penanggulangan masalah kemiskinan. Sebaran jumlah penduduk miskin di Jawa Barat menurut Kota di tunjukkan pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kota di Jawa Barat 2010 (000)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat

Gambar di atas menunjukkan Kota Bekasi diantara kota-kota di Jawa Barat menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk miskin paling banyak pada tahun 2010 yaitu sebanyak 148.000 penduduk, diikuti dengan Kota Tasikmalaya di posisi kedua sebanyak 131.500 penduduk dan posisi ketiga di tempati Kota Bandung sebanyak 118.600 penduduk. Sedangkan Kota Banjar menjadi Kota dengan jumlah penduduk miskin terendah di Jawa Barat menurut Kota (Badan Pusat Statistik Jawa Barat,2010). Kota Bekasi berdekatan dengan Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi, tetapi kemiskinan di Kota Bekasi masih paling tinggi menurut kota di Jawa Barat. Menjadi suatu ketertarikan bagi peneliti untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan

PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Bekasi berjalan. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Bekasi, jumlah penduduk miskin Kota Bekasi tidak sebanyak Kabupaten Bekasi dengan jumlah 161.700 penduduk (BPS Jawa Barat, 2010). Ketertarikan peneliti pada Kota Bekasi karena Kota Bekasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pencapaiannya dapat dikatakan berhasil dibandingkan dengan Kabupaten Bekasi dengan diperolehnya PAKET (Penanggulangan Kemiskinan Terpadu) sebagai *reward* yang diberikan pemerintah terhadap Kota/Kabupaten pilihan dengan kriteria (Profil PNPM Mandiri Perkotaan Kota Bekasi, 2011:5) :

- a. Pemkot memiliki SKPD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dan PJM (Perencanaan Jangka Menengah) Kota;
- b. Pemkot membentuk TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan), PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) PAKET;
- c. Pemkot menyediakan dana pendamping dan BOP (Biaya Operasional) dan;
- d. Memiliki BKM dengan Kinerja yang baik.

Di Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara menjadi Kecamatan yang paling padat penduduknya dibandingkan dengan Kecamatan-kecamatan lain di Kota Bekasi (BPS Bekasi, 2010). Penyebaran tertinggi di Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 13,65% (284.547 jiwa), Bekasi Barat 11,61% (242.042 jiwa), Pondok Gede 11,30% (235.579 jiwa) dan terendah di Kecamatan Jatisampurna sebesar 3,75% (78.080 jiwa). Banyaknya penduduk di kecamatan Bekasi dapat dilihat apakah berbanding lurus dengan partisipasi dalam pembangunan yang digerakkan melalui program PNPM Mandiri Perkotaan. Kehadiran PNPM Mandiri Perkotaan ini diharapkan dapat mengakomodir penduduk Kecamatan Bekasi Utara dengan banyaknya penduduk di Kota Bekasi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain untuk aktif dalam program PNPM Mandiri Perkotaan dan dapat melakukan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Kecamatan Bekasi Utara terutama dalam mengatasi kemiskinan.

Tabel 1.2 Capaian Partisipasi Kecamatan Bekasi Utara 2011

No	Kelurahan	Dewasa	%Dewasa	% Miskin	%Perempuan
1	MARGA MULYA	11,346	28.7%	17.4%	38.7%
2	HARAPAN BARU	14,306	3.2%	25.0%	33.6%
3	KALIABANG TENGAH	49,957	1.5%	18.8%	32.3%
4	PERWIRA	23,316	4.5%	25.2%	31.3%
5	HARAPAN JAYA	53,795	2.3%	25.6%	30.6%
6	TELUK PUCUNG	30,434	2.5%	15.4%	28.9%

Sumber: Data Sistem Informasi Manajemen Korkot Kota Bekasi

Pada tabel 1.2 tentang capaian partisipasi Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Kaliabang Tengah memiliki pencapaian partisipasi yang paling rendah dibandingkan dengan Kelurahan lainnya. Partisipasi dewasa yang terserap hanya 1.5% dari jumlah penduduk dewasa di Kelurahan Kaliabang Tengah, sementara jumlah penduduk dewasa di Kaliabang Tengah sebanyak 49.957 penduduk. Apabila dihitung jumlah penduduk dewasa yang berpartisipasi dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebanyak 749 penduduk dewasa ($1.5\% \times 49.957$) yang di dalamnya termasuk partisipasi penduduk miskin dan partisipasi perempuan (dapat dilihat di lampiran 2).

Pencapaian partisipasi dewasa yang rendah di Kelurahan Kaliabang Tengah diikuti juga dengan rendahnya partisipasi penduduk miskin dan partisipasi perempuan yang termasuk ke dalam partisipasi dewasa. Perolehan partisipasi penduduk miskin dan partisipasi perempuan di Kelurahan Kaliabang Tengah ikut mempengaruhi rendahnya capaian partisipasi dewasa. Partisipasi miskin di Kelurahan Kaliabang Tengah sebesar 18.8% terhadap partisipasi dewasa. Secara angka absolut partisipasi penduduk miskin yang ikut dalam kegiatan PNPM Mandiri hanya sebanyak 140 penduduk miskin ($18.8\% \times 749$) termasuk di dalamnya partisipasi perempuan yang hanya sebanyak 45 perempuan tergolong miskin saja yang terlibat di dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kaliabang Tengah.

Masih rendahnya partisipasi yang terserap di Kelurahan Kaliabang Tengah, secara keseluruhan termasuk di dalamnya rendahnya partisipasi miskin dan

partisipasi perempuan menjadi suatu ketertarikan peneliti untuk mengetahui apa yang menyebabkan masih rendahnya partisipasi di Kelurahan Kaliabang Tengah, sehingga dalam karya akademis ini ingin menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Kaliabang Tengah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

1.2. Rumusan Permasalahan

Dari tabel 1.2 Kelurahan Kaliabang Tengah menunjukkan serapan partisipasi terendah berada di Kecamatan Bekasi Utara. Rendahnya partisipasi dewasa yang terserap di Kelurahan Kaliabang Tengah hanya sebesar 1.5%, diikuti di dalamnya rendahnya partisipasi penduduk miskin dan partisipasi perempuan. Partisipasi penduduk miskin dan partisipasi perempuan yang rendah mempengaruhi rendahnya partisipasi dewasa di Kelurahan Kaliabang Tengah. Menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk mengetahui apa yang menyebabkan masih rendahnya partisipasi di kelurahan Kaliabang Tengah. Salah satu cara untuk pembangunan manusia, dalam mengatasi permasalahan kemiskinan diperlukan mengangkat kaum marginal yaitu penduduk miskin dan peran perempuan. Penduduk miskin dan perempuan sebagai objek tujuan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dalam hal mengatasi kemiskinan. Peran perempuan begitu penting karena perempuan yang mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan rumah tangganya, perempuan yang dapat memberi masukan prioritas kebijakan apa yang perlu diambil dalam pengambilan keputusan karena bersentuhan langsung dengan permasalahan kemiskinan. Selain itu, peran perempuan dapat memberi warna dalam pengambilan keputusan. Apabila partisipasi penduduk masyarakat miskin dan partisipasi perempuan ditingkatkan di Kelurahan Kaliabang Tengah nantinya dapat mempengaruhi partisipasi dewasa secara keseluruhan dan dapat menjadikan Kelurahan Kaliabang Tengah dimungkinkan meraih penghargaan BKM terbaik untuk menerima serapan dana dari pemerintah yang lebih besar untuk melakukan kegiatan pengentasan kemiskinan.

Pencapaian partisipasi sudah diketahui berapa persentasenya di Kelurahan Kaliabang Tengah, tetapi membicarakan partisipasi tidak hanya dilihat dari kuantitas

kehadiran masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. Partisipasi itu perlu pula diketahui kualitas partisipasi dalam keterlibatan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, sehingga rumusan pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat di Kelurahan Kaliabang Tengah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kaliabang Tengah dengan menggunakan Model CLEAR yang diajukan oleh Lowndes, Pratchett dan Stocker (*Lowndes, et.al., 2009:9*) :

1. *Can Do* – have the resources and knowledge to participate;
2. *Like to* – have a sense of attachment that reinforces participation;
3. *Enable to* – are provided with the opportunity for participation;
4. *Asked to* – are mobilized through public agencies and civic channels;
5. *Responded to* – see evidence that their views have been considered.

Penggunaan Model CLEAR sesuai dengan penelitian ini karena untuk mengidentifikasi ketidaksamaan respon warga terhadap partisipasi, sehingga dari kelima faktor Model CLEAR dapat diketahui bagaimana partisipasi di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan partisipasi masyarakat Kelurahan Kaliabang Tengah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.
2. Mengetahui penyebab rendahnya partisipasi masyarakat Kelurahan Kaliabang Tengah diantara kelurahan lainnya di Kecamatan Bekasi Utara dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

1.4 Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka signifikansi penelitian ini agar dapat:

1. Akademis

Untuk memperkaya wawasan ilmu pengetahuan mengenai teori partisipasi dan memberikan pengetahuan mengenai program PNPM Mandiri Perkotaan secara mendalam.

2. Praktis

Memberi masukan bagi Kelurahan Kaliabang Tengah sebagai bahan referensi untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

1.5 Pembatasan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Kaliabang Tengah tepatnya di sekretariat BKM Kelurahan Kaliabang Tengah dan lingkungan Kelurahan Kaliabang Tengah dengan melakukan wawancara mendalam ke tokoh-tokoh atau objek-objek penelitian yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Objek penelitian yang akan di wawancara adalah pimpinan dan anggota kolektif BKM Kelurahan Kaliabang Tengah, anggota KSM Kelurahan Kaliabang Tengah, masyarakat perempuan Kelurahan Kaliabang Tengah, baik yang terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan dan tim pendamping (Faskel).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, pembatasan penelitian dan sistematika penelitian

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan pustaka yang berisikan perbandingan-perbandingan antara penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu juga dibahas teori-teori yang berkaitan dengan kemiskinan, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan analisis kualitatif. Dengan jenis data yang digunakan adalah data primer (wawancara) dan data sekunder (tinjauan literatur dan data yang diperoleh dari instansi yang berkaitan dengan penelitian). Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder dari data yang tersedia di kantor Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan Kota Bekasi dan tinjauan literatur buku, artikel, jurnal, internet, dll.

BAB 4 GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai PNPM Mandiri Perkotaan secara umum dan PNPM Mandiri di Kelurahan Kaliabang Tengah sebagai data sekunder dari penelitian ini.

BAB 5 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DENGAN PENGGUNAAN MODEL CLEAR DI KELURAHAN KALIABANG TENGAH, KECAMATAN BEKASI UTARA, KOTA BEKASI

Bab ini membahas analisis atas data penelitian yang telah diolah yang kemudian dibahas untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

BAB 6 – SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini berupa pernyataan-pernyataan singkat yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian dan saran – saran yang dapat dijadikan masukan dari hasil penelitian ini.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dengan Penggunaan Model CLEAR Di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi” memerlukan beberapa peninjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa tinjauan yang diambil, diantaranya terdapat tiga penelitian yang terkait. Satu penelitian berkaitan dengan program PNPM Mandiri Perkotaan yang pembahasannya membandingkan LKM/BKM satu dengan yang lainnya. Dua penelitian yang lain berkaitan dengan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap tingkat keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan.

Tinjauan penelitian pertama diambil dari tesis yang berjudul “Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan (Studi Kasus di LKM Bina Mulya dan LKM Ratu Jaya Kecamatan Pancoran Mas Depok)”. Karya akademis ini ditulis oleh Erwin Permana, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Dalam penelitiannya Erwin Permana menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LKM/BKM, sehingga ditemukan perbedaan kinerja LKM Ratu Jaya dengan LKM Bina Mulya serta mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip PNPM Mandiri pada LKM Bina Mulya dan LKM Ratu Jaya.

Penelitian pertama ini, tidak ditemukannya teori dasar yang bersifat akademis yang menjadi tolak ukur evaluasi program PNPM Mandiri Perkotaan, Erwin juga tidak memiliki hipotesa sendiri sebagai acuan utama dalam penelitiannya. Erwin menjadikan Prinsip-prinsip PNPM Mandiri (Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007) sebagai tolak ukur evaluasi penelitiannya. Terdapat teori pendukung di dalam

penelitiannya, salah satunya tiga utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting (Conyers, 1991) :

1. Partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan pelaksanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek-proyek tersebut;
3. Mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak masyarakat untuk dilibatkan dalam pembangunan masyarakatnya sendiri.

Metode penelitian yang dilakukan oleh Erwin Permana dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu gejala dan menemukan suatu hukum yang universal secara deduktif. Melalui pendekatan ini, Erwin menggambarkan pelaksanaan program yang dilakukan oleh LKM dalam menjalankan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perkotaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program dalam upaya penanggulangan kemiskinan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan di dua tempat berbeda yakni Kelurahan Pancoran Mas dan Kelurahan Ratu jaya. Pertimbangan Erwin memilih kedua kelurahan ini karena, kedua kelurahan merupakan masyarakat yang relatif mampu mengembangkan relasi dengan pihak luar, hal ini terlihat dari beberapa program pemerintah yang pernah dilaksanakan di Kelurahan ini.

Setelah dilakukan penelitian, Erwin mengungkapkan terjadinya perbedaan kinerja LKM pada LKM Bina Mulya dan LKM Ratu Jaya yang teridentifikasi beberapa faktor diantaranya: (1) Jika pada saat dilakukan intervensi program PNPM Mandiri bersamaan dengan program lain yang sejenis maka akan ada kecenderungan

program PNPM Mandiri tidak berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. (2) Jika terjadi peralihan pola kepemimpinan dari model struktural ke model pimpinan kolektif maka dibutuhkan waktu bagi LKM untuk beradaptasi. (3) Jika pimpinan kolektif adalah orang-orang yang tidak bermasalah secara ekonomi maka tugas sebagai tenaga swadaya di LKM lebih dapat dilakukan. (4) Jika suatu LKM menunjukkan prestasi maka LKM tersebut kondusif berkelanjutan karena pemberian *reward*. (5) Jika suatu LKM terdapat konflik internal baik antara sesama pimpinan kolektif maupun antara pimpinan kolektif dengan UP maka LKM tersebut kurang kondusif untuk berkembang.

Manfaat yang dapat diambil dari tinjauan pertama untuk penelitian saat ini adalah, Erwin Permana melakukan perbandingan perbedaan kinerja LKM Ratujaya dengan LKM Bina Mulya serta mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip PNPM Mandiri pada LKM Bina Mulya dan LKM Ratujaya. Perbandingan yang dilakukan Erwin sebagai masukan bagi penelitian saat ini karena peneliti saat ini juga menjadikan perbandingan antara BKM Kelurahan Kaliabang Tengah dengan BKM lain di Kecamatan Bekasi Utara sebagai substansi dari penulisan karya akademis skripsi. Perbandingan yang dilakukan oleh peneliti lebih kepada sejauh mana partisipasi berlangsung bukan pada evaluasi implementasi prinsip-prinsip PNPM Mandiri yang dilakukan Erwin Permana dan bukan perbandingan yang dilakukan secara mendalam, hanya sebagai pembanding pencapaian prestasi dalam indikator partisipasi. Teknik analisis yang dilakukan oleh Erwin dengan menggunakan metode kualitatif membantu peneliti melakukan penelitian dengan metode yang sama.

Tinjauan penelitian kedua diambil dari penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi”. Jurnal ini diteliti oleh Hernida Kusuma Listya, ST; Ir. Putu Artama Wiguna, MT, Ph.D; M. Syahid Akbar, S.Si, M.Si dalam bidang keahlian Manajemen Proyek, Program Studi Magister Manajemen Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Penelitian ini sebelumnya adalah tesis yang di tulis oleh Hernida Kusuma Listya, kemudian diterbitkan menjadi jurnal oleh ITS.

Penelitian ini mengukur besarnya pengaruh tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan proyek pada proyek PNPM Mandiri Pedesaan menurut masyarakat yang terlibat berdasarkan pada analisis *SEM (Structural Equation Modelling)*. Hal tersebut penting dilakukan agar masyarakat itu yang mengelola dan mengorganisasikan sumber-sumber lokal baik yang bersifat materil, pikiran, maupun tenaga (Slamet,1994:6) dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan. Teori inilah yang dijadikan teori dasar dari penelitian Hernida. Pemilihan tempat penelitian yaitu di Kabupaten Banyuwangi karena Banyuwangi termasuk dalam daftar desa tertinggal PNPM Pedesaan yang nantinya akan menerima manfaat proyek pembangunan PNPM Mandiri Pedesaan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian konfirmatif, yang bermaksud menelaah dan menjelaskan pola hubungan di antara dua variable atau lebih yang jenis ini didukung teori telah dibutuhkan sebagai landasan dalam mengajukan hipotesis maupun untuk menemukan kriteria pengukuran terhadap adanya hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, diantaranya penelitian melalui pengujian terhadap hipotesis. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan sampel acak atau *random sampling / probability sampling*.

Hasil penelitian memberikan jawaban dari dua variabel yang diuji melalui uji struktural model menyatakan semakin tinggi partisipasi masyarakat pada proyek PNPM Mandiri Pedesaan maka akan semakin tercapai tingkat keberhasilan dari proyek tersebut, begitupun sebaliknya. Hal ini diperoleh dari variabel partisipasi masyarakat yang paling berpengaruh yaitu Tahapan Partisipasi dengan koefisien 0.561 karena tahapan partisipasi merupakan proses awal yang paling penting dan tahu mengenai kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat, sementara variable keberhasilan proyek yang paling dipengaruhi adalah variable Kesesuaian Aktor yang

Terlibat dengan koefisien sebesar 0.878 karena besarnya kekuatan masyarakat dalam suatu proyek dapat mencapai target pada rencana awal proyek.

Meskipun tinjauan kedua menggunakan dua variabel dalam penelitiannya dalam mengukur partisipasi terhadap tingkat keberhasilan proyek pemberdayaan masyarakat dan penelitian saat ini hanya menggunakan satu variabel, tetapi pengukuran partisipasi dengan pendekatan kuantitatif ini membantu penelitian saat ini untuk menganalisis penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di BKM Kelurahan Kaliabang Tengah. Namun analisis yang digunakan tidaklah sama, penelitian oleh Hernida menggunakan teknik analisis *SEM (Structural Equation Modelling)* sementara penelitian saat ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan wawancara tetapi dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji teori.

Tinjauan penelitian ketiga dari tesis yang berjudul “Proses Partisipasi Masyarakat Sebagai Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat dalam Pelaksanaan P2KP (Suatu Studi Tentang Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di Kelurahan Lenteng Agung)” yang ditulis oleh Sudarini dalam pemenuhan syarat untuk menempuh gelar Magister Sains (M.Si) Dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial, Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia.

Penelitian ini mengukur bagaimana proses partisipasi anggota kelompok masyarakat (KSM) dalam pelaksanaan proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan di Kelurahan Lenteng Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan non direktif (Batten). Asumsi yang mendasari pendekatan direktif adalah bahwa *community worker* memahami apa yang dibutuhkan dan apa yang baik bagi masyarakat. Sedangkan untuk pendekatan non direktif atau disebut juga dengan pendekatan yang bersifat partisipatif dilakukan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat mengetahui apa yang seharusnya dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Jenis penelitian yang bersifat deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan *sampling non probabilita* dan penentuan informan dengan cara

sengaja (*purposive sampling*), dimana Sudarini yang menentukan informannya sendiri.

Hasil penelitian Sudarini adalah ditemukannya beberapa permasalahan diantaranya dari aspek pelaksanaan program, keterlibatan masyarakat dalam proyek ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat yang sudah mempunyai usaha yang relatif tetap dan stabil. Sementara masyarakat miskin yang sebenarnya membutuhkan dan tersebut justru melewatkan kesempatan karena takut tidak dapat mengembalikan dana pinjaman. Aspek koordinasi program terdapatnya masalah koordinasi program yang menyangkut daya gerak pelaksanaan program antar tingkatan yang masih lemah menyebabkan timbulnya kesenjangan dalam hal komunikasi, daya serap kebijakan, dan pengelolaan program. Aspek terakhir adalah segi pendamping dan pengawasan adalah kurang ditunjukan pada upaya masyarakat menyadari akan permasalahan yang di hadapi, potensi yang dimiliki dan sumber-sumber yang ada di lingkungan dapat dimanfaatkan, tetapi lebih pada hal-hal yang bersifat administrasi pelaksanaan program.

Manfaat tinjauan penelitian Sudarini lebih banyak memberikan masukan kepada peneliti karena pengambilan judul sama tetapi lokasi berbeda, meskipun PNPM Mandiri Perkotaan pada saat masih penelitian Sudarini masih bernama P2KP. Pendekatan dan metode juga tidak berbeda, pendekatan kuantitatif dengan menguji teori meskipun teori yang digunakan berbeda, sehingga hasilnya pun juga akan berbeda. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan teori model CLEAR yang baru muncul 2004 ini dari *Lowndes, Pratchett* dan *Stocker*, diharapkan penelitian ini hasilnya dapat disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai partisipasi. Namun analisis yang digunakan tidak akan jauh berbeda seperti penentuan informan dengan cara sengaja (*purposive sampling*).

Tabel 2.1 Matrikulasi Penelitian Sebelum dan Penelitian Sekarang.

Keterangan	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4
Judul Penelitian	Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan (Studi Kasus di LKM Bina Mulya dan LKM Ratu Jaya Kecamatan Pancoran Mas Depok).	Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.	Proses Partisipasi Masyarakat Sebagai Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat dalam Pelaksanaan P2KP (Suatu Studi Tentang Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di Kelurahan Lenteng Agung)	Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dengan Penggunaan Model CLEAR Di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi
Jenis Penelitian	Tesis	Jurnal	Tesis	Skripsi
Peneliti	Erwin Permana	Hernida Kusuma Listya, ST; Ir. Putu Artama Wiguna, MT, Ph.D; M. Syahid Akbar, S.Si, M.Si.	Sudarini	Irma Septiany
Teori Penelitian	Prinsip-prinsip PNPM Mandiri (Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007)	masyarakat itu yang mengelola dan mengorganisasikan sumber-sumber lokal baik yang bersifat materil, pikiran, maupun tenaga (Slamet,1994:6)	Menggunakan pendekatan direktif dan non direktif (Batten). Asumsi yang mendasari pendekatan direktif adalah bahwa community worker tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik bagi	Model partisipasi CLEAR (Garry Stocker 2004): 1. <i>Can do</i> 2. <i>Like to</i> 3. <i>Enable to</i> 4. <i>Asked to</i> 5. <i>Responded to</i>

			masyarakat.	
Metode Penelitian	menggunakan pendekatan kualitatif	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian konfirmatif, di dukung teori sebagai landasan dalam menguji hipotesis maupun untuk menemukan kriteria pengukuran terhadap adanya hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.	Penelitian yang bersifat deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menggunakan <i>sampling non probabilita</i> .	pendekatan dan analisis kuantitatif. Dengan jenis data yang digunakan adalah data primer (hasil kuisioner dan wawancara) dan data sekunder (tinjauan kepustakaan dan data yang diambil dari instansi yang berkaitan dengan penelitian)
Object's Site	Kelurahan Pancoran Mas dan Kelurahan Ratu jaya.	Kabupaten Banyuwangi.	Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.	Kelurahan Kaliabang Tengah
Hasil Penelitian	intervensi bersamaan dengan program lain, adaptasi peralihan pimpinan, kemampuan swadaya LKM, keberlanjutan prestasi dan konflik mempengaruhi perbedaan LKM Pancoran Mas dan Kelurahan Ratu Jaya.	semakin tinggi partisipasi masyarakat pada proyek PNPB Mandiri Pedesaan maka akan semakin tercapai tingkat keberhasilan dari proyek tersebut, begitupun sebaliknya.	Masyarakat yang sudah mempunyai usaha yang relatif tetap dan stabil sementara masyarakat miskin takut tidak dapat mengembalikan dana pinjaman, masalah koordinasi program, pendamping dan pengawasan kurang ditujukan	Kemampuan menyediakan waktu dan kemampuan berswadaya bagi masyarakat miskin masih sangat lemah, sosialisasi yang masih kurang terserap oleh semua penduduk di Kelurahan Kaliabang Tengah, kurangnya program-program yang ditujukan untuk perempuan di Kelurahan Kaliabang Tengah.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Kemiskinan

Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menuntut pemecahan. Pembangunan masyarakat diharapkan akan dapat tampil sebagai salah satu alternatif untuk melakukan upaya pemecahan masalah dan perbaikan kondisi tersebut. Kemiskinan didefinisikan banyak arti, tetapi secara umum kemiskinan membicarakan suatu standar tingkat hidup yang rendah. Suparlan mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. (Suparlan,1993:xi)

Sementara Todaro mengartikan kemiskinan yang disebutnya ‘*absolute poverty*’: “*Absolute poverty as the number of people who are unable to command sufficient resources to satisfy basic needs. They are counted as the total number living below a specified minimum level of real-income—an international poverty line*”. Kemiskinan sebagai sejumlah orang yang tidak mampu mengolah sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka yang terhitung hidup di bawah tingkat minimum adalah orang-orang yang penghasilan sebenarnya di garis di bawah garis kemiskinan internasional. (Todaro:2003,205)

Menurut World Bank dalam Laporan *Construction a New Strategy for Poverty Reduction*:

“Poverty is defined relevant to current conditions and is expanded to include all the dimension of human well-being, adequate food, shelter and comfort; reduced vulnerability to external shocks; access to education, health care, and basic

infrastructure; and the opportunity to participate in social and political life on equal basis with the rest of the population”.

Kemiskinan didefinisikan sesuai dengan kondisi Indonesia pada kondisi saat ini (krisis ekonomi akhir 1990-an) diperluas dengan memasukkan semua dimensi kesejahteraan manusia-kecukupan atas pangan, papan dan kenyamanan, mengurangi kerentanan terhadap benturan-benturan dari luar, akses ke dunia pendidikan, kesehatan, perawatan dan sarana-sarana dasar, serta peluang berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik tanpa dibeda-bedakan dengan masyarakat lainnya (*World Bank*, 2001:2).

Dari berbagai definisi umum di atas, kemiskinan dapat di kategorikan: Pertama, standar hidup yang rendah dengan penghasilan yang tidak mencukupi. Kedua, kemiskinan tidak hanya mengenai standar hidup yang rendah tetapi juga masalah yang berkaitan dengan ukuran fisiologi, psikologi dan kondisi-kondisi sosial lainnya seperti: keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin, perumahan, pendidikan, kesehatan, benturan-benturan dari luar, sarana-sarana dasar serta peluang berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik tanpa dibeda-bedakan dengan masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak hanya terjadi di pedesaan atau daerah yang letaknya dari pusat Ibu Kota, tetapi di dalam perkotaan juga ditemui adanya kemiskinan, salah satunya adalah adanya pemukiman-pemukiman kumuh yang tersebar di kota ataupun secara terkelompok di suatu pinggiran perkotaan (Prasetyo,1995:51). Penyebab dari kemiskinan adalah kondisi dari sistem sosial secara keseluruhan. Pemecahan permasalahan ini dengan mendistribusikan kekuasaan (*empowerment*) kepada berbagai kelompok yang ada di dalam masyarakat miskin, sehingga mereka dapat ikut mengambil peran dalam proses-proses politik maupun ekonomi sehingga dapat membawa peningkatan kondisi kehidupan mereka dari kemiskinan.

Berbagai cara tentang strategi pembangunan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, agar lebih kena pada sasaran dan menyentuh kepentingan dan permasalahan langsung lapisan masyarakat miskin, maka tidak dapat diabaikan persoalan partisipasi masyarakat miskin dalam proses pembangunan yang dijalankan. Melalui partisipasi ini maka lebih dapat diharapkan lapisan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya sebagai konsumen program, tetapi ikut serta menentukan program yang dianggap paling cocok untuk masyarakat miskin (Soetomo,1995:134)

2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik dan Partisipasi Publik

Implementasi kebijakan menjadi tahap yang paling penting dalam suatu program kebijakan. Suatu program yang sudah direncanakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan, selain itu bila tidak dilaksanakan tidak akan ada evaluasi kebijakan hasil kajian dari perencanaan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain akan ditentang oleh para pelaksana (Dunn,1999:27).

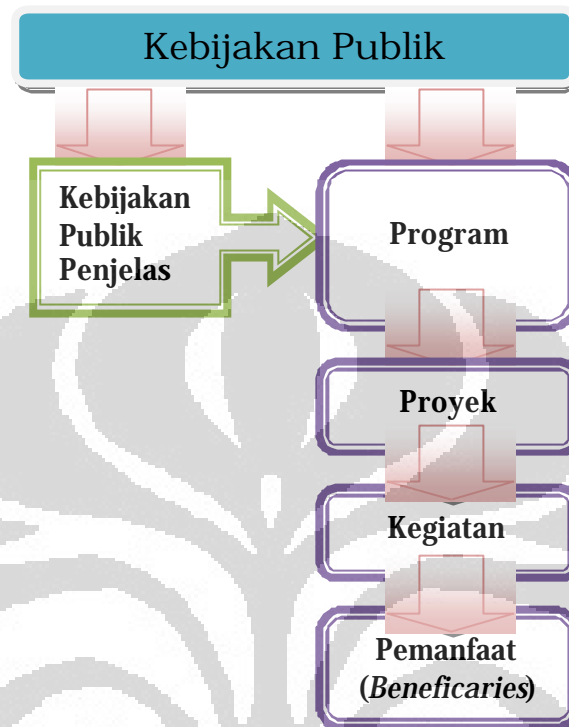
Implementasi dipandang dalam pengertian yang luas, menurut Donald Van Meter (Winarno, 2012:147) implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Agustino,2008:139) menyatakan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan

atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Ripley dan Franklin (Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Sementara Grindle masih dikutip oleh Winarno memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Ketiga definisi menurut Van Meter, Daniel dan Paul, Ripley dan Franklin serta Grindle dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan undang-undang, perintah-perintah atau keputusan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai menjadi jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Pada dasarnya suatu kebijakan diimplementasikan untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2008:432). Apa yang dimaksud oleh Nugroho, program merupakan turunan dari kebijakan publik atau dengan kata lain program merupakan bagian dari kebijakan publik yang diimplementasikan secara langsung. Sementara itu, formulasi kebijakan turunan kebijakan publik lainnya adalah kebijakan publik penjelas. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Perda memiliki turunan kebijakan publik penjelas yang sering diistilahkan *peraturan pelaksanaan*.

Gambar 2.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan (Nugroho,2008:433)



Banyak model pendekatan implementasi kebijakan publik sejalan dengan perkembangan studi mengenai implementasi kebijakan. Model pendekatan ini dibagi secara umum menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan *top down* dan *bottom up*. Lester dan Stewart (Agustino, 2008:140) istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando yang mirip dengan *top down*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Namun pemilihan model kebijakan juga melihat sejauh mana sifat kebijakan itu sendiri. Jika kebijakan yang dikeluarkan tidak dapat melibatkan masyarakat berkenaan akan munculnya konflik kepentingan atau berkenaan dengan keamanan negara, maka model implementasi kebijakan yang diambil adalah pendekatan *top down*. Bila kebijakan berkenaan dengan pengembangan masyarakat, maka pendekatan *bottom up* yang dapat digunakan.

Dalam Nugroho (2008:446) model pendekatan implementasi kebijakan publik dengan pendekatan *bottom up*, salah satunya didukung oleh Richard Elmore, Micheal Lipsky, Benny Hjren dan David O'porter dalam model Elmore,dkk. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan. Model Elmore, dkk menguatkan pendekatan *bottom up* agar masyarakat terlibat dalam implementasi kebijakan dalam program-program pemerintah yang diharapkan untuk memberi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi seluas-luasnya.

2.2.3. Partisipasi

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang artinya bagian dan *cepere*, yang artinya mengambil, sehingga diartikan “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Huntington dan Nelson berpendapat sama bahwa partisipasi mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara (Karianga, 2011: 213).

Participation is defined as a voluntary contribution by the people in one or another of the public programmes supposed to contributed to national development, but the people are not expected to take part in shapping the programme in criticizing its contents (Economic Commnision for Latin America dalam Kumar,2002:24).

Partisipasi menurut Mikkelsen (dalam Adi,2008:107) adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, dan diri mereka sendiri. Selain itu, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat.

Partisipasi tidak hanya terbatas pada kegiatan politik di suatu negara saja. partisipasi juga ada dalam kegiatan lainnya, seperti kegiatan sosial, hukum, keagamaan, lingkungan dan kegiatan lainnya. Setiap kegiatan memerlukan partisipasi untuk dapat dijalankan, baik itu partisipasi yang sifatnya sukarela atau dipaksa untuk ikut berpartisipasi. Tidak adanya keterlibatan individu ataupun partisipasi kolektif masyarakat, kegiatan tidak akan berarti apa-apa karena tidak ada yang menggerakkan.

Rumusan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa partisipasi (masyarakat) adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriyahnya saja (Sastropetro, 1988: 11). Davis mengemukakan definisi partisipasi sebagai berikut: *“Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them”*. Selanjutnya ia mengemukakan pula : *“there are three ideas in this definition which are important to managers who will practice the art of participation, most of them do agree on the importance of these three ideas”*.

Pendapat tersebut dapat diterjemahkan bahwa “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Di dalamnya terdapat tiga buah gagasan yang penting artinya bagi para manager/pemimpin yang hendak menerapkan seni partisipasi dan kebanyakan dari mereka sependapat dengan tiga buah gagasan tersebut.” Adapun tiga buah gagasan yang penting yang dimaksud Davis adalah:

- a. Bahwa partisipasi, keikutsertaan, keterlibatan dan peran serta, sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
- b. Unsur kedua adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat rasa senang, kesukaan

untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota kelompok dengan segala nilainya.

- c. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab. Unsur tersebut menjadi segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota artinya ada rasa “*sense of belongingness*” (Sastropetro, 1988: 13).

Tinjauan kedua pengertian partisipasi menurut WHO dan Davis menjadi menjadi bertentangan, ketika WHO mengatakan partisipasi hanya keterlibatan lahiriyah (fisik) saja. Sementara Davis menjelaskan partisipasi sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan bukan hanya keterlibatan fisik saja. Bila seseorang dalam suatu lingkungan tidak dapat menghadiri kerjabakti di daerahnya, bukan berarti orang tersebut tidak berpartisipasi. Partisipasi yang bisa disumbangkan dapat saja berupa sumbangan lain seperti, menyumbangkan sejumlah uang untuk membeli makanan kecil untuk warga lain yang sedang kerja bakti atau langsung menyumbangkan makanan untuk warga yang bekerja bakti. Partisipasi menjadi berkembang bukan hanya mengenai keterlibatan fisik, pikiran dan perasaan saja. Bentuk keterlibatan menjadi lebih bervariasi seperti yang disebutkan oleh Davis dalam jenis-jenis partisipasi sebagai berikut (Sastropetro, 1988: 16).

1. Pikiran (*Psychological Participation*);
2. Tenaga (*Physical Participation*);
3. Pikiran dan tenaga (*Psychological and Physical Participation*);
4. Keahlian (*Participation with skill*);
5. Barang (*Material Participation*) dan;
6. Uang (*Money Participation*).

Menurut kamus Inggris, *participation* adalah pengambilan bagian, pengikutsertaan. Dengan demikian partisipatif adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan atau masyarakat terlibat langsung dalam setiap tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*) sampai kepada *monitoring* dan evaluasi (*Controlling*)

selanjutnya disingkat dengan POAC. Hal ini juga dikatakan Robert Chambers, partisipasi adalah dalam arti bahwa masyarakat terlibat langsung dalam setiap tahapan proses (Daniel, Darmawati dan Niieldalina, 2006:59). Menurut Petty, dkk partisipasi adalah proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya (Daniel, Darmawati dan Niieldalina, 2006:59).

Pengertian partisipasi dari beberapa ahli yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan mengambil bagian atau peranan secara langsung dalam seluruh tahapan proses kegiatan dengan menyumbangkan berupa pikiran, tenaga, uang, keahlian barang secara sukarela ataupun dpaksa agar mampu menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya. Masyarakat sendiri yang mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi dan yang mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Setiap tahap proses penyelesaian masalah yang mereka hadapi akan berjalan sesuai yang mereka inginkan apabila mereka sendiri yang terlibat dalam dalam proses penyelesaiannya, dimulai dari perencanaan sampai pada tahap akhir yaitu evaluasi. *“Without popular participation in policy making and management, citizens and constituent bodies are kept dark; they lack the knowledge and information to be aware of what is going on, and they will turn into passive objects or subjects of government activities”* (Farazmand, 2004:16).

2.2.3.1 Tingkat Partisipasi

Menurut Pretty, J., ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal (tingkat partisipasi), yaitu (Karianga, 2011: 223):

1. Partisipasi Pasif dan Manipulatif, ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitaan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan professional di luar kelompok sasaran belaka.

2. Partisipasi Informatif, disini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akurasi hasil studi, tidak dibahas bersama masyarakat.
3. Partisipasi komunikatif, masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk mengajukan pandangan masyarakat sebagai masukan untuk ditindaklanjuti.
4. Partisipasi Insentif, masyarakat memberikan pengorbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.
5. Partisipasi fungsional, masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat bergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya.
6. Partisipasi interaktif, masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, pola ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang berstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
7. Partisipasi mandiri (*self mobilization*), masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembag-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan, yang terpenting

masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada dan atau digunakan.

Sedangkan tingkat partisipasi disederhanakan oleh Arnstein (Karianga,2011:244), ada tiga derajat partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Tidak partisipatif (*nonparticipation*);
2. Derajat semu (*degrees of tokenism*) dan;
3. Kekuatan masyarakat (*degrees of citizen power*).

White mengemukakan 10 buah alasan tentang pentingnya partisipasi sebagai berikut (Sastropetro, 1988:33):

1. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dapat dicapai.
2. Dengan partisipasi pelayanan atau *service* dapat diberikan dengan biaya murah.
3. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga dirinya.
4. Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya.
5. Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab.
6. Partisipasi menjamin, bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah dilibatkan.
7. Partisipasi menjamin, bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar.
8. Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian.
9. Partisipasi membebaskan orang dari kebergantungan kepada keahlian orang lain.

10. Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab dari kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya.

Sastropetro mengatakan sehubungan dengan partisipasi agar efektif, masyarakat akan dapat bergerak untuk lebih berpartisipasi apabila: 1) partisipasi itu dilakukan melalui organisasi-organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan, 2) partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, 3) manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu memenuhi keinginan masyarakat setempat, 4) dalam proses partisipasi masyarakat menjamin adanya kontrol yang dilakukan masyarakat (Karinga,2011:244).

Partisipasi yang ditawarkan oleh Sastropetro akan menjadi partisipasi yang lebih efektif apabila ada akses untuk berpartisipasi atau terbukanya kesempatan seluas-luasnya pada langkah awal, masyarakat yang akan berpartisipasi memiliki kemampuan untuk terlibat, walaupun belum memiliki kemampuan terdapatnya kemauan yang nantinya kemampuan akan dilatih secara perlahan-lahan. Partisipasi juga harus difasilitasi sehingga ada kemauan atau keinginan masyarakat untuk terlibat. Namun karena tidak semua pemerintah, lembaga swadaya belum memiliki kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan partisipasi yang efektif maka munculah adanya ketidaksamaan respon warga terhadap partisipasi.

Menurut ESCAP permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat, bukan hanya akibat dari adanya penyimpangan perilaku atau masalah kepribadian, namun juga sebagai akibat masalah struktural, kebijakan yang keliru, implementasi kebijakan yang tidak konsisten dan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. (Admihardja dan Hikmat, 2001:1)

2.2.2.3 Model Partisipasi

Model CLEAR yang ditawarkan Pratchett, Stocker dan Lowndes (2004), untuk mengidentifikasi lima faktor yang menyebabkan ketaksamaan respon warga terhadap partisipasi. Model CLEAR berpendapat bahwa partisipasi akan sangat efektif dimana masyarakat (Karianga, 2011:233):

1. *Can Do* – have the resources and knowledge to participate;
2. *Like to* – have a sense of attachment that reinforces participation;
3. *Enable to* – are provided with the opportunity for participation;
4. *Asked to* – are mobilized through public agencies and civic channels;
5. *Responded to* – see evidence that their views have been considered.

The CLEAR model prompts a reflective evaluation of current practice. Which of the five factor are being addressed in current initiatives? Which factors have not received sufficient attention? How can the links between the five factors be improved in developing more strategic responses to the challenge of citizen participation? Do changing context require municipalities to re-prioritise the attention paid to different factors? (Lowndes, Pratchett and Stocker, 2009:9).

1. *Can do*

Refers largely to arguments about socio-economic-status, which have traditionally dominated explanations for variations in participation rates (Verba et al 1995). The claim is that when people have the appropriate skills and resources they are more able to participate. These skills range from the ability and confidence to speak in public or write letters, to the capacity to organize events and encourage such activities is also important (resources ranging from photocopying facilitate through ti internet access and so on). These skills and resources are much more commonly found among the better educated and employed sections of the population: those of higher socio-economic status. However, none of the requisite skills and resources is exclusively the proverty of high SES. It is possible for public, voluntary or community bodies to intervene to make up for socio-economic limitations inequipping citizens with the skills and resources fo participation. ‘Can do’ can be delivered by capacity building efforts aimed at ensuring that citizens are given the support to develop the skills and resources needed for them to engage (Lowndes, Pratchett and Stocker, 2009:10).

2. *Like to*

Rest on the idea that people's felt sense of being part of something encourages them to engage. The argument is that if you feel a part of something then you are more willing to engage. If you feel excluded or sense that you are not welcome then you may decide not to participate. If participation is seen as just for old people or for men then others may not feel comfortable or able to join in. A sense of trust, connection and linked networks can, according to the social capital argument, enable people to work together and co-operate more effectively (Putnam 2000). Sense of community can be a strong motivator for participation. But given the inherent diversity in many communities then, conversely, an absence of identity or a sense of being outsider can militate against participation. This factor can also be addresses by policy makers and non-governmental practitioners seeking to promote participation (Lowndes and Wilson 2001). The most important initial step in diagnosis is to gain an understanding of the sense of loyalties and identities held in various communities. It is not easy to manipulate or change these feelings held about the communities in which people live but it is possible to give people the opportunity to believe that they are part of a wider civic identity built around their locality or some sense of equal and shared citizenship. Recognizing and promoting a sense of civic citizenship and community cohesion can help develop an environment in which people will like to participate (Lowndes,Pratchett and Stocker,2009:11).

3. *Enable to*

As a factors in participations, is premised on the research observation that most participation is facilitated through groups or organization (Parry et al 1992, Pattie et al 2004). Political participation in isolation is more difficult and less sustainable (unless and individual is highly motivated) than the mutually reinforcing engagement of contact through groups and networks. Collective participation provides continous reassurance and feedback that the cause of engagement is relevant and that participation is having some value. Indeed, for some, engagement in this manner is more important than the outcome of such participation. The existence of networks and groups which can support participation and which can provide a route into decision-makers, therefore, is vital to the vibrancy of participation in an area. Research shows the relevance of civic infrasturctures to facilitating or inhibiting participation (Lowndes et al 2006a). Where the right range and variety of groups exists to organise participation there tends to be more of it. Umbrella organizations that can support civic, community and voluntary groups can play a particularly important role in providing and sustaining the context for the appropriate types of groups and participation platforms to emerge. They cah help groups become established, provide networks of contacts and information, explain how to campaign and engage and ease access to the relevant decision-makers (Lowndes,Pratchett and Stocker,2009:11).

4. Asked to

Built on the finding of much research that mobilization matters. People tend to become engaged more often and more regularly when they are asked to engage. Research shows that people's readiness to participate often depends upon whether or not they are approached and how they are approached (Verba et al 1995). Mobilisation can come from a range of sources but the most powerful form is when those responsible for a decision ask others to engage with them in making the decision. Research shows that the degree of openness of political and managerial systems has a significant effect, with participation increasing where there is a variety of invitations and opportunities (Lowndes et al 2006a). The variety of participation options for engagement is important because some people are more comfortable with some forms of engagement, such as a public meeting, while others would prefer, for example, to engage through on-line discussions (Lowndes et al 2001a). Some people want to talk about the experiences of their community or neighbourhood while others want to engage based on their knowledge of a particular service as a user.

The nature of 'the ask' is also important. Participation can be mobilized by the use of incentives (e.g. honoraria), through establishing a sense of obligation (as in the case of jury duty), or by offering bargains/exchanges (where participation is accompanied by investment or an enhanced service package). The focus of the 'ask' is also important. It could be directed at a particular neighbourhood or a larger cross-authority population. The sustainability of participation is relevant: can the 'ask' be sustained and will citizens keep responding? Who is being asked is another issue. There is a dilemma between developing 'expert citizens' and rotating/sampling involvement to get at 'ordinary citizens'. The 'asked to' factor asks municipalities to address the range and the repertoire of their initiatives? How do they appeal to different citizen groups? (Lowndes, Pratchett and Stocker, 2009:12).

5. Responded to

Captures the idea that for the people to participate on a sustainable basis they have to believe that their involvement is making a difference, that it is achieving positive benefits. This factor provides simultaneously the most obvious but also the most difficult factor in enhancing political participation (Lowndes et al 2001b). For people to participate they have to believe that they are going to be listened to and, if not always agreed with, at least in a position to see that their views have been taken into account. Meeting the challenge of the 'responded to' factor means asking public authorities how they weigh message from various consultation or participation events against other inputs to the decision-making process? How prioritised? Responsiveness is about ensuring feedback, which may not be positive in the sense of accepting the dominant view from participants. Feedback involves explaining how the decision was made and the role of participation within that. Response is vital for citizen education, and so has a bearing on the 'front end' of the process too. Citizen need to learn to

live with dissapointment: participation won't always 'deliver' on immediate concerns, but remains important. Citizens' confidence in the participation process cannot be premised upon the 'getting their of elected representatives and democratic leadership. Improving deliberation and accountability mechanisms within 'mainstream democracy' is a precondition for effective empowerment strategies (Lowndes,Pratchett and Stocker,2009:12).

2.3 Operasionalisasi Konsep

Konsep dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan dengan variabel partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan melalui studi di BKM Kelurahan Kaliabang Tengah, berkenaan masih rendahnya partisipasi masyarakat KelurahanKaliabang Tengah. Penelitian ini diarahkan untuk menemukan ketidaksamaan respon penyebab rendahnya partisipasi warga Kelurahan Kaliabang Tengah melalui model CLEAR. Apabila tipe ideal Model CLEAR terpenuhi, maka akan berpengaruh terhadap partisipasi yang efektif. Faktor-faktor Model CLEAR akan dioperasionalisasikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Kategori	Dimensi	Indikator
Partisipasi	Partisipasi Masyarakat	1. Rendah 2. Tinggi	1. <i>Can do</i>	a. Kemampuan SDM melaksanakan program. b. Keterampilan SDM dalam berorganisasi.
			2. <i>Like to</i>	a. Latar belakang mengikuti program. b. Keinginan untuk terus mengikuti program. c. Identitas (suku, agama dll) yang beragam tidak menghalangi untuk berpartisipasi.
			3. <i>Enable to</i>	a. Terbukanya kesempatan terlibat dalam program. b. Partisipasi difasilitasi oleh program. c. Mengambil peran untuk mempengaruhi keputusan.
			4. <i>Asked to</i>	a. Mengikuti kegiatan program atas keinginan sendiri. b. Mengikuti kegiatan program karena dibayar. c. mengikuti kegiatan program karena dipaksa.
			5. <i>Responded to</i>	a. Ide dan gagasan partisipan ditanggapi dan dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan. b. Respon wakil terpilih terhadap gagasan partisipan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan dijadikan landasan untuk melakukan penelitian. Metode penelitian dengan teknik pengumpulan data yang tepat akan menentukan hasil penelitian itu sendiri. Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian positivist, yaitu metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif tetapi dengan metode pengumpulan data kualitatif. *Positivist social science is an organized method for combining deductive logic with precise empirical observations of individual behavior in order to discover and confirm a set of probabilistic causal laws that can be used to predict general patterns of human activity* (Neuman,2006:82). Di dalam bab ini juga akan diuraikan tujuh hal mengenai metode penelitian, yaitu: pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, proses pengumpulan data, responden penelitian, penarikan sampel dan lokasi penelitian.

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pemilihan pendekatan kuantitatif, karena pendekatan kuantitatif dalam ilmu sosial sebenarnya lebih mengacu kepada “keakuratan” deskripsi suatu variabel dan keakuratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Irawan,2007:94). Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini adalah mengukur keakuratan suatu variabel yaitu partisipasi masyarakat di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kota Bekasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian ini adalah kualitatif melalui wawancara mendalam dan tinjauan kepustakaan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi yang telah dicapai, bukan hanya partisipasi berdasarkan kelengkapan daftar hadir tetapi partisipasi yang aktif menyuarakan aspirasi mereka sendiri.

3.2. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian terdapat pengklasifikasian yang terdiri dari klasifikasi menurut tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu dan klasifikasi berdasarkan teknik pengumpulan data. Untuk mengetahui jenis penelitian yang digunakan maka klasifikasi melalui:

3.2.1. Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan manfaatnya merupakan penelitian murni yang dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian murni akan memberikan dasar untuk pengetahuan dan pemahaman yang dapat dijadikan sumber metode, teori dan gagasan yang dapat diaplikasikan pada penelitian selanjutnya.

3.2.2. Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Kaliabang Tengah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Penelitian deskriptif akan secara detail untuk menjelaskan kemauan dan keterlibatan masyarakat Kelurahan Kaliabang Tengah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

3.2.3. Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu

Dalam penelitian ini, jenis penelitian berdasarkan dimensi waktu yaitu penelitian *cross-sectional*. Penelitian *cross-sectional* adalah penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu dan tidak akan di ulang untuk penelitian selanjutnya sebagai perbandingan (Prasetyo dan Jannah,2011:45). Penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2012 dan berakhir pada pertengahan Juni 2012 atau sampai terkumpulnya data yang dibutuhkan.

3.2.4. Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan untuk penelitian dengan metode kualitatif ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam sebagai sumber data primer. Sementara, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan data dari Kelurahan Kaliabang Tengah dan PNPM Kota Bekasi.

3.3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer untuk penelitian dengan metode kualitatif ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan, seperti yang akan dijelaskan peneliti di bawah ini:

3.3.1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada hampir semua penelitian kualitatif (Herdiansyah,2011:117). Metode penelitian ini untuk mengumpulkan data, seluruh informasi yang diperlukan berada di dalam benak responden atau informan (Irawan,2007:57) dengan menggunakan pedoman wawancara (dapat dilihat dalam lampiran 4) dengan tujuan untuk mengetahui penyebab rendahnya partisipasi masyarakat Kelurahan Kaliabang Tengah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dengan menggunakan Model CLEAR. Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 10 informan yang terdiri dari :

1. Anggota kolektif BKM Kelurahan Kaliabang Tengah;
2. Anggota KSM Kelurahan Kaliabang Tengah;
3. Masyarakat Kelurahan Kaliabang Tengah berjenis kelamin perempuan;
4. Tim pendamping (Faskel)

3.3.2. Studi Kepustakaan

Untuk pengumpulan data sekunder akan dilakukan studi pustaka dengan membaca literatur atau artikel yang terkait dengan penelitian ini melalui buku, media massa dan internet. Studi pustaka melalui buku akan berpatokan pada buku-buku mengenai teori partisipasi dan buku pedoman PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2010 dan laporan-laporan pertanggung jawaban kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di BKM Kelurahan Kaliabang Tengah.

3.4. Proses Penelitian

Proses penelitian ini diawali dengan mencari informasi kemudian dikumpulkan untuk menemukan permasalahan apa yang terjadi untuk diteliti secara lanjut. Selanjutnya peneliti mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian dan menemukan teori sebagai teori dasar penelitian. Kemudian peneliti menentukan metode penelitian apa yang sesuai, sehingga hasil analisis diperoleh dengan maksimal. Pada tahap analisis data, peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari metode penelitian yang digunakan berdasarkan konsep-konsep yang ada di dalam kerangka teori. Proses terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk mendapatkan hasil penelitian dan juga rekomendasi atau saran untuk pencapaian tujuan secara empirik.

3.5. Lokasi Penelitian

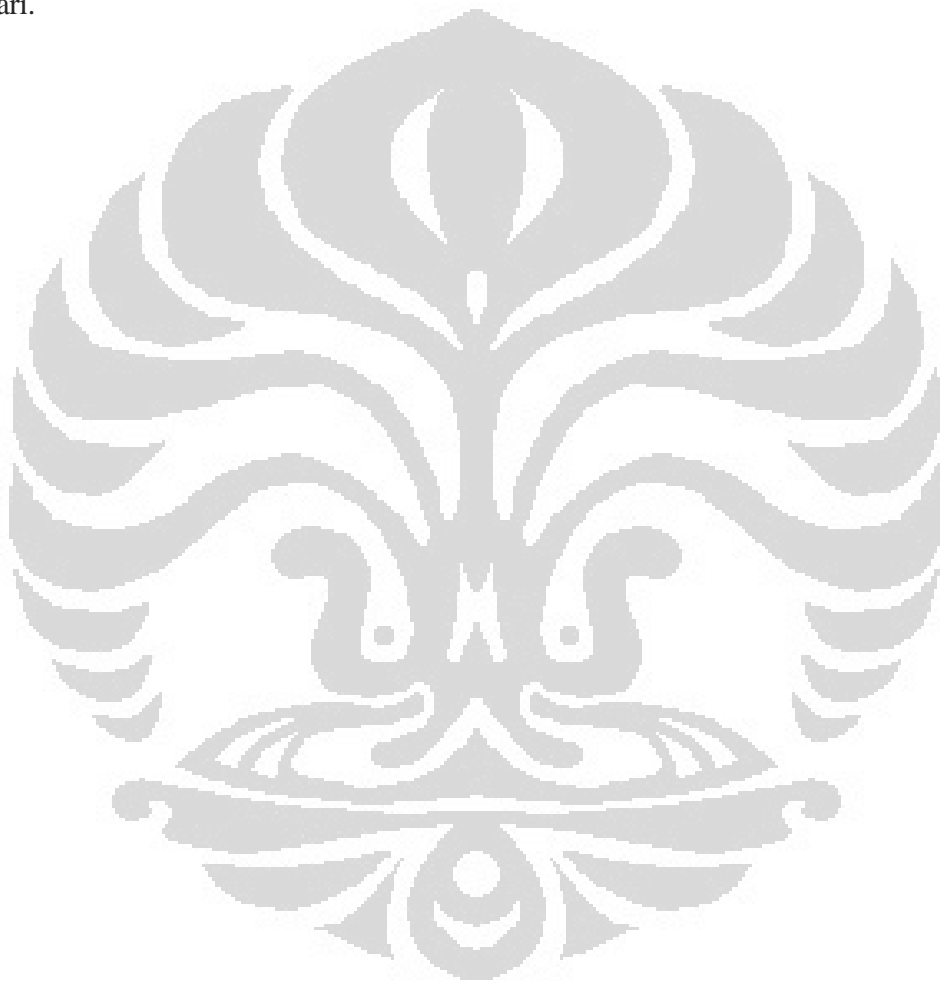
Lokasi penelitian adalah Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.

3.6. Hipotesis Kerja

Rendahnya partisipasi Kelurahan Kaliabang Tengah karena faktor-faktor pendukung partisipasi dengan menggunakan Model Partisipasi CLEAR (*can do, like to, enable to, asked to, responded to*) belum terpenuhi semua ataupun sebagian.

3.7. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini tidak terlalu banyak kendala yang ditemui yang menjadi keterbatasan penelitian, tetapi beberapa kendala yang ditemui pada saat di lapangan diantaranya beberapa informan tidak ingin ditemui dan waktu wawancara lebih banyak dilakukan pada malam hari karena informan hanya dapat ditemui pada malam hari.



BAB 4

GAMBARAN UMUM

4.1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

PNPM Mandiri Perkotaan yang dimulai pada tahun 2007 merupakan program kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) pada tahun 1999 sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah untuk menaggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi PNPM Mandiri Perkotaan. Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakat.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum PNPM yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Dengan demikian secara khusus tujuan PNPM Mandiri Perkotaan dirumuskan sebagai berikut: “Masyarakat di Kelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial, ekonomi dan tatapemerintahan lokal. Sementara itu sasaran PNPM Mandiri Perkotaan;

- a. Terbangunnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dipercaya, aspiratif, representatif dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat;
- b. Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan

kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan;

- c. Terbangunnya forum LKM tingkat Kecamatan dan Kota/Kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah;
- d. Terwujudnya kontribusi pendanaan dari Pemerintah Kota/Kabupaten dalam PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

4.1.2. Prinsip PNPM Mandiri Perkotaan

PNPM Mandiri Perkotaan menekankan pada prinsip-prinsip dasar, yaitu:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia, pelaksanaan PNPM senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya;
- b. Berorientasi pada masyarakat miskin, semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung;
- c. Partisipasi, masyarakat terlibat secara aktif pada setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan;
- d. Otonomi, dalam pelaksanaannya masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola;
- e. Desentralisasi, kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakatsesuai dengan kapasitasnya;
- f. Kesetaraan dan keadilan gender, laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan;

- g. Demokratis, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin;
- h. Transparansi dan Akuntabel, masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara moral, teknis, legal, maupun administratif;
- i. Prioritas, pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas;
- j. Kolaborasi, semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan;
- k. Keberlanjutan, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan ;
- l. Sederhana, semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola masyarakat.

4.1.3 Pendekatan PNPM

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam skala perwilayahan yang memadai yang memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam hal ini dipilih kecamatan sebagai lokus program yang mampu mempertemukan perencanaan dari atas dan dari bawah. Di tataran kecamatan inilah rencana pembangunan yang direncanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bertemu dengan perencanaan dari masyarakat dalam Musrebang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan sehingga dapat digalang perencanaan

pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan selaras waktu (*synchrone*). Dengan demikian PNPM Mandiri Perkotaan akan menekankan pemanfaatan Musrenbang Kecamatan sebagai mekanisme harmonisasi kegiatan berbagai program yang ada sehingga peranan forum LKM tingkat Kecamatan menjadi sangat vital.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

- Menggunakan kecamatan sebagai lokus program;
- Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan;
- Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif;
- Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan.

4.1.4 Dasar Hukum

Sebagai salah satu program inti dari PNPM Mandiri, maka dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah sama dan merujuk pada Dasar Hukum PNPM Mandiri, sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

4.1.5 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dalam PNPM Mandiri Perkotaan terdiri dari masyarakat, Pemerintah/ TKPP/TKPK Daerah, Pemangku Kepentingan yang terkait dapat dilihat pada tabel 4.1. Kelompok Sasaran.

Tabel 4.1. Kelompok Sasaran

Uraian Kelompok Sasaran	Bantuan Teknik/Pendampingan	Bantuan Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat warga kelurahan peserta PNPM Mandiri Perkotaan • LKM/Lembaga Keswadayaan Masyarakat • KSM/Kelompok Swadaya Masyarakat 	Warga kelurahan yang miskin menurut criteria kemiskinan setempat yang disepakati warga, termasuk yang telah lama miskin, yang penghasilannya menjadi tidak berarti karena inflasi, yang kehilangan sumber penghasilan.
Pemerintah Kota/Kabupaten, TKPP dan TKPK Daerah	Perangkat pemerintah kota/kabupaten sampai dengan kelurahan/desa yang terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, anggota TKPP dan TKPK daerah.	
Para Pemangku Kepentingan terkait	Perorangan atau asosiasi profesi, asosiasi usaha sejenis, perguruan tinggi, LSM, Bank, notaris, auditor publik, media masa (radio, tv, dsb.) yang peduli dengan kemiskinan.	

Sumber : Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan 2010

4.1.6 Penerima Manfaat Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan

Penerima manfaat langsung dari BLM yang disediakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan adalah keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh masyarakat kelurahan, melalui proses musyawarah warga, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya berorientasi IPM (Indeks Pembangunan Manusia), MDGs (*Millenium Development Goals*).

4.1.7 Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan

a. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan secara berjenjang. Diawali dari tingkat Kota, Kecamatan, RW dan RT. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk

memberikan gambaran menyeluruh dan utuh tentang tata cara pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

b. Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)

Hasil dari kegiatan sosialisasi adalah kesiapan masyarakat untuk melaksanakan seluruh rangkaian siklus PNPM Mandiri Perkotaan, kesiapan dibuktikan dengan hadirnya relawan masyarakat yang akan menjadi pelaku terdepan untuk bersama-sama masyarakat melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. Jumlah relawan masyarakat di setiap kelurahan bervariasi.

c. Refleksi Kemiskinan (RK)

Relawan masyarakat yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan bahkan meterinya untuk kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, selanjutnya dibekali dengan berbagai pelatihan. Hasil penelitian, dilanjutkan dengan kegiatan RK. Melalui kegiatan RK, masyarakat diajak untuk mengenali arti, kondisi, cirri, faktor dan kriteria kemiskinan. dalam kegiatan RK, masyarakat diajak untuk diajak menyampaikan harapan-harapan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Hasil lain kegiatan RK adalah penyepakatan kriteria KK miskin.

d. Pemetaan Swadaya (PS)

Relawan masyarakat dibekali dengan materi dan teknik kegiatan PS. Melalui Tim PS, dilaksanakan kajian-kajian terhadap berbagai kondisi kemiskinan yang ada dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sarana prasarana kepemimpinan dan kelembagaan. Bersama masyarakat, PS dilakukan pendataan KK miskin berdasarkan kriteria KK miskin yang telah disepakai dalam tahapan RK. Melalui kegiatan PS, dihasilkan inventarisasi dari permasalahan dari sisi lingkungan, ekonomi dan sosial. Dihasilkan pula data KK miskin dengan berbagai permasalahan dan harapan yang dibutuhkannya. Selanjutnya masyarakat melakukan perangkaan dan prioritas untuk seluruh hasil PS.

e. Pembangunan BKM

Pembangunan BKM merupakan hasil kajian kepemimpinan dan kelembagaan yang dilakukan dari tahapan PS. BKM dibentuk secara demokratis melalui pemilihan secara LUBER dengan pelibatan 30% penduduk dewasa dalam pemilihan di tingkat basis/TPS dan 2% penduduk dewasa dalam pemilihan di tingkat kelurahan. Jumlah pengurus BKM berkisar 9,11 dan atau 13 orang untuk masa pengabdian 3 tahun. BKM yang terbentuk selanjutnya dicatatkan di notaries dan tugas pertama yang diembannya adalah dokumen PS untuk disusun bersama masyarakat menjadi dokumen PJM Pronangkis.

f. Penyusunan PJM Pronangkis

Dokumen PS yang telah dihasilkan oleh relawan masyarakat, selanjutnya disusun untuk menjadi dokumen PJM Pronangkis. Melalui rangkaian kegiatan di tingkat kelurahan dan basis, dokumen PJM Pronangkis menggambarkan visi, misi dan program bersama dalam penanggulangan kemiskinan. PJM pronangkis berisikan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa 3 tahun dan dirinci dalam rencana tahunan. PJM Pronangkis disusun sejalan dengan visi Kota Bekasi, mengacu pada peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan pencapaian MDGs (Millenium Development Goals). Dokumen PJM Pronangkis mencakup usulan program dan kegiatan dalam lingkup Tridaya Pembangunan, yaitu Lingkungan, Ekonomi, Sosial.

g. Pembentukan KSM

PJM Pronangkis yang telah dihasilkan, menjadi acuan setiap warga untuk membentuk KSM dan menyusun proposal. KSM dibentuk sebagai kebutuhan warga untuk merealisasikan usulan, baik dengan skala di tingkat basis dan atau kelurahan. KSM ini bukan hanya sekedar pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagai pelaksana

kegiatan terkait dengan penanggulangan yang diusulkan untuk didanai oleh BKM melalui berbagai dana yang mampu digalang.

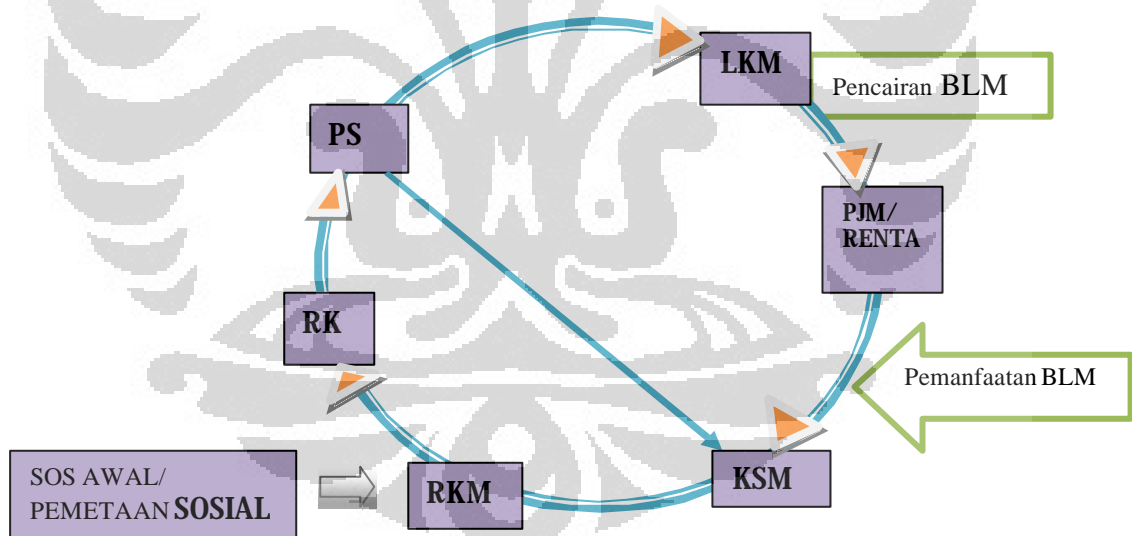
h. Pelaksanaan Kegiatan

Proposal yang telah dibuat KSM dan dinyatakan layak oleh BKM, setelah melalui suvei, verifikasi dan prioritas, usulan kegiatan dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan KSM sebagai pengendali langsung di lapangan. BKM beserta masyarakat lainnya melakukan monitoring dan pengawasan.

i. Monitoring dan Evaluasi

Setiap tahun dilaksanakan Rembug Warga Tahunan dan Audit oleh akuntan independen terhadap kegiatan yang dikelola oleh BKM dan KSM.

Gambar 4.1 Diagram Siklus



4.2 PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kaliabang Tengah

4.2.1 Kondisi Umum Kaliabang Tengah

Dinamika pembangunan masyarakat Kelurahan Kaliabang Tengah menunjukkan pertumbuhan yang positif, ditandai keberhasilan pembangunan yang

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Memasuki era globalisasi dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya, serta meningkatnya kebutuhan yang semakin kompleks merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian hasil pembangunan. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan serta perkembangan di masa kini dan masa depan diperlukan perencanaan yang jelas, terarah dan partisipatif.

Kondisi yang diharapkan di masa depan tidak terlepas dari pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan pembangunan secara efektif. Seiring dengan itu, upaya secara terus menerus tetap diharapkan untuk mengatasi tantangan dan hambatan pembangunan kelurahan guna mewujudkan kondisi yang diharapkan dan kondisi saat ini merupakan dasar atau bahan untuk perencanaan yang menentukan keberhasilan.

4.2.2 Keadaan Geografis

Keadaan geografis Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara sangat strategis, yaitu berada di wilayah administrasi Kota Bekasi dengan luas wilayah 397,785 hektar yang terdiri dari 30 RW dan 274 RT.

Kantor Kelurahan Kaliabang Tengah ke Kecamatan Bekasi Utara berjarak 5 KM, ke Ibukota Bekasi 10 KM, ke Ibukota Provinsi 145 KM, ke Ibukota Negara 35 KM. Adapun batas wilayah administrasi Kelurahan Kaliabang Tengah yaitu:

- Sebelah Utara : berbatasan Desa Setia Asih
- Sebelah Selatan : berbatasan Kelurahan Perwira
- Sebelah Barat : berbatasan Kelurahan Pejuang
- Sebelah Timur : berbatasan Desa Bahagia

4.2.2.1 Penduduk

Penduduk merupakan faktor dominan dalam setiap perencanaan pembangunan di manapun karena penduduk tidak saja menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga berperan sebagai pelaksana pembangunan. Laju pertumbuhan penduduk di Kelurahan Kaliabang Tengah Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Kaliabang Tengah.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Kaliabang Tengah

No.	RW	LK	PR	Jumlah	No.	RW	LK	PR	Jumlah
1.	RW. 01	1.573	1.437	3.010	16.	RW. 16	508	451	959
2.	RW. 02	869	851	1.720	17.	RW. 17	747	703	1.450
3.	RW. 03	1.654	1.578	3.232	18.	RW. 19	656	648	1.304
4.	RW. 04	1.444	1.466	2.910	19.	RW. 19	364	367	731
5.	RW. 05	1.378	1.324	2.702	20.	RW. 20	739	697	1.436
6.	RW. 06	2.104	1.990	4.094	21.	RW. 21	1.846	1.759	3.605
7.	RW. 07	707	667	1.374	22.	RW. 22	959	947	1.906
8.	RW. 08	961	975	1.936	23.	RW. 23	570	585	1.135
9.	RW. 09	1.048	1.003	2.051	24.	RW. 24	1.171	1.171	2.344
10.	RW. 10	1.858	1.891	3.749	25.	RW. 25	1.488	1.450	2.938
11.	RW. 11	1.236	1.205	2.441	26.	RW. 26	533	486	1.019
12.	RW. 12	1.253	1.216	2.469	27.	RW. 27	993	952	1.945
13.	RW. 13	1.270	1.188	2.458	28.	RW. 28	420	416	836
14.	RW. 14	781	770	1.551	29.	RW. 29	363	357	720
15.	RW. 15	1.330	1.272	2.602	30.	RW. 30	743	750	1.493

Sumber : PJM Kelurahan Kaliabang Tengah

Kondisi Demografis

- Jumlah Penduduk : 62447
- Jumlah Penduduk Dewasa : 49957
- Jumlah Laki-Laki : 31759
- Jumlah Perempuan : 30688
- Jumlah KK : 14363
- Jumlah KK Miskin : 3986
- Jumlah Jiwa Miskin : 16314

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan gambaran dari kondisi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, adapun tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Kaliabang Tengah tahun 2011 sebagai berikut:

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Kelurahan Kaliabang Tengah menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat Pendidikan (Sederajat)	2011
TK	1.065
SD	7.447
SLTP	7.960
SLTA	27.215
D3	3.152
S1	945

Ditinjau dari jenis lapangan pekerjaan, keadaan penduduk Kelurahan Kaliabang Tengah tahun 2011 yang bekerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Menurut Pada Pekerjaan

Lapangan Usaha	2011
Petani	25
Swasta	7.636
PNS	1.467
Pertukangan	95
Wiraswasta	1.090
Pemulung	38
Jasa	10.003

4.2.2.2 Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan perlu didukung oleh tersedianya sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Untuk mengetahui ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Jumlah Sarana Kesehatan Kelurahan Kaliabang Tengah

Sarana Kesehatan	2011
Posyandu	42
Pengobatan Tradisional	10

4.2.2.3 Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan.

Tabel 4.6. Jumlah Sarana Pendidikan Kelurahan Kaliabang Tengah

Saran Pendidikan	2011
Lembaga TPA/TK	65 unit
Lembaga SD/Sederajat	12 unit
SLTP/MTS	11 unit
SLTA/MA	5 unit
Lembaga Pendidikan Keagamaan	7 unit

4.2.3 Kondisi Kemiskinan Menurut Sumber Daya

4.2.3.1 Penyebab Kemiskinan

- a. Permasalahan bidang sarana dan prasarana
 - Kurangnya Drainase
 - Saluran air yang mengalami pendangkalan
 - Banyak jalan yang rusak
 - Tidak adanya plat beton yang memadai
 - Kurangnya sarana sanitasi
- b. Permasalahan bidang sosial ekonomi
 - Anak putus sekolah
 - Anak usia sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan dasar
 - Tingginya angka pengangguran
 - Gizi buruk pada balita
 - Warga miskin yang menempati rumah tdak layak huni

- Daya beli rendah
- Pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan

4.2.3.2 Kriteria Kemiskinan

- a. Jompo
 - Tidak mampu usaha atau bekerja keras
 - Sakit-sakitan
 - Usia 65 tahun keatas
 - Tidak ada yang menanggung biaya atau tidak ada yang mengurus
- b. Pekerjaan tidak tetap
 - Tidak punya keahlian
 - PHK
 - Tidak punya modal
 - 1 minggu kerja 1 bulan menganggur
 - Pendidikan rendah
 - Pendapatan rata-rata Rp.40.000
- c. Usaha kecil
 - Modal minim : Ro. 100.000 s/d Rp. 1.000.000
 - Jenis usaha : pedagang gorengan, sayur, baso, lontong, warung kecil, hme industry, buruh tani, dll
- d. Anak yatim
 - Tidak ada yang mengurus
 - Usia 15 tahun kebawah
 - Jauh dari keluarga
- e. Pendidikan rendah
 - Tidak sekolah s/d tamat SMP
- f. Cacat fisik
 - Tuna netra
 - Tuna rungu

- Lumpuh
 - Cacat kaki
 - Cacat tangan
 - Stress
 - Tidak ada yang menanggung biaya atau tidak ada yang mengurus
- g. Lingkungan tidak sehat
- Tidak ada MCK (Mandi, Cuci dan Kakus)
 - Tidak ada TPA (Tempat Pembuangan Sampah)
 - Mandi cuci di kolam atau sungai
 - Buang air besar di sungai atau kolam
 - Membuang sampah sembarangan
- h. Kondisi Rumah
- Dinding semi permanen (setengah bilik setengah tembok)
 - Lantai masih tanah
 - Tidak adanya ventilasi udara
 - Atap rumah sudah bocor atau lapuk

4.2.4 Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara yang merupakan indikator kemiskinan yang disebabkan oleh beberapa kondisi yang terjadi di tengah masyarakat adalah :

4.2.4.1 Permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana

- Jalan lingkungan rusak yang mengakibatkan pengguna jalan tidak nyaman dan berbahaya, akses ekonomi warga tidak lancar seperti ojeg, pedagang yang menggunakan gerobak (dorongan) dan pengguna jalan pada umumnya.
- Jalan jadi cepat rusak dan banjir di jalan dikarenakan selauran air, senderan dan gorong-gorong tidak ada dan tidak berfungsi.

- Lingkungan tidak sehat dikarenakan buang sampah sembarangan, masih banyak warga yang tidak memiliki sumur, kegiatan mencuci dan mandi masih di kolom warga yang airnya tidak bersih, saluran air kotor yang tidak baik dan gang lingkungan yang becek dan licin diwaktu musim hujan dan berdebu di waktu kemarau.
- Masih banyak rumah warga yang tidak memiliki pentilasi udara, lantai tanah, atap bocor, tidak memiliki bak mandi dan mau roboh.

4.2.4.2 Permasalahan Bidang Pendidikan

- Biaya sekolah mahal (baju sekolah, sepatu, tas, buku-buku, uang jajan sekolah, ongkos ke sekolah).
- Jauhnya akses untuk pendidikan anak usia dini.
- Biaya kursus mahal dan jarak tempatnya jauh.
- Pandangan masyarakat pendidikan bukan menjadi kebutuhan hidup.

4.2.4.3 Permasalahan Bidang Ekonomi

- Tidak punya koneksi/akses pemasaran kurang.
- Sulitnya mendapatkan bantuan modal usaha.
- Banyaknya syarat untuk mendapatkan modal usaha.
- Banyak warga yang terjerat oleh rentenir.

4.2.4.4 Permasalahan Bidang Kesehatan

- Masih kurang sadarnya membawa balita ke posyandu.
- Masih kurang sadarnya memeriksakan kandungan ibu hamil ke bidan dengan alasan biaya.
- Adanya sebagian warga yang tidak mampu berobat ke dokter atau rumah sakit.
- Posyandu di tingkat RW belum aktif seluruhnya.
- Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan.

4.2.5 Organisasi, Visi, Misi dan Tujuan PNPM -MP Kelurahan Kaliabang Tengah

4.2.5.1 Organisasi

- Nama : **“LKM Kaliabang Sejahtera”**
- Alamat : Jl. Pondok Ungu Permai No.1 Bekasi Utara
Kodya Bekasi Tlp. (021) 8882575
- Notaris : Elok Kurniati, SH.
- Tanggal : 30 Juni 2010

4.2.5.2 Visi

Sebagai organisasi publik dimana LKM merupakan milik para anggota perlu memiliki visi yang jelas, tepat, mudah dipahami. Berangkat dari kenyataan itu maka yang menjadi **Visi LKM Kaliabang Tengah** adalah: *“Terwujudnya masyarakat madani yang mau, mandiri dan sejahtera, dalam lingkungan yang sehat, produktif dan lestari.”*

4.2.5.3 Misi

LKM Kaliabang Tengah adalah membangun masyarakat mandiri melalui penguatan Kapital sosial dengan menumbuhkan kembali prinsip-prinsip kemasyarakatan, nilai-nilai kemanusiaan dan menggalang solidaritas serta kesatuan sosial sesama warga, serta mampu menanggulangi kemiskinan secara efektif, dan mampu mewujudkan suatu kondisi lingkungan yang sehat, produktif dan lestari di Kelurahan Kaliabang Tengah.

4.2.5.4 Pemberdayaan

a. Proses Pembentukan LKM

LKM Kaliabang Sejahtera pertama kali dibentuk melalui Rembug Pembentukan LKM pada Tanggal 13 Juni 2010 yang dihadiri oleh 56 orang. Dari 75 calon perwakilan dari 21 Rw terpilih 11 orang anggota LKM (8 orang laki-laki dan 3 orang perempuan).

Tabel 4.7 Nama-nama Anggota LKM Terpilih Masa Bakti 2010 -2013

NO	NAMA	L/P	USIA	PEKERJAAN	POSISI
1	Suyatno	L		Kary. Swasta	Koord. Pimpinan Kolektif
2	Tahapan Bambang Sutopo SH.	L		Pengacara	Pimpinan Kolektif
3	H. Setiawan	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
4	Abdul Rosyad	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
5	Ahmad Azie	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
6	Mahyani	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
7	Nurhadi	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
8	Danang Wijaya	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
9	Rini Wijayanti	P		IRT	Pimpinan Kolektif
10	Pardiyanti	P		IRT	Pimpinan Kolektif
11	Dra. Afrina Sari	P		Dosen	Pimpinan Kolektif

b. Program (Tidaya)

1. Lingkungan (Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dan kesehatan)
2. Ekonomi (Pinjaman bergulir)
3. Sosial (Pelatihan, penyuluhan dan santunan)

1. Kegiatan Infrastruktur

Tabel 4.8 Kegiatan Infrastruktur di Kelurahan Kaliabang Tengah

Kegiatan		Putaran I	Putaran II	Putaran III
Infrastruktur	:	Rp. 312.800.000,-	Rp. 152.500.000,-	Rp. 76.000.000,-

2. Kegiatan Ekonomi Bergulir

Tabel 4.9 Kegiatan Ekonomi di Kelurahan Kaliabang Tengah

Kegiatan		Putaran I	Putaran II	Putaran III
Ekonomi	:	Rp.-	Rp.-	Rp.-

3. Kegiatan Sosial

Tabel 4.10 Kegiatan Sosial di Kelurahan Kaliabag Tengah

Kegiatan		Putaran I	Putaran II	Putaran III
Sosial	:	Rp. 27.200.000,-	Rp.-	Rp.-

4. Kegiatan Kemitraan BKM dengan Pihak Lain

Tabel 4.11 Kegiatan Kemitraan BKM dengan Pihak Lain

No	Nama Instansi/ Lembaga	Kegiatan (Bentuk Kerjasama)	Jumlah Dana	Pemanfaat
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

4.2.5.5 Kegiatan Pokok

1. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan.
2. Tempat pembuangan sampah akhir.
3. Pembangunan posyandu.
4. Perbaikan kondisi rumah yang tidak layak huni.
5. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan.
6. Pelaksanaan penyuluhan terhadap warga tentang lingkungan yang sehat.
7. Meningkatkan tingkat pendidikan warga melalui pemberian beasiswa serta mengadakan kejar paket A dan B dengan membentuk Kelompok Belajar Masyarakat (KBM).
8. Pelaksanaan kegiatan simpan pinjam atau dana bergulir.

9. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga miskin melalui pemberian pengobatan gratis dan mengadakan penyuluhan tentang penyakit menular.
10. Peningkatan gizi balita melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan penyuluhan tentang gizi balita.

4.2.5.6 Target Yang Akan Dicapai

1. Meningkatkan taraf kesehatan warga miskin sampai 75%.
2. Menurunkan gizi buruk balita, reproduksi, ibu hamil dan menyusui sampai 75%.
3. Meningkatkan kesehatan lingkungan warga miskin sampai dengan 75%.
4. Menumbuhkan rasa kepedulian terhadap jompo, cacat dan meninggal dunia.
5. Menuntaskan program Wajar Diknas 9 tahun sampai dengan 80%.
6. Mengurangi angka buta aksara/huruf warga miskin sampai dengan 80%.
7. Menurunkan angka buta ketrampilan sampai dengan 80%.
8. Meningkatkan penghasilan pedagang kecil dan UKM bagi warga miskin sampai dengan 75%.
9. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana lingkungan yang lebih baik sampai dengan 75%.
10. Meningkatkan taraf dan pola hidup sehat serta keamanan warga miskin sampai dengan 75%.

BAB 5

Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dengan Penggunaan CLEAR Model Di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi

Pemerintah terus berupaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah sebagai program rencana kerja pemerintah pada tahun 2012 dengan tema “Percepatan dan Perluasan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Kebijakan pembangunan nasional yang dibuat mengarahkan pada kebijakan *Pro-Growth*, *Pro-Poor*, *Pro-Job* dan *Pro-Environment* yang diharapkan menurunkan tingkat kemiskinan melalui kebijakan 4 (kluster) penanggulangan kemiskinan (Menko Kesra, 2011). Salah satu kluster tersebut adalah kebijakan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, PNPM Mandiri merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan perubahan kondisi yang lebih baik melalui pemberdayaan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang mandiri dengan cara meningkatkan partisipasi menanggulangi kemiskinan bersama-sama dengan pemerintah.

PNPM Mandiri diluncurkan pada tahun 2007 yang terdiri dari PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri wilayah khusus dan daerah tertinggal. Di perkotaan tidaklah terlepas dari masalah kemiskinan yang salah satunya juga merupakan dampak dari adanya urbanisasi. Selain itu, Pemerintah Daerah cenderung melakukan pembangunan hanya di Pusat Kota sebagai cerminan kota bagi warga pendatang. Kondisi lingkungan yang berada jauh dari Pusat Kota terutama di daerah pinggiran masih sangat mengkhawatirkan karena kemiskinan masih berlangsung di daerah pinggiran. Kehadiran PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan kelanjutan program P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) diharapkan dapat mengurangi permasalahan kemiskinan di perkotaan

terutama untuk kelurahan-kelurahan yang berada jauh dari Pusat Kota dan menyebabkan ketidak merataan pembangunan di perkotaan.

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program yang mengusung partisipasi masyarakat, karena untuk memberdayakan masyarakat dibutuhkan partisipasi. Apabila tidak ada partisipasi maka siapa yang akan diberdayakan dan siapa nanti yang menjalankan program PNPM Mandiri Perkotaan. Masyarakat diajarkan untuk tidak lagi pasif dan apatis dalam membangun hidupnya untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui partisipasi, karena masyarakat itu sendiri yang mengetahui apa yang dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan di daerahnya dan menyumbangkan solusi yang bermanfaat bagi pembangunan. Kemiskinan dan partisipasi menjadi dua hal yang sangat erat kaitannya. Menurut Kartasmita (dalam Setiana,2005:6), "Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan".

Di Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara menjadi Kecamatan yang paling padat penduduknya dibandingkan dengan Kecamatan-kecamatan lain di Kota Bekasi (BPS Bekasi, 2010). Penyebaran tertinggi di Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 13,65% (284.547 jiwa), Bekasi Barat 11,61% (242.042 jiwa), Pondokgede 11,30% (235.579 jiwa) dan terendah di Kecamatan Jatisampurna sebesar 3,75% (78.080 jiwa). Banyaknya penduduk di kecamatan Bekasi dapat dilihat apakah berbanding lurus dengan partisipasi dalam pembangunan yang digerakkan melalui program PNPM Mandiri Perkotaan. Kehadiran PNPM Mandiri Perkotaan ini diharapkan dapat mengakomodir penduduk Kecamatan Bekasi Utara dengan banyaknya penduduk di Kota Bekasi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain untuk aktif dalam program PNPM Mandiri Perkotaan dan dapat melakukan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Kecamatan Bekasi Utara terutama dalam mengatasi kemiskinan.

Partisipasi Kelurahan Kaliabang Tengah dalam PNPM Mandiri Perkotaan mencapai partisipasi terendah di tahun 2011 dibandingkan dengan kelurahan lain di Kecamatan Bekasi Utara:

Tabel 5.1 Capaian Partisipasi Kecamatan Bekasi Utara 2011

No	Kelurahan	Dewasa	%Dewasa	% Miskin	%Perempuan
1	MARGA MULYA	11,346	28.7%	17.4%	38.7%
2	HARAPAN BARU	14,306	3.2%	25.0%	33.6%
3	KALIABANG TENGAH	49,957	1.5%	18.8%	32.3%
4	PERWIRA	23,316	4.5%	25.2%	31.3%
5	HARAPAN JAYA	53,795	2.3%	25.6%	30.6%
6	TELUK PUCUNG	30,434	2.5%	15.4%	28.9%

Sumber: Data Sistem Informasi Manajemen Korkot Kota Bekasi

Pencapaian partisipasi yang terserap di Kelurahan Kaliabang Tengah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dari keseluruhan penduduk dewasa sebanyak 49.975 hanya 1.5% yang terserap dan tercatat dalam PAD (Participatory Apprecial Document) Koorkot (Koordinator Kota) PNPM Mandiri Perkotaan. Serapan penduduk dewasa yang hanya terserap 1.5% sudah termasuk partisipasi masyarakat miskin dan perempuan yang menjadi sasaran utama PNPM Mandiri Perkotaan. Partisipasi miskin di Kelurahan Kaliabang Tengah sebesar 18.8% terhadap partisipasi dewasa. Secara angka absolut partisipasi penduduk miskin yang ikut dalam kegiatan PNPM Mandiri hanya sebanyak 140 penduduk miskin ($18.8\% \times 749$) termasuk di dalamnya partisipasi perempuan yang hanya sebanyak 45 perempuan tergolong miskin saja yang terlibat di dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kaliabang Tengah. Sementara keterlibatan masyarakat yang diharapkan dalam mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebesar 30% dari jumlah penduduk dewasa. Hal ini yang diutarakan oleh Fasilitator Kelurahan (Faskel) Bekasi Utara :

“... dan lumayan tinggi target yang ditetapkan oleh si pendonor dalam hal ini IDB (Islamic Development Bank) itu 30%-40% warga.”(Bapak Fajar, Juni 2012)

Partisipasi yang hanya terserap 1.5% dari 30% yang diharapkan sangat jauh jaraknya, meskipun di Kecamatan Bekasi Utara belum ada yang dapat mencapai angka 30% dalam hal partisipasi yang diharapkan pendonor bantuan PNPM Mandiri Perkotaan. Apabila dibandingkan secara keseluruhan dengan kondisi semua kelurahan yang belum dapat mencapai 30% partisipasi masyarakat seperti yang diharapkan oleh pendonor, apa yang dicapai Kelurahan Kaliabang Tengan masih menjadi paling rendah di antara kelurahan lain di Kecamatan Bekasi Utara. Perbedaan pencapaian partisipasi yang berbeda antar kelurahan di Bekasi Utara dan pencapaian terendah dalam hal partisipasi oleh Kelurahan Kaliabang Tengah, maka untuk mengidentifikasi apa yang menyebabkan ketidaksamaan respon warga Kelurahan Kaliabang Tengah terhadap PNPM Mandiri Perkotaan terutama dalam hal partisipasi, peneliti menggunakan model partisipasi CLEAR yang ditawarkan Pratchett, Stocker dan Lowndes (2004) untuk mengidentifikasi lima faktor yang menyebabkan ketidaksamaan respon warga terhadap partisipasi. Model CLEAR berpendapat bahwa partisipasi akan sangat efektif dimana masyarakat (Karianga, 2011:233):

6. *Can Do* – have the resources and knowledge to participate;
7. *Like to* – have a sense of attachment that reinforces participation;
8. *Enable to* – are provided with the opportunity for participation;
9. *Asked to* – are mobilized through public agencies and civic channels;
10. *Responded to* – see evidence that their views have been considered.

Model CLEAR ini dimaksudkan sebagai evaluasi refleksi kegiatan yang berlangsung dengan menunjukkan faktor mana dari kelima faktor tersebut yang diterapkan kemudian faktor mana yang belum mendapat cukup perhatian dan bagaimana hubungan antara kelima faktor tersebut dapat ditingkatkan dalam mengembangkan respon yang lebih strategis atas tantangan partisipasi masyarakat. Apakah mengubah konteks harus dilakukan pemerintah daerah memprioritaskan ulang terhadap faktor-faktor yang berbeda (Lowndes, Prachett and Stocker,2009:9).

1. *Can do*

Sebagian besar merujuk pada argumen mengenai status sosial dan ekonomi sangat berpengaruh terhadap partisipasi. Seseorang yang memiliki keterampilan yang sesuai dan sumber daya, adalah mereka yang lebih dapat mengambil bagian untuk berpartisipasi. Keterampilan ini berkisar pada kemampuan dan kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum atau menulis surat sampai pada kemampuan mengatur kegiatan dan aktifitas menulis surat juga kegiatan yang penting. Keterampilan dan sumber daya lebih sering ditemukan pada orang-orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan pekerja yang status sosial ekonominya juga tinggi. Tetapi, tidak satupun keterampilan dan sumber daya harus berasal dari orang yang memiliki status sosial dan ekonominya tinggi. Hal tersebut juga dimungkinkan untuk umum, relawan ataupun komunitas untuk menembus keterbatasan status sosial ekonomi yang dimiliki untuk berpartisipasi. “*Can do*” dapat disampaikan sebagai upaya peningkatan kemampuan yang ditujukan bahwa masyarakat juga diberi dukungan untuk meningkatkan keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan mereka untuk terlibat.

Keterampilan dan sumber daya yang dimiliki seseorang memang lebih dapat mengambil bagian untuk berpartisipasi, ini pun yang terjadi di Kelurahan Kaliabang Tengah dalam partisipasi PNPM Mandiri Perkotaan. Kesemua informan yang ditemui di lapangan dan diwawancarai adalah informan yang memang sudah memiliki kemampuan organisasi dan pernah menjabat suatu jabatan tertentu ataupun pernah terlibat dalam kegiatan masyarakat. Jabatan yang pernah dipegang dan keterlibatan dalam masyarakat bahkan masih tetap dijalankan bersamaan dengan jabatan yang diterima di dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Hal tersebut yang dinyatakan oleh Bapak Suyatno, koordinator Pimkol BKM Kelurahan Kaliabang Tengah yang juga menjabat sebagai ketua RW di wilayahnya:

“Kalau secara persyaratan, tentang pengalaman organisasi ya, karena kalau ‘blank’ tentang organisasi pas masuk ke situ mau lakuin apa nanti juga bingung kan, gitu. Rata-rata yang ikut di kelurahan ini memang yang

sudah ikut organisasi, karena dia dengan kegiatan kemasyarakatan dengan lingkungan.”(Suyatno: Koordinator Pimkol, Juni 2012)

Tidak tertutup pula bagi siapapun masyarakat yang ingin terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan, walaupun tidak memiliki pengalaman organisasi yang terpenting adalah rasa kepedulian. Hal ini diutarakan oleh Bapak Hidri selaku Sekretaris BKM Kaliabang Tengah.

“Semua boleh, cuma pada saat mereka waktu sosialisasi pertama di situlah kita lihat faskel memberikan informasi PNPM ini seperti begini akhirnya apa yang disampaikan ya mereka tergerak ingin bergabung adalah orang yang punya kepedulian.”(Hidri: Sekretaris BKM, Mei 2012)

Meskipun tidak menutup kemungkinan semua orang juga diperbolehkan ikut berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan, tetapi kesempatan bagi orang-orang yang belum pernah berorganisasi dan belum pernah terlibat dalam kegiatan di masyarakat tetapi memiliki kepedulian juga harus dapat dimobilisasi. Selain itu juga untuk mengurangi tingkat kejenuhan masyarakat terhadap pengurus setiap program yang mengelola adalah orang-orang yang sama meskipun kepercayaan masyarakat tinggi terhadap orang tersebut. Dalam suatu organisasi re-generasi sangat diperlukan untuk dapat lebih berkembang dengan ide-ide yang lebih baru. Kemampuan dan sumber daya dapat dibentuk asalkan mereka yang baru bergabung memiliki niat tulus dan kepedulian.

Kemampuan organisasi yang dimiliki baik itu pengurus BKM dan KSM lebih mudah beradaptasi dengan orang baru dan kegiatan baru sehingga mudah mengatur kegiatan dengan wawasan berorganisasi yang dimilikinya. Selain itu orang yang sudah dikenal masyarakat dan dipercaya masyarakat dapat memudahkan pelaksanaan program sehingga nantinya orang-orang yang sudah dipercaya masyarakat diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat untuk mau ikut berpartisipasi. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Bapak Fajar Maulana selaku Faskel Tim 2 (Kecamatan Bekasi Utara):

“iya betul, kita cari tokoh kunci yang kita pernah dapet dari strategi pelatihan-pelatihan itu. Pertama kita harus kenal budaya setempat ya kan, yang kedua kita cari tokoh kunci, kita enggak mungkin cari orang yang enggak punya pengaruh kita jadikan relawan ya kan. Dia juga bikin undangan buat orang yang sebenarnya enggak dipercaya gitu. Nah..nah yang bikin kendala ketika tokoh kunci tersebut punya permasalahan dengan program ini gitu, jadi ketika kita dateng bukannya motivator malah demotivator, pokoknya jangan ada ini-ini yah agak sulit seperti itu.”(Fajar Maulana: Faskel, Juni 2012)

Kemampuan organisasi tidak selalu menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang dapat terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Pengalaman dan kepercayaan juga dapat menjadi kesempatan seseorang untuk berpartisipasi. Jenjang pendidikan bukanlah hal utama yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Kelurahan Kaliabang Tengah, dalam pemilihan pengurus BKM melalui “pemilu” tidak membatasi siapa yang mau ikut berpartisipasi. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Ahmad Azie:

“Saya pikir enggak ada ya, karena kita sendiri dipilih secara langsung oleh pengurus RW melalui rembug warga, makanya SDM kita juga ada yang sudah S2, S3 bahkan ada yang cuma tamatan SMA, jadi enggak ada kriteria karena yang penting itu prinsipnya mau bekerja sosial.” (Ahmad Azie: Pimkol, Juni 2012)

Tabel 5.2. Nama-nama Pimpinan Kolektif BKM Kaliabang Tengah

NO	NAMA	L/P	USIA	PEKERJAAN	POSISI
1	Suyatno	L		Kary. Swasta	Koord. Pimpinan Kolektif
2	T. Bambang Sutopo SH.	L		Pengacara	Pimpinan Kolektif
3	H. Setiawan	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
4	Abdul Rosyad	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
5	Ahmad Azie	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
6	Mahyani	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
7	Nurhadi	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
8	Danang Wijaya	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
9	Rini Wijayanti	P		IRT	Pimpinan Kolektif
10	Pardiyanti	P		IRT	Pimpinan Kolektif
11	Dra. Afrina Sari	P		Dosen	Pimpinan Kolektif

Jajaran pimpinan kolektif di BKM Kelurahan Kaliabang Tengah, seperti yang diungkapkan Bapak Ahmad Azie selaku Pimpinan Kolektif menyatakan beberapa Pimpinan Kolektif merupakan lulusan S2, S3 bahkan yang hanya tamatan SMA. Untuk tamatan S1 Bapak Bambang Sutopo merupakan tamatan sarjana hukum, sementara lulusan S3 Ibu Afrina yang saat menjadi dosen pengajar di salah satu universitas swasta di Kota Bekasi.

Tabel penduduk Kelurahan Kaliabang Tengah menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan untuk lulusan SLTA menjadi tamatan yang paling banyak. Lulusan S2 dan S3 tidak terdata kemungkinan karena jumlah yang sedikit. Sehingga kualitas SDM di Kelurahan Kaliabang Tengah mayoritas memang ada yang hanya dapat tamat sampai tingkat SLTA. Setinggi apapun gelar yang dicapai apabila tidak ada keinginan untuk berpartisipasi dan tidak memiliki kemampuan dalam hal berorganisasi maka partisipasi yang ideal juga tidak dapat terpenuhi.

Tabel 5.3. Jumlah Penduduk Kelurahan Kaliabang Tengah menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat Pendidikan (Sederajat)	2011
TK	1.065
SD	7.447
SLTP	7.960
SLTA	27.215
D3	3.152
S1	945

Kecakapan organisasi dan pengalaman pernah terlibat di masyarakat juga didukung dengan kemampuan lain untuk memaksimalkan partisipasi. Kemampuan tersebut tidak hanya tentang kemampuan berpikir ataupun bekerja, melainkan juga kemampuan lain seperti kemampuan finansial ataupun kemampuan menyediakan waktu. Kemampuan menyediakan dana sepenuhnya dibutuhkan, karena PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program bantuan yang mengedepankan swadaya dari masyarakat. Apabila bantuan itu sepenuhnya diberikan kepada masyarakat, masyarakat tidak mau merawat ataupun memelihara apa yang sudah diberikan

Pemerintah. Namun, lain halnya bila ada swadaya dari masyarakat tentunya apa yang telah diberikan Pemerintah masyarakat ikut bertanggung jawab memelihara dan merawat karena terdapat swadaya dari masyarakat juga yang disumbangkan. Kemampuan dana untuk berswadaya ini ditujukan untuk KSM karena sebagai sasaran PNPM Mandiri Perkotaan penerima manfaat BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), masyarakat harus memiliki dana sebagai swadaya sebesar 30% dari kebutuhan 100%.

“..., sangat membantu karena kita kan di kasih dana 70%, 30% dari swadaya.”(Sholeh: KSM, Juni 2012)

Kemampuan ketersediaan dana dalam hal partisipasi di Kelurahan Kaliabang Tengah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan banyak ditemui kendala terutama dalam hal swadaya yang biasanya dirasakan oleh KSM. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Sugito Ketua KSM Bunga Matahari:

Kalo kondisi lingkungan penduduk asli kendala memang. Kita ajak, yah disini mah gak ada, kumpulan ya kumpulan aja tapi kalo masalah pendanaan mereka berat karena kan program ini harus ada 30%-nya.”(Sugito: KSM, Juni 2012)

Mengenai kendala dalam swadaya sama diutarakan oleh Bapak H. Sholeh Ketua KSM Ceria dan dibenarkan oleh Ibu Rini selaku Pimkol BKM Kaliabang Tengah:

“Ya itu swadaya 30% itu tapi macet, ada sih yang sumbang-sumbang. Tenaga ada. Tapi ya dia juga itu kita punya saluran lancar, tadinya genang gak ngalir”(Sholeh: KSM, Juni 2012)

“...,Nah sosialisasinya yang penting itu, dulu mah susah pada bilang wah ini dapetnya dari mana 30% ini ga sanggup ngumpulin tapi kita pelan-pelan kasih tau kalo swadaya ga selalu finansial, jadi seperti itu. Jadi kita yang dipercaya harus bisa sampein juga ini loh maksud pemerintah...”(Rini: Pimkol, Juni 2012)

KSM yang menaungi warga miskin di wilayahnya sering kali mendapati kendala dalam hal swadaya, hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena diharapkan

PNPM Mandiri Perkotaan yang diharapkan dapat membantu objek sasarannya. Ditemui di lapangan pada saat wawancara, Kelurahan Kaliabang Tengah dalam program ekonomi bergulir mengalami ganjalan seperti apa yang diutarakan Bapak Irwan Ketua KSM Cendana:

“Memang disini untuk bidang ekonomi itu kita belum dapet sama sekali, karena memang periode yang lalu bermasalah dan sampai sekarang belum ada penyelesaian. Kita memang ekonomi sedang vakum, tapi di bidang infrastruktur kita masih bagus.”(Irwan, Juni 2012)

Dilihat dari laporan keuangan yang di kutip dari profil BKM Kaliabang Tengah, penggunaan anggaran bantuan yang dikelola pengurus lama dari bantuan yang diperoleh dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai, sehingga terindikasi pengelolaan kepengurusan pada periode pertama mengalami permasalahan.

”LKM Kaliabang Sejahtera Kelurahan Kaliabang Tengah pada saat ini adalah BKM untuk kepengurusan tahun 2011-2014. Sejak tahun 2008-2011, LKM Kaliabang Sejahtera telah mendapatkan amanah berupa dana BLM sebesar total Rp. 590.000.000 yang berasal dari dana BLM Pusat (APBN) sebesar Rp. 415.000.000 dan dari BLM Daerah (APBD) kota Bekasi sebesar Rp. 175.000.000. Alokasi dana tersebut digunakan sebesar Rp. 20.000.000 untuk BOP BKM, sebesar Rp. 541.000.000 untuk kegiatan di masyarakat yang terserap melalui 18 KSM infrastruktur yang kegiatannya berupa pembuatan jalan lingkungan (Paving Blok dan Cor Beton), pembuatan saluran air dan perbaikan rumah tidak layak huni. Sedangkan untuk kegiatan sosial disalurkan melalui 2 KSM yang menyalurkan dana kegiatan sosial melalui kegiatan bantuan pengadaan peralatan posyandu dan pelatihan tata boga.” (lihat lampiran 3)

Bantuan yang diterima pada tahun pertama sejak kepengurusan yang lama, total penerimaan bantuan pada mulanya di Kelurahan Kaliabang Tengah sebesar Rp.1.180.000.000,- (penjumlahan dari bantuan BLM Pusat, APBN dan APBD Kota Bekasi). Jumlah alokasi yang sangat besar mencapai milyaran rupiah ini tidak sebanding dengan pengeluaran dan penggunaannya yang hanya sebesar Rp. 619.000.000 yang hanya diserap oleh 18 KSM untuk kegiatan lingkungan dan 2 KSM untuk kegiatan sosial. Alokasi sebesar Rp.591.000.000 yang digunakan untuk kegiatan ekonomi pada saat di gulirkan tidak ada pengembalian dan tidak diketahui

keberadaannya menjadikan kegiatan ekonomi di Kelurahan Kaliabang Tengah mengalami pemberhentian, dengan jumlah sebesar itu seharusnya penggunaannya menjadi maksimal untuk kebutuhan masyarakat. KSM-KSM di Kelurahan Kaliabang Tengah dapat menyerap bantuan yang hampir mendekati angka 600 juta, namun karena pengembalian yang tidak tertib menyebabkan kegiatan ekonomi pun dihentikan dahulu. Kegiatan ekonomi di Kelurahan Kaliabang Tengah bisa dikembalikan dengan cara, adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengembalian. Namun, kesadaran yang pernah meminjam belum ada sehingga kepercayaan pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi Kelurahan Kaliabang Tengah untuk dipercaya digulirkan kembali kegiatan ekonomi juga belum ada. Meskipun yang mau mengembalikan hanya 4-5 orang saja setidaknya masih ada kesadaran dari masyarakat untuk dapat di upayakan kembali melalui *rescheduling*, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Fajar selaku Faskel Tim 2 (Kecamatan Bekasi Utara).

“...kalo misalkan di dapat 4-5 orang yang sanggup bayar nah itu boleh dimunculkan. Mereka sadar kalo hutang adalah hutang gitu, walaupun ini uang pemerintah. misal dulu saya pinjem satu juta oke saya cicil 50 ribu pokoknya itu dulu diluar bunga yang penting dibalikin itu dapat dimunculkan re-payment rate atau tingkat pengembalian masyarakat. Danggapnya ada kesadaran masyarakat mengembalikan dana, jadi kepercayaan pemerintah ada lagi jadi ‘kran’ bantuannya dibuka lagi boleh ada dana lagi digulirkan jadi ga ada istilah penalti yang dikunci selama-lamanya. Ada prosedurnya namanya rescheduling dulu mau ngembalian lalu dinilai nah itu bagus. Jadi bisa diadakan ekonomi bergulir asalkan masyarakat sadar akan pengembalian...itu aja dulu dibuktikan” (Fajar Maulana: Faskel, Juni 2012).

Tidak ada pengembalian yang tertib pada saat kegiatan ekonomi masih berjalan di awal kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kaliabang Tengah disebabkan kemunculan PNPM Mandiri pada saat itu berbarengan dengan munculnya program BLT (Bantuan Langsung Tunai). Sehingga masyarakat menganggap saat bantuan PNPM Mandiri Perkotaan merupakan bantuan seperti halnya BLT yang sifatnya hibah menyebabkan pengembalian bantuan tersebut tidak berjalan. Apabila sosialisasi yang dilakukan dipahami masyarakat, pengembalian yang tidak tertib

dapat dihindarkan dan diperlukan ketegasan pengurus BKM pada saat itu. Masih yang diutarakan oleh Bapak Fajar selaku faskel;

“...Jadi mungkin kenapa bisa kejadian begini waktu itu PNPM keluaranya berbarengan dengan BLT waktu itu, jadi mungkin masyarakat berpikirnya sama dengan BLT. Ya mungkin salah pemerintah juga kali mengeluarkan program momennya enggak pas. Jadi berpikirnya ‘kok yang onoh bayar yang ini dikembaliin kan sama-sama dari pemerintah..’ itu pada mikirnya gitu...”
(Fajar Maulana: Faskel, Juni 2004)

Tidak berjalannya kegiatan ekonomi bergulir di Kelurahan Kaliabang tengah, menjadikan Kelurahan Kaliabang Tengah memfokuskan pada kegiatan infrastruktur dan sosial. Tidak hanya di Kelurahan Kaliabang Tengah saja, memang untuk di Kota Bekasi pendonor yaitu IDB (*Islamic Development Bank*) menyarankan bantuan dialihkan untuk pembangunan fisik yang hasilnya nyata di lapangan hal ini diutarakan oleh Bapak Fajar selaku Fasilitator Kelurahan pada saat perbincangan di luar wawancara. Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Bapak Irwan:

“Ya sementara infrastruktur, 95% infrastruktur, 5% sosial seperti pelatihan untuk ibu-ibu untuk meningkatkan mereka punya kelebihan lah atau taro 10% lah karena selama ini baru satu kali dana bergulir untuk mereka dan itu cukup besar. Kalo mbak liat keluar (menunjuk ruangan sebelah ruangan wawancara) disitu ada oven itu dari sosial dibeli untuk pelatihan.” (Irwan: KSM, Juni 2012)

Kondisi di Lapangan dalam hal lingkungan di Kaliabang Tengah memang masih banyak perlu mendapat perhatian dari PNPM Mandiri Perkotaan, kondisi ini lingkungan di Kelurahan Kaliabang Tengah dapat dilihat pada foto-foto dibawah ini seperti saluran air yang mampet dan dipenuhi sampah lalu jalan rusak dan rumah tidak layak huni. Kondisi lingkungan di Kelurahan Kalibanag Tengah tidak hanya terkama dari dokumentasi faskel, tetapi pada saat peneliti turun lapangan juga mendapati kondisi lingkungan di Kelurahan Kaliabang yang masih memprihatinkan (lihat lampiran 8). Jadi, tidak mengherankan pula mengapa fokus kerja BKM Kaliabang Tengah merupakan kegiatan lingkungan dalam hal memperbaiki kondisi lingkungan yang perlu dibenahi.

Gambar 5.1 Foto Saluran air yang dipenuhi sampah



Sumber: Dokumentasi Faskel Tim 2 (Kecamatan Bekasi Utara)

Gambar 5.2 Foto Kondisi Jalan Rusak



Sumber: Dokumentasi Faskel Tim 2 (Kecamatan Bekasi Utara)

Gambar 5.3 Foto Kondisi Rumah Tidak Layak Huni



Sumber: Dokumentasi Faskel Tim 2 (Kecamatan Bekasi Utara)

Fokus kegiatan Kelurahan Kaliabang Tengah terhadap kegiatan perbaikan fisik di lingkungan dapat di perhatikan dari laporan anggaran melalui kegiatan tridaya dalam tabel :

a. Kegiatan Infrastruktur

Tabel 5.4 Kegiatan Infrastruktur di Kelurahan Kaliabang Tengah

Kegiatan		Putaran I	Putaran II	Putaran III
Infrastruktur	:	Rp. 312.800.000,-	Rp. 152.500.000,-	Rp. 76.000.000,-

b. Kegiatan Ekonomi Bergulir

Tabel 5.5 Kegiatan Ekonomi di Kelurahan Kaliabang Tengah

Kegiatan		Putaran I	Putaran II	Putaran III
Ekonomi	:	Rp.-	Rp.-	Rp.-

c. Kegiatan Sosial

Tabel 5.6 Kegiatan Sosial di Kelurahan Kaliabang Tengah

Kegiatan		Putaran I	Putaran II	Putaran III
Sosial	:	Rp. 27.200.000,-	Rp.-	Rp.-

Ketiga tabel diatas menunjukkan Kelurahan Kaliabang Tengah lebih banyak melakukan kegiatan lingkungan, pernyataan bahwa ekonomi tidak bergulir di

Kelurahan Kaliabang Tengah benar bahwa tidak ada kegiatan ekonomi semenjak dimulai dari putaran I sampai pada putaran III. Begitu pula dengan kegiatan sosial yang hanya berlangsung pada putaran I untuk kegiatan pembangunan posyandu dan pembiayaan kegiatan pelatihan tata boga.

Kegiatan infrastruktur yang dilakukan diantaranya adalah Pembangunan fisik seperti Jalan Lingkungan, Saluran air, Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni), dan pembangunan fisik lainnya. Dalam kegiatan infrastruktur inilah swadaya 30% dari masyarakat diminta agar timbul rasa tanggung jawab dan memelihara dan merawat apa yang telah diberikan Pemerintah. Selain itu juga berdampak timbulnya rasa kebersamaan dan gotong-royong sesama lingkungan. Namun, hal ini menjadi kendala karena masyarakat miskin yang serba kekurangan menjadi tidak siap dan tidak mampu untuk berswadaya. Dalam pemenuhan swadaya 30%, masyarakat yang digolongkan miskin ini beranggapan untuk memenuhi kebutuhan sendiri masih sulit, apalagi harus menyumbang dalam hal swadaya yang hasilnya hanya untuk orang lain dan kepentingan umum yang dirasakan oleh semua orang seperti rutilahu, perbaikan jalan lingkungan dan saluran air. Sehingga bantuan ini nantinya akan dinikmati lingkungan yang siap akan swadaya seperti wilayah perumahan yang kemampuan finansialnya tercukupi. Kendala seperti dapat saja mengurangi partisipasi masyarakat miskin dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan terutama apa yang terjadi di Kelurahan Kaliabang Tengah, dimana tidak ada kegiatan ekonomi bergulir bagi masyarakat miskin dan ketidaksiapan swadaya 30% dalam kegiatan infrastruktur menyebabkan beberapa KSM tidak dapat mengakses bantuan dan berpartisipasi.

Sementara untuk BKM, kemampuan dana tidak menjadi hal yang penting, karena BKM dituntut niat tulus untuk berpartisipasi dan memiliki kepedulian terhadap penanggulangan masalah di masyarakat terutama masalah kemiskinan. Biaya operasional BKM tetap dibiayai oleh Pemerintah tapi itu tidaklah cukup menanggung mobilitas dan kegiatan BKM yang cukup banyak.

“Terus terang ada, kalo diitung secara logika itu BOP abis di minum dan itu aja, contoh misal BOP itu enggak tentu, tarolah dalam setahun 12 juta terus di bagi perbulan terus dibagi per hari berapa mbak? Nah itu paling habis di kopi sama potokopi,hahahahaha....” (Hidri, Juni 2012)

Kemampuan ketersediaan waktu juga menjadi kendala cukup besar terutama untuk perempuan untuk dapat aktif berpartisipasi. Kemampuan menyediakan waktu juga menjadi sangat penting ketika pendidikan yang tinggi yang dapat menghasilkan gagasan-gagasan yang bagus tidak didukung ketersediaan waktu dan kehadiran di setiap pertemuan ataupun rapat-rapat kepengurusan yang berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kaliabang Tengah. Di Kaliabang Tengah partisipasi perempuan terganjal dengan masalah waktu seperti masalah perijinan dari suami untuk keluar malam menghadiri rapat ataupun karena kesibukan perempuan di luar PNPM yang menyita waktu, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Rini dan Ibu Afrina:

“Kendalanya itu banyak sekali terutama suaminya ya kan kadang berpikir kayak gitu enggak ada penghasilannya tapi kita meyakini sama mereka kalo kita yang diutus pelatihan untuk kelurahan itu berjalan dengan baik dan bisa menyerap dengan baik,..” (Rini: KSM, Juni 2012)

“...,Kadang kita ketinggalan informasi, dia melakukan kegiatan bersebelas kadang di sahnkan hanya empat orang saja itu dianggap benar sebenarnya itu salah. Tapi ya karena alasan dari saya pribadi, ya karena saya sibuk. Saya biarkan saja saat semua itu untuk urusan membantu masyarakat ya biarkan saja, tetapi sebenarnya itu yang membuat jelek kinerjanya.” (Afrina, Pimkol, Juni 2012)

Kemampuan ketersediaan waktu tidak hanya di rasakan oleh perempuan saja tetapi juga oleh laki-laki, dimana beberapa pengurus BKM ataupun KSM adalah pekerja, walaupun pelaksanaan rapat setelah jam pulang kerja akan menghadapi kendala waktu bagi perempuan karena aturan izin keluar rumah dan apabila dilaksanakan pada hari libur mereka sudah tidak berada di rumah. Hal ini sama seperti apa yang diutarakan Bapak Irwan selaku Ketua KSM Cendana dan Pak Suyatno selaku Koordinator Pimkol:

“Mereka itu kan juga bekerja, jadi momentum-momentum mengumpulkan mereka pada saat sabtu dan minggu dan disitulah kita memanfaatkan waktu sebesar-besarnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, biar untuk mengurangi cost yang ada. Sebenarnya masyarakat di RW 10 memang kalau hari libur, kita anu itu tidak masalah...” (Irwan: KSM, Juni 2012)

“...kalo di perkotaan ini memang ya terutama lebih-lebih di perumahan itu ya rata-rata berangkat kerja kalo pulang rada-rada enggak tentu ya setiap hari kalo pun sabtu sama minggu udah enggak ada di rumah gitu ya ada acara keluarga...” (Suyatno: Koord. Pimkol, Juni 2012)

Banyaknya jumlah pekerja baik itu swasta ataupun PNS di Kelurahan Kaliabang Tengah terutama pekerja swasta menjadi perolehan teratas. Jumlah pekerja swasta di Kelurahan Kaliabang yang mendominasi menyebabkan keterlibatan para pekerja ini dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan menjadi berkurang. Aktifitas mereka yang sudah banyak dilakukan di kantor, maka dalam ketersediaan waktu untuk kegiatan bermasyarakat menjadi berkurang terutama pada malam hari dan hari libur yang dipakai untuk istirahat dan waktu untuk keluarga.

Tabel 5.7 Jumlah Penduduk Menurut Pada Pekerjaan

Lapangan Usaha	2011
Petani	25
Swasta	7.636
PNS	1.467
Pertukangan	95
Wiraswasta	1.090
Pemulung	38
Jasa	10.003

Jumlah pekerja swasta yang banyak ini menyebabkan mengapa partisipasi dewasa di Kelurahan Kaliabang Tengah tidak terserap sepenuhnya, sebagian atau beberapa pekerja swasta dapat meluangkan waktu tetapi lebih banyak yang tidak terserap dalam berpartisipasi di PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kaliabang Tengah.

2. *Like to*

Bersandar pada gagasan bahwa orang-orang menjadi bagian dari sesuatu yang dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi. Apabila seseorang merasa menjadi bagian dari sesuatu maka mereka akan mau terlibat. Tetapi jika ia merasa dikecualikan atau dengan perasaan tidak diterima, maka ia dapat memutuskan untuk tidak terlibat atau tidak berpartisipasi. Jika keterlibatan hanya untuk orang tua atau untuk pria yang menyebabkan ketidaknyaman dan memutuskan untuk tidak mau ikut terlibat. Rasa kepercayaan, koneksi dan jaringan yang dapat terhubung menjadi modal sosial untuk dapat berkerjasama secara efektif. Rasa kemasyarakatan dapat menjadi motivator yang kuat untuk berpartisipasi. Namun, mengingat banyaknya keragaman dalam masyarakat dan terdapatnya komunitas-komunitas apabila seseorang merasa tidak memiliki identitas dan memiliki perasaan menjadi orang luar dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi.

Perasaan menjadi bagian dari masyarakat ataupun perasaan menjadi bagian terhadap pelaksanaan program, dalam hal PNPM Mandiri Perkotaan juga diperlukan selain kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang dimiliki juga harus diikuti dengan perasaan bahwa mereka terlibat karena memiliki perasaan menjadi bagian dalam kemasyarakatan ataupun PNPM Mandiri. Merasa menjadi bagian dari PNPM Mandiri dapat dilihat bagaimana mereka yang memutuskan untuk terlibat menganggap penting PNPM Mandiri Perkotaan dan apa yang melatar belakangi mereka untuk terlibat. Sehingga dapat terlihat apa yang sebenarnya masyarakat harapkan dalam keterlibatan di PNPM Mandiri Perkotaan. Semua informan di Kaliabang Tengah menganggap PNPM Mandiri merupakan program penting bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Azie:

“Penting justru bahwa itu tadi membantu masyarakat melalui program-program yang sudah disediakan oleh PNPM.” (Ahmad Azie: Pimkol, Juni 2012)

Dan hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Irwan dari KSM Cendana yang menganggap keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan sangatlah penting:

“...,memang PNPM Mandiri ini ditujukan kesitu. Kedua rasa kegotong royongan di dalam masyarakat, karena apa? selama ini kan masyarakat kita kegotong royongan itu sudah hampir pudar. Timbulah pemerintah mengeluarkan PNPM Mandiri dengan ketentuan 70-30” (Irwan: KSM, Juni 2012)

Latar belakang dari semua informan yang terlibat dalam PNPM Mandiri bermacam-macam. Ada yang merasa dirinya terpanggil karena jiwa sosial yang dimiliki, ada pula yang mengikuti PNPM Mandiri karena diajak atau direkomendasikan seseorang dan setelah mengerti maksud dari PNPM Mandiri timbul rasa kemanusiaan untuk saling menolong. Salah satu yang merasa terpanggil mengikuti program karena jiwa sosial yang melekat salah satunya adalah Ahmad Azie salah satu Pimkol BKM Kaliabang Tengah:

“Ya itu tadi kebetulan jiwa saya sebelum ada di BKM sudah apa ya, kadang kalo melihat kendala di masyarakat pengennya terjun langsung. Jadi enggak mau cuma kasih usulan sama ide tapi ketika ada tawaran dari pengurus RW saya, itu saya terima dan kebetulan diadakan RWT disini pun saya ditunjuk menjadi Pimkol. Jadi gitu aja mau membantu masyarakat lah karena saya juga dari RW perkampungan mbak. Nah setiap hari juga kan saya melihat kendala yang ada disitu bagaimana caranya, seperti kasus itu tadi bagaimana kita meskipun sampai sekarang belum ada komitmen dengan BRI saya melihat pedagang-pedagang kecil disitu kan pedagang nasi uduk saya pikir mereka ini butuh bantuan namun bagaimana caranya sementara kalo kita ajukan dipinjaman regular mereka tidak punya agunan iya kan? Makanya kita menjaga pola komunikasi ke BRI bagaimana pinjaman di bawah lima juta tidak pakai agunan, jadi yang menjadi komitmen kita BKM gitu.”(Ahmad Azie: Pimkol, Juni 2012)

Lain halnya dengan Ibu Pardiyanti Pimkol BKM Kaliabang Tengah, yang sebelumnya dia memang sudah banyak terlibat dalam kegiatan di masyarakat dalam jabatan sebagai ketua Posyandu di wilayahnya, namun keterlibatannya dalam PNPM mandiri Perkotaan karena dirujuk temannya yang kebetulan salah satu pengurus BKM Kaliabang Tengah:

“Aku kan karena diajak juga ada kayak kegiatan ini sama Pak H, dijelasin dikit-dikit apa PNPM ya udah aku ikut aja mbak. Kalo mewakili perempuan kalo saya buat-buat gitu ya, misale’ mempraktekan masakan ya saya ada, tapi saya sendiri kadang-kadang oh gitu, tapi cuman kan kita tugasnya banyak juga ya, istilahnya kita udah tau ya di RW 30 itu. Kita udah tau yang penting kita dateng tahu caranya gitu yang penting kita nyemangatin aja. Ya waktu ada pelatihan bikin bakso itu saya dateng, tapi yang pelatihan pertama sama kedua saya enggak dateng. Istilahnya kan kita dianggep pimpinannya kan.” (Pardyanti: Pimkol, Juni 2012)

Begitu pula dengan terbentuknya KSM di Kelurahan Kaliabang Tengah, pembentukan KSM memang paling banyak terbentuk pada saat diberitahukan oleh BKM akan ada bantuan dari pemerintah yang akan turun. Pemberitahuan bantuan yang akan turun itulah yang membuat KSM-KSM di Kelurahan Kaliabang Tengah terbentuk dan kebanyakan sifatnya sementara, ada karena ada proyek bantuan pada saat itu, sebagaimana yang dikatakan Pak Sholeh Ketua KSM Ceria:

“Ya itu awalnya dari Alm. Pak S., salah satu orang yang aktif juga dalam kegiatan masyarakat. Alm. Waktu itu yang mengajukan segala urusan, jadi waktu itu saya ketuanya lalu ada pertemuan. Kemudian setelah itu terbentuk pengurus. iya karena ada program, tapi kita ikut sidang (baca: rapat atau pertemuan) juga di kelurahan.” (Sholeh, Juni 2012)

Tetapi ada pula yang secara inisiatif membentuk KSM karena problem sosial ataupun tuntutan lingkungan di wilayahnya, seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Rini:

“Penyampaiannya, contohnya disini jalanan disini banjir dan kita punya saluran air cuma satu secara otomatisnya sebelum kita mengajukan ke BKM itu kan masyarakat merasakan ini banjir pas ujan, terus bagaimana? Drainase, nah kita bentuk KSM dimana KSM ini kan kelompok Swadaya Masyarakat yang menginginkan perubahan kita mempengaruhi gampang sekali. ‘banjir kan? Kita kan ada PNPM’ bahasanya gaul-nya gitu deh karena kalo kita bicara frontal kadang juga suka gak masuk jadi kayak ngobrol-ngobrol biasa aja sampeinnya paling yaudah bentuk KSM aja entar ajuin ke BKM terus dari BKM dapet bantuan sekian, kerjanya begini, turun bulan sekian.” (Rini: Pimkol, Juni 2012)

Tetapi secara umum, KSM sudah merasa menjadi bagian dari PNPM Mandiri Perkotaan karena KSM itu sendiri yang menerima manfaat dari bantuan yang di terima dari Pemerintah. Baik sebelum atau sesudah KSM terbentuk KSM menyadari

arti penting keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan. Tingkat loyalitas yang dimiliki baik itu KSM ataupun BKM mengatakan keduanya akan tetap terus berpartisipasi selama memang memberikan manfaat bagi masyarakat dan masih dipercaya oleh masyarakat untuk tetap terlibat walaupun PNPM Mandiri Perkotaan nanti pada tahun 2014 akan habis masa programnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sugito:

“yahh..selama ada itu program pemerintah yang mengucurkan dana untuk masyarakat, saya akan ikutin apapun namanya gitu. Saya sih ga putus, ah enggak ada PNPM, udah buntu gitu aja. Ya saya sih akan mencari tau apasih bentuknya sekarang gitu, kan pemerintah selalu mengawasi masyarakatnya bagaimana caranya mensejahterakan masyarakatnya, nah itu saya mencari apakah ada sumber-sumber dana ya kalo bisa saya kejar gitu.”(Sugito: KSM, Juni 2012)

Keanekaragaman perbedaan baik budaya, agama, suku dan sebagainya terkadang dapat menghalangi seseorang ingin berpartisipasi. Banyak yang beranggapan seseorang yang berada diluar di suatu komunitas atau kelompok yang didominasi oleh orang yang memiliki banyak kesamaan menjadi kendala bagi mereka yang merasa ‘berbeda’ untuk berpartisipasi. Namun hal ini tidak terjadi di Kelurahan Kaliabang Tengah, pengurus BKM atau KSM tidak memperdulikan perbedaan entitas satu sama lain. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suyatno selaku Koordinator Pimkol BKM Kaliabang Tengah:

“Alhamdulillah kita jadi banyak temen jadi keluarga, dari yang enggak kenal jadi kenal jadi keakraban gitu dari antar pengurus terjalin yang keduanya dari pengurus menyebar lagi ke KSM nanti setelah itu tambah lagi persaudaraannya nah itu kita ya kembali lagi kita hidup enggak bisa sendiri, tapi saling bergantung.”(Suyatno: Koordinator Pimkol, Juni 2012)

Sebagaimana yang juga dirasakan oleh pimpinan KSM, Bapak Irwan yang menilai KSM yang dibinanya selama ini:

“Oh..kita tidak memandang suku dan agama di dalam lingkungan situ, kita selalu tekankan, saya juga umpamanya ada rapat RT diundang karena kebetulan saya juga sekretaris RW disana. Kita disini semua ini sama. Saya selalu menekankan bahwa kita di lingkungan satu RT kita

sama, kita warga sini. Meskipun disana ABRI pangkat apa jabatan apa tetep menyatu tidak membawa status dalam lingkungan.” (Irwan: KSM, Juni 2012)

Perempuan sebagai informan dalam penelitian ini dalam keterlibatan di PNPM Mandiri Perkotaan beranggapan keseragaman entitas terutama banyaknya jumlah laki-laki di kepengurusan tidak menghalangi informan perempuan untuk berpartisipasi, meskipun partisipasi perempuan yang disarankan oleh PNPM Mandiri Perkotaan adalah 30%. Sampai saat ini keinginan perempuan untuk berpartisipasi di respon baik dalam program PNPM Mandiri. Selain bertujuan menanggulangi masalah kemiskinan, PNPM Mandiri berupaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Perempuan dituntut dapat ikut berpartisipasi karena permasalahan akan kemiskinan lebih dekat dirasakan oleh kaum perempuan. Pengelolaan keuangan untuk rumah tangga, dari segi cukup atau tidaknya yang mengetahui adalah perempuan dan seberapa banyak yang harus dikeluarkan untuk belanja sehari-hari, biaya sekolah anak yang mengetahui adalah perempuan. Ketiga informan perempuan masing-masing berpendapat seperti ini:

“Menurut saya sih partisipasi bagus ya, pada ngikutin ya terutama ibu PKK-nya pada mau ngikutin kok...kalo ada apa-apa pada semangat. Terutama di wilayah saya banyak yang semangat sebelum saya masuk di Pimkol semangat sekali, saya kan juga ketua posyandu juga termasuk saya orang-orang pada akrab ya sama kita ya. Semenjak di BKM ini jarang ikut rapat di posyandu sama di PKK lagi tapi tetep dipake saya. Sebenarnya saya tuh udah yang lainnya kan banyak.”(Pardiya nti: Pimkol, Juni 2012)

“Saya rasa kalo mewadahi kesetaraan gender itu sudah, tapi ada cuman nya kan tidak bisa kan wanita itu susah sekali ya izin dari suami sebenarnya kesetaraan itu sudah terpenuhi sekali tapi bagaimana mungkin yang satu dua orang kita harus rapat sampe jam 12 malem karena yang lain juga pada punya kegiatan. Bener-bener hebat lah yang bisa eksis di PNPM, harus ngurus dapur, ngurus orang juga.”(Rini: KSM Juni 2012)

Hal yang cukup berbeda diutarakan oleh Ibu Afrina selaku Pimkol BKM Kelurahan Kaliabang Tengah.

“Sebenarnya perempuan tuh punya partisipasi ya, tapi budaya patriarki disini masih tinggi ya. Contohnya saja pada saat pemilihan itu tuh orang banyak memilih saya menjadi koordinator, tapi karena budaya patriarki diusahakan bagaimana jangan saya yang terpilih. Pada saat pertama saya terpilih tapi itu dianggap enggak sah, sehingga dibuat suatu jadi ya itu budaya patriarki karena mereka tidak mau dipimpin oleh perempuan gitu dan sebetulnya itu bisa dikategorikan partisipasi perempuan tinggi tapi budaya patriarki tidak menginginkan perempuan untuk berpartisipasi sehingga lelaki harus tetap menjadi pemimpin jadi melemahkan potensi perempuan, jadi itu melemahkan potensi. Kalo saya tau informasi, aksesnya akan lebih cepat. Tapi sengaja tidak diberi informasi supaya aksesnya lebih lama, makanya Kaliabang itu tadi kalo mbak Irma liat terendah ya itu tadi karena terjadi konflik. Konflik karena budaya bisa diidentifikasi seperti itu, kedua konflik kepentingan-kepentingan kelompok juga ada.”(Afrina: Pimkol, Juni 2012)

Tanggapan semua informan perempuan di Kelurahan Kaliabang Tengah, beranggapan sama bahwa partisipasi perempuan di Kaliabang Tengah sudah baik dengan diadakannya pelatihan-pelatihan tata boga yang dikhususkan bagi perempuan. Tetapi apa yang ditemukan dalam wawancara dengan Ibu Afrina, yang mengatakan bahwa budaya patriarki di Kaliabang Tengah masih ada. Partisipasi perempuan memang diterima oleh semua kalangan, namun kepemimpinan perempuan masih di permasalahkan karena budaya patriarki seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Afrina. Kepemimpinan perempuan memang sepenuhnya belum dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, budaya patriarki masih kuat.

Menurut Amany Lubis (dalam Mudzhar dan Alvi, 2002:45) *“Lack of leadership roles for Indonesian women is a problem that can be attributed to the practical legacy of the patriarchal system. At the heart of patriarchy is an oppression of women that has historically caused them to be excluded from major institutions and professions such as government or academia. Even when they have been allowed to participate, it has generally been subordinate and second-class levels. In Indonesia’s male-dominated and male centered society, positions of authority are generally reserved for men. Additionally, Indonesian women are often discriminated against in school and in occupational hiring, promotion, and reward.”*

Apa yang diungkapkan oleh Amany Lubis adalah kurangnya peran pimpinan untuk perempuan di Indonesia disebabkan oleh sistem patriarki. Sudah menjadi sejarah bahwa sistem patriarki yang menyebabkan perempuan tidak disertakan ke dalam institusi besar dan berprofesi dalam pemerintahan dan akademik. Meskipun perempuan dimungkinkan untuk berpartisipasi, tapi secara umum perempuan ini berada di level kelas kedua. Di Indonesia laki-laki mendominasi dalam peran sentral masyarakat, posisi pemegang kewenangan lebih ditujukan ke laki-laki. Walaupun begitu perempuan di Indonesia sering melawan diskriminasi di sekolah dan untuk mencari pekerjaan, promosi dan penghargaan.

Kepemimpinan wanita diharapkan dapat mempengaruhi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan terutama bagi kaum perempuan. Meskipun dalam BKM tidak dikenal istilah pemimpin, karena dianggap semua yang terpilih menjadi Pimpinan Kolektif adalah pimpinan. Tetapi, apabila BKM dalam hal kepemimpinan ini dijabati oleh perempuan tentu yang memimpin akan berupaya mengedepankan kepentingan sesama kaumnya dengan memprioritaskan program-program yang memang dikhususkan bagi perempuan. Sehingga masyarakat perempuan merasa dimobilisasi dan meningkatkan rasa kepercayaan dirinya dan nantinya dapat mempengaruhi partisipasi perempuan di Kelurahan Kaliabang Tengah dengan lebih banyak menyerap keterlibatan perempuan dan memberikan dampak bagi partisipasi perempuan mengalami peningkatan di Kelurahan Kaliabang Tengah. Di Kelurahan Kaliabang Tengah dari 29 KSM yang ada, hanya satu perempuan yang menjadi ketua KSM di RW 30, ketua KSM perempuan itu terpilih karena memang pada saat itu sedang diadakan pelatihan tata boga di tingkat KSM Kelurahan bukan berdasarkan atas inisiatif sendiri untuk meningkatkan peran perempuan di wilayahnya.

Tabel 5.8 Nama-nama KSM di Kelurahan Kaliabang Tengah

No.	Nama KSM	Ketua
1	Kencana Permai	Sidiq Ariya
2	Ceria	H. Sholeh
3	Kenanga I	Hasanudin
4	Kenanga II	H. Sudarno
5	Anggrek II	Ramlan S.G
6	Cendana	Irwan Sidi Umar
7	Melati	Fahmi R.M
8	Jagung III	Ronianto
9	Dirgantara	Jayadi
10	Mawar	Drs. H. Yanto
11	Lori Indah	Marullah
12	Kamboja I	Hasanudin S.M
13	Cendana II	Yasuroto
14	Permata Bunda II	Utim Yugi M.
15	Permai	Hidi
16	Bunga Matahari	Basuki
17	Persada II	Budi Santoso
18	Kemuning	Slamet Riyadi
19	Mekar Jaya	Mahfud
20	Tectona Grandis	Harrasid
21	Bunga Matahari II	Sugito
22	Kencana II	Jauhari
23	Pelita Hati	Mariyati
24	Bunga Lestari	Dahri Z.
25	Padi	Andy
26	Dahlia	Sugimin
27	Bunga	Jamhari
28	Karya Bakti	H. M. Amin
29	Poncol Indah	H. Sidiq

Sumber: Diolah dari 29 Proposal KSMKSM di Kelurahan Kaliabang Tengah.

3. *Enable to*

Pada saat seseorang memiliki kemampuan dan keinginan untuk berpartisipasi dalam kelompok, organisasi ataupun kegiatan. Kemudian apakah seseorang itu dimungkinkan oleh kelompok, organisasi ataupun kegiatan tersebut untuk dapat berpartisipasi dan terlibat di dalamnya. Kemampuan dan keinginan tersebut haruslah

mendapat umpan balik dari kelompok, organisasi atau kegiatan yang ingin diikuti. Seseorang yang ingin dan mempunyai kemampuan berpartisipasi dalam sebuah partai politik, tetapi partai politik tersebut tidak membuka akses untuk orang tersebut untuk terlibat artinya tidak akan ada partisipasi apabila keduanya tidak saling membuka akses untuk berpartisipasi. Rendahnya partisipasi di Kaliabang Tengah bisa saja dipengaruhi oleh penyedia program dalam hal ini pemerintah daerah kurang memberi akses terhadap masyarakatnya untuk berpartisipasi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan.

Secara umum PNPM Mandiri sudah membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk terlibat, sosialisasi yang dilakukan Fasilitator atau konsultan mengikuti prosedur yang dinamakan siklus kegiatan. Namun sosialisasi yang dilakukan terkadang mendapat kendala dari masyarakat itu sendiri, beberapa RW antusias menanggapi kegiatan ini dan mensosialisasikan kembali ke masyarakatnya dan membentuk kepengurusan KSM, namun beberapa RW masih kurang peduli untuk merespon kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dan akhirnya tidak disosialisasikan kembali ke masyarakatnya, sehingga pada akhirnya sosialisasi tidak merata dan hal tersebut menjadi penghambat ketika kendala-kendala tersebut ditemukan di lapangan, seperti yang pernah terjadi di wilayah RW Bapak Sugito:

“...Cuma karena dulu RW-nya ga respon, makanya kita ni ga tau apa sih artinya PNPM. Jadi ga menikmati...”(Sugito: KSM, Juni 2012)

Pembukaan akses partisipasi masyarakat oleh PNPM Mandiri Perkotaan pertama kali yaitu melakukan sosialisasi dengan pendekatan ke perangkat kelurahan termasuk RT/RW. Dalam hal ini yang pertama kali membuka akses adalah PNPM Mandiri dengan mengundang masyarakat untuk terlibat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Fajar selaku Faskel Tim 2 (Kecamatan Bekasi Utara) :

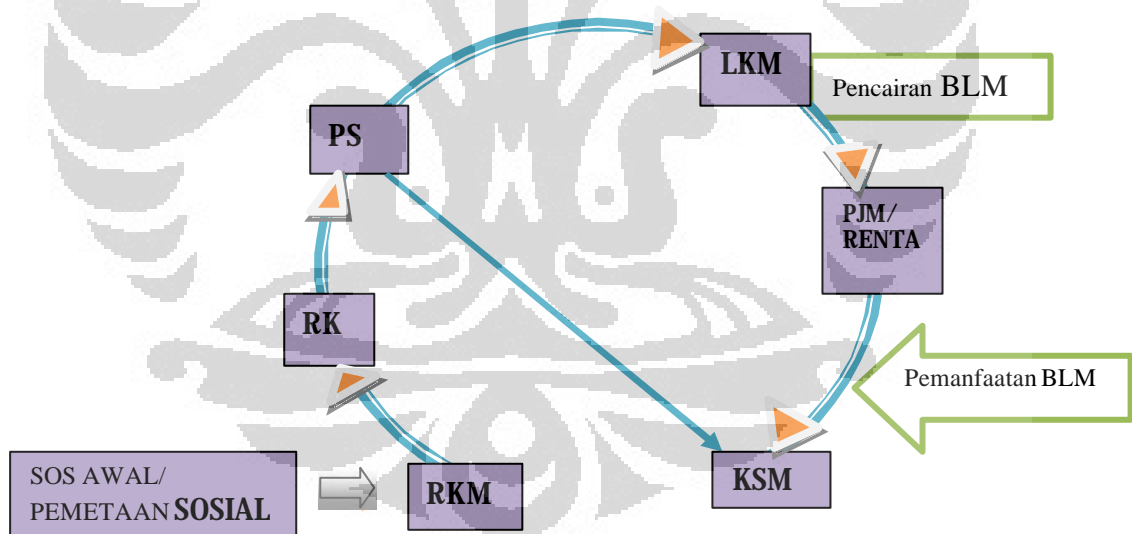
“Hmm...kalo berbicara belum ada pengurus, belum ada BKM kalo belum ada itu biasanya kita ke aparat pemerintah kaya lurah dan perangkatnya. Pertama kita minta data RT sama RW, RT sekian berapa dan siapa dan RW sekian berapa. Artinya tokoh-tokoh masyarakat disitu

kita mapping dulu lah, kalo udah kenal baru minta jadwal. 'Pak kita punya product namanya PNPM gitu, seperti apa sih kata lurahnya?' sebelum kita jawab kalo saya jawabnya pas rame-rame ketika warga kumpul. Jadi bapak tau warga juga tau gitu. Kalo hari ini saya menjelaskan ke bapak seorang terus besoknya di jelasin lagi kan jadi basi gitu. Yaudah minta jadwal, biasanya sih gitu ga resmi jadi semi-formal lah. Nanti si RT/RW tersebut bikin undangan keluarga, ada sosialisasi PNPM.”(Fajar Maulana: Faskel, Juni 2012)

Apa yang diutarakan Bapak Fajar juga diutarakan oleh Bapak Hidri bahwa PNPM yang melakukan pendekatan terlebih dahulu:

“Ada sosialisasi, dari faskel mereka memfasilitasi kita memberikan sosialisasi program PNPM mandiri itu yang pertama, terus kedua kegiatan-kegiatan apa aja yang bisa kita usulkan atau di realisasikan ke masyarakat.”(Hidri: Sekretaris BKM, Mei 2012)

Gambar 5.4 Diagram Siklus



Dalam siklus tersebut pada tahap sosialisasi awal, PNPM Mandiri Perkotaan melalui korkot dan faskel akan meminta data pada RT/RW, kelurahan untuk mendapatkan gambaran dinamika sosial masyarakat setempat. kemudian menyebarluaskan informasi tentang adanya program PNPM Mandiri Perkotaan di

Kelurahan/desa tersebut. Setelah itu meminta izin kepada kepala keluarga/desa untuk melaksanakan proses siklus PNPM Mandiri Perkotaan. Selanjutnya mengumumkan penerimaan relawan. Pada tahap sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan memungkinkan siapa saja untuk dapat terlibat yang pada mulanya memang melakukan pendekatan ke perangkat kelurahan seperti RT/RW dan mulai memperkenalkan PNPM Mandiri Perkotaan dan membuka kesempatan untuk yang bersedia menjadi relawan.

Penyedia program juga harus memfasilitasi masyarakat yang ingin bergabung, fasilitas yang diberikan dapat berupa pelatihan-pelatihan organisasi ataupun pelatihan yang sifatnya dapat mengembangkan kreatifitas dan kemampuan masyarakat yang ingin berpartisipasi. PNPM Mandiri Perkotaan menyediakan pelatihan keorganisasian bagi masyarakat yang sudah lama dalam kepengurusan kegiatan masyarakat ataupun masyarakat yang baru bergabung. Bagi siapapun yang tidak memiliki pengalaman organisasi yang ingin terlibat dalam kepengurusan BKM atau KSM, PNPM Mandiri Perkotaan menyediakan pelatihan-pelatihan dari tahap awal seperti pelatihan pembuatan proposal sampai ke pelatihan penguatan BKM.

“Ada, biasanya kita ada coaching proposal ada coaching LPJ...ada banyak.” (Ahmad Azie: Pimkol, Juni 2012)

Hal ini juga diutarakan oleh Ibu Afrina selaku Pimkol wakil perempuan:

“Pelatihan apa ya, kayak fungsional gitu. Ya kalo lagi PS (Pemetaan Swadaya) apa ya itu namanya, istilahnya coaching gitu loh pendampingan gitu sifatnya pelatihan. Coaching untuk aaahh..untuk pimkol dan UP-UP (Unit Pelaksana).” (Afrina: Pimkol, Juni 2012)

Dari keterangan informan melalui wawancara, PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kaliabang Tengah baik itu BKM ataupun KSM selama ini juga mendapatkan pelatihan-pelatihan pada saat sebelum ataupun sesudah terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Pelatihan yang dilakukan oleh faskel yaitu diantara *coaching* untuk Pimkol dan Unit-unit Pelaksana, penguatan BKM sementara untuk KSM pelatihan yang dilakukan adalah mengenai pelatihan tata boga, pelatihan

sekaligus mentoring dalam melakukan pembangunan fisik dengan menjelaskan komposisi bahan bangunan dan pemilihan bahan baku yang benar gunanya sebagai pembelajaran bagi masyarakat dengan harapan agar nantinya dapat diamankan dikemudian hari atau dapat direalisasikan sebagai sumber pemasukan baru bagi partisipan setelah mengikuti pelatihan. Misal ibu-ibu yang mengikuti pelatihan pembuatan kue-kue kecil, setelahnya dapat dijadikan peluang bisnis baru bagi Ibu-ibu yang sudah mengikuti pelatihan. Pelatihan-pelatihan bagi BKM dan KSM ini di dapat pada tahap pembentukan BKM dan KSM pada siklus kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. Tetapi yang terjadi dari harapan agar hasil dari pelatihan, yaitu pelatihan tata boga dapat memberikan output tidak dirasakan di Kelurahan Kaliabang Tengah, seperti yang diutarakan Faskel Tim 2 (Kecamatan Bekasi Utara):

“...ada ouput atau hasilnya misal cikal bakal pengusaha baru misal kita pelatihan tata boga jangan sampai besok rapat tetap aja belinya di took peni, loh kenapa enggak kan dari wilayah kita kemaren ada yang bisa bikin kue. Nah itu harusnya terekam oleh kami. Kami juga menanyakan ke 30 ibu-ibu adakah yang membuka usaha kecil-kecilan. Ternayata semua tetep aja beli..”
(Fajar Maulana: Faskel, Juni 2012)

Selain itu, penyedia program juga harus dapat mendukung partisipan bahwa partisipan memiliki peran untuk tampil untuk didengarkan gagasan yang disampaikan dan dimungkinkan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan. Keterbukaan akses juga harus didukung untuk partisipan agar dimungkinkan terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga dapat lebih dalam terlibat di PNPM Mandiri Perkotaan.

Partisipan juga dapat diperkenankan oleh penyedia program untuk mengambil peran dalam memberi gagasan dan mempengaruhi keputusan. Harapan bagi BKM Kaliabang Tengah seperti yang dikatakan oleh Pak Ahmad Azie selaku Pimpinan Kolektif bahwa semua masyarakat dapat memberikan gagasan-gagasan dengan melakukan berbagai macam pengajuan kegiatan untuk membangun wilayahnya.

“iya..kalo kita berharap 30 RW ini ikut memberikan usulan, tapi dalam hal skala prioritas itu terlebih dulu kita turun lapangan atau survey

bahkan tidak jarang kita turun dengan faskel memilih mana yang menjadi skala prioritas.”(Ahmad Azie: Pimkol, Juni 2012)

Tetapi pada kenyataannya tidak semua RW di Kelurahan Kaliabang Tengah melakukan pengajuan, salah satunya di RW tersebut merupakan kawasan perumahan dimana kebanyakan yang tinggal di kawasan tersebut adalah masyarakat dengan kemampuan finansial cukup baik. Selain itu, kendala kurangnya pengajuan-pengajuan kegiatan perbaikan wilayah terdapat juga di daerah yang masuk dalam kategori kemiskinan, mereka melakukan pengajuan tetapi swadaya mereka tidak siap pada akhirnya harus gugur di tengah jalan kecuali bagi wilayah yang benar-benar memiliki tingkat urgensi untuk dibantu melalui program PNPM Mandiri Perkotaan. Kendala lainnya dalam pelaksanaan melakukan pengajuan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang ditemukan dari hasil wawancara adalah PNPM Mandiri Perkotaan dalam memberikan bantuan dalam setahun hanya muncul 3-4 kali, beberapa KSM dapat bersikap sabar dalam menunggu giliran daerahnya untuk menerima bantuan, seperti yang terjadi di KSM Bunga matahari:

“Alhamdulillah, karena kan dari 30 RW kan kucuran dananya setahun tiga kali. APBD dua kali, APBN satu kali. Kan harus bergiliran, jadi saya harus mawas diri juga enggak mau tiap kucuran dana saya meminta, ya siapa yang mau kasih pasti temen-temen (baca: BKM) juga akan marah. Ya wajar aja saya dua taun berjalan udah dua kali dapet (suara tukang bakso lewat) gitu kita mawas diri, kan yang lain (re: KSM lain) juga harus..”

Tetapi tidak semua KSM lain dapat bersikap sabar, beberapa KSM mengalami kejenuhan karena pengajuan KSM tersebut belum di terima untuk didanai, kemudian pada bantuan selanjutnya ketika KSM diminta kembali untuk melakukan pengajuan timbul kejenuhan dan sikap pesimis bahwa pengajuan KSM yang pernah di tolak pada bantuan pertama tidak akan di respon dan akhirnya banyak KSM yang berumur pendek dan hal ini yang menyebabkan capaian partisipasi di suatu daerah menurun. Hal ini seperti yang dikatakan Bapak Fajar:

“...,cuma tingkat kejenuhan masyarakat kayaknya, artinya sebenarnya kaya evaluasi aja ya. satu tahun, dua tahun, tiga tahun evaluasi minta

usulan lagi, aduhh kan kemaren udah usulan lagi tapi belum dibenerin sekarang udah dimintain usulan lagi jadi tingkat kejenuhannya aja makanya makin turun makin turun.”(Fajar: Faskel, Juni 2012)

4. Asked to

Orang-orang cenderung menjadi terlibat secara teratur ketika masyarakat diminta untuk terlibat. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi seringkali bergantung pada apakah mereka didekati atau tidak dan bagaimana mereka didekati. Berbagai pilihan untuk keterlibatan partisipasi adalah penting karena beberapa orang lebih nyaman dengan beberapa bentuk keterlibatan seperti rapat umum, sementara yang lain lebih suka terlibat melalui diskusi *online*. Beberapa orang berpartisipasi untuk berbicara mengenai pengalaman dari masyarakatnya atau lingkungannya sementara yang lain ingin terlibat berdasarkan pengetahuan mereka tentang layanan tertentu sebagai pengguna. Partisipasi dapat dimobilisasi dengan menggunakan insentif (misal honorarium), melalui pembentukan rasa kewajiban atau dengan menawarkan bargaining/pertukaran.

PNPM Mandiri Perkotaan sebagai penyedia program seperti sebelumnya telah dijelaskan, bahwa PNPM Mandiri Perkotaan memang membuka kesempatan seluas-luasnya dan membuka akses bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi. Namun, untuk lebih mengefektifkan berjalannya program, PNPM Mandiri Perkotaan membangun strategi dengan mencari tokoh kunci yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk terlibat. Pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa kebanyakan pengurus yang mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan, baik itu BKM atau KSM adalah orang-orang yang memang pernah menjabat dalam organisasi kemasyarakatan seperti Ketua RW, Ketua RT, Ketua Posyandu dan lain sebagainya. PNPM Mandiri Perkotaan melakukan pendekatan kepada orang-orang tersebut agar keterlibatannya dapat mempengaruhi masyarakat yang telah menaruh kepercayaan bagi orang-orang yang sudah lama terjun di masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menyerap partisipasi sebanyak-banyaknya.

“iya betul, kita cari tokoh kunci yang kita pernah dapet dari strategi pelatihan-pelatihan itu yang pertama kita harus kenal budaya setempat ya kan, yang kedua kita cari tokoh kunci kita enggak mungkin cari orang yang enggak punya pengaruh kita jadikan relawan ya kan.” (Fajar: Faskel, Juni 2012)

Pendekatan ini pula yang diakui beberapa pengurus BKM atau KSM beberapa dari mereka memang di minta untuk berpartisipasi dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan.

“Saya waktu itu diajukan, jadi ada tanda tangan warga semuanya diajukan.” (Rini: Pimkol, Juni 2012)

“Oh enggak, karena dipilih sebagai tokoh perempuan.” (Afriana: Pimkol, Juni 2012)

“Aku dibawa sama Pak H, dia ngejelasin tentang PNPM di kelurahan gitu. Nah terus...saya kan mengikutin mungkin dia tau sifat saya dan dia menawarkanlah “bel kamu harus begini-begini-begini, kamu orang aktif kan” (Pardiyanti: Pimkol, Jun 2012)

“Diutus dari pengurus RW” (Irwan: KSM, Juni 2012)

Tetapi bukan berarti PNPM Mandiri Perkotaan hanya melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh kunci saja, Pak Sugito contohnya karena aktif mengikuti rapat-rapat dan pertemuan. Bapak Sugito mengetahui PNPM Mandiri dari informasi yang di dapat, karena ketua RW di wilayahnya kurang respon. Akhirnya Bapak Sugito tergerak mencari informasi melalui pertemuan-pertemuan yang dia ikuti karena tanggung jawabnya sebagai ketua RT menjadi beban moral bagi masyarakatnya kemudian Bapak Sugito berinisiatif mengajukan diri atas keinginan sendiri.

“Oh, gak...saya tadinya inisiatif, karena saya perangkat RT sebelumnya dari Humas naik jadi bendahara gitu nah sekarang saya jadi RT. Jadi saya punya beban moral di masyarakat, kalo di RW saya terlalu luas dan kurang sinkron sama ketua RW-nya, di samping itu ya terpaksa biarlah saya jadi koprak tapi saya punya pasukan dan gitu aja. Ya itu Alhamdulillah ada program apa saya ikutin, ya mudah-mudahan akan lebih banyak lagi bisa saya tuang, makanya saya ikut pelatihan dimana aja, di Cisarua, Gunung Mas, sampe di Islamic centre juga di patriot itu saya ikutin juga karena apa saya takut ketinggalan informasi gitu, apa

saja sih dana-dana pemerintah yang bisa kita serap gitu.”(Sugito: KSM, Juni 2012)

Kompensasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan khususnya bagi pengurus BKM dan KSM tidak diberikan oleh penyedia program, BKM dan KSM dituntut bekerja secara sukarela untuk mengkomodir masyarakat miskin dan perempuan untuk dapat berpartisipasi. Di Kelurahan Kaliabang Tengah, semua perangkat pengurus BKM dan KSM yang menjadi informan menyatakan sukarela mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan dan tidak merasa dipaksa untuk ikut. Kalaupun pada awal keterlibatannya ditunjuk atau diminta, tetapi semua informan menyatakan selama PNPM Mandiri Perkotaan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak mereka bersedia terlibat meskipun tidak dibayar. Salah satunya seperti yang di katakan oleh Ibu Rini selaku Pimkol:

“Saya rasa enggak, jadi bagi kita seperti saya mewakili RW 30 ya sepanjang aspirasi RW 30 yang mungkin 30 tahun lagi baru terakses saya rasa itu kepuasan yang pasti kita basicly yah gini kalau kata Allah manusia yang baik adalah yang bermanfaat bagi orang lain walaupun sedikit. Jadi nominal buat kita itu tidak jadi masalah hahaha..lagian juga persaudaraan kita bagaimana ama KSM-KSM itu enggak bisa ini ya, enggak tau deh KSM tempat lain yang pasti dari kita itu unsurnya kekeluargaan, kekerabatan, gotong-royong bersama-sama jadi ketika ada yang ngeluh kita apa masalahnya dong. Kalau masalah keberatan tidak.”
(Rini: Pimkol, Juni 2012)

A self-help group is a supportive, educational, usually change-oriented mutual-aid group that addresses a single life problem or condition shared by all members. its purpose may be personal or societal change or both, achieved through the use of ideologies for dealing with a situation. its leadership is indigenous to the group's member; participation and contributions are voluntary-it charges no fees. A major difference between self-help and support is that the former aims at effecting change (Kurtz,1997:4-5).

Kelompok *self-help* (swadaya) adalah pendukung pendidikan, biasanya mengubah orientasi saling membantu antar kelompok yang membahas masalah kehidupan pribadi atau kondisi yang dimiliki oleh semua anggota. Tujuannya mungkin perubahan pribadi atau masyarakat atau keduanya, dicapai melalui penggunaan ideologi untuk menghadapi situasi. kepemimpinannya adalah adat untuk

anggota kelompok, partisipasi dan kontribusi sukarela-dia menetapkan tidak ada bayaran. Perbedaan utama antara self-bantuan dan dukungan adalah bahwa yang pertama bertujuan untuk mempengaruhi perubahan

Menurut Fasilitator Tim 2 (Kecamatan Bekasi Utara), mengenai tidak adanya kompensasi tidak semua memang sukarela dan murni menjadi relawan tanpa bayaran masih ada partisipan yang masih mengharapkan kompensasi sehingga menjadi permasalahan mengapa capaian partisipasi di suatu kelurahan masih rendah.

“...Ada bantuan, kemudian ada proses, nah ini kebanyakan yang diproses ini mereka yang mundur teratur. Mundur teratur artinya dimana ngajuin hari ini langsung dapet, tapi kita bersedia jadi relawan dan itu harus berproses. Jadi yang kita pinta ‘Pak relawannya di RT ini ada enggak yang siap membantu kita untuk mendata dan sebagainya. Tapi maaf relawan bener-bener relawan, kalo BPS enak kan data warga miskin si A, si B, si C besoknya pulang dapet transport. Nah kalo dikita enggak, kita bener-bener murni relawan gitu. Itu yang tau kalo enggak ada dananya biasanya gitu narik diri, makanya partisipasinya kurang disitu.” (Fajar: Faskel, Juni 2012)

Di Kaliabang Tengah semua pengurus memang rata-rata adalah orang yang sudah lama bergerak dalam kegiatan di masyarakat dan berkerja di bidang sosial, sehingga mereka tidak memperlakukan tidak adanya kompensasi selama biaya operasional mereka juga tetap dibiayai oleh penyedia program. Sikap sukarela yang ditunjukkan di Kaliabang Tengah diharapkan murni niat tulus tanpa membawa bendera kepartaian atau kepentingan-kepentingan politik di dalamnya seperti contoh salah satu pengurus nantinya adalah calon anggota legislatif ataupun sebagainya dan sengaja berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan dalam rangka mencari simpatian. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Fajar sebagai Fasilitator berpendapat dalam hal ini:

“Nah itu ya balik lagi ke masing-masing orangnya, ada yang melihat ini sebagai kesempatan, kesempatan apapun. Kesempatan berkarya, kesempatan berbuat baik ada juga kesempatan ini saya diliat orang artinya dalam waktu ke depan saya mau jadi RW atau apapun ada kesempatan yang ada duitnya jadi mereka liat ini sebagai kesempatan tapi

untuk sebagian besar orang ini merupakan potensi gitu untuk memperbaiki lingkungan.” (Fajar: Faskel, Juni 2012)

5. Responded to

Orang-orang akan berpartisipasi secara berkelanjutan apabila mereka percaya bahwa keterlibatan mereka membuat sesuatu yang berbeda dan mencapai manfaat positif. Selain itu bagi orang-orang yang memutuskan untuk berpartisipasi mereka harus percaya bahwa mereka akan didengarkan dan tidak selalu setuju dengan suatu keputusan paling tidak pandangan-pandangan dari mereka telah diperhitungkan. Bagaimana para pemegang otoritas menimbang gagasan-gagasan atau pesan dari berbagai konsultasi sebagai masukan untuk proses pengambilan keputusan. Bagaimana perbedaan gagasan atau pendapat dari berbagai peserta yang terlebih dahulu di prioritaskan. Daya tanggap (*Responsiveness*) adalah tentang memastikan *feedback* yang mungkin tidak selamanya positif. Masyarakat harus belajar untuk hidup dalam kekecewaan. Kepastian respon tergantung pada peran dari kualitas wakil terpilih dan pimpinan, musyawarah dan akuntabilitas untuk strategi pemberdayaan yang efektif.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, faktor *responded to* lebih tepat dianalisis untuk KSM dan perempuan sebagai penerima manfaat dan sebagai objek sasaran PNPM Mandiri Perkotaan dimana keberadaan mereka serta pendapat mereka harus di respon. Di Kaliabang Tengah apakah ide dan gagasan KSM dan perempuan ditanggapi dan dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan. Mengingat bahwa bantuan PNPM Mandiri Perkotaan ini hanya hadir tiga kali dalam setahun dan tidak semua KSM dapat menerima bantuan setiap tahunnya, sehingga BKM sebagai pemegang otoritas yang menentukan skala prioritas dan menghadapi KSM yang belum bisa menyerap bantuan. Tiga informan berasal dari KSM menyatakan bahwa selama ini pengajuan mereka di tampung oleh BKM. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Irwan:

“Pasti di respon, seperti yang saya bilang kan setiap gagasan itu di respon tapi kan selalu dilihat dari aspek-aspek yang lain, begitu bu.”(Irwan: KSM, Juni 2012)

Hal yang sama juga diutarakan oleh pihak BKM, bahwa BKM menampung semua aspirasi dan pengajuan dari masyarakat tetapi tidak semua pengajuan itu di terima untuk didanai, banyak pertimbangan yang harus dipikirkan dimulai dari sifat urgensi suatu wilayah memang benar-benar membutuhkan bantuan dan mengenai kesiapan swadaya wilayah yang nanti akan dibantu.

“Ya..kita tampung dan kita tapi enggak semua usulan itu kita penuhi semua ya karena satu tahun ada tiga putaran dan penerimanya 3 KSM dari situlah kita memberikan pengertian ke KSM bahwa pemberian bantuan seperti itu.” (Suyatno, Juni 2012)

Hal senada juga diutarakan oleh Ibu Rini:

“hmm..kalo pengajuan setiap RW itu pasti ada pengajuan, ya seperti yang saya bilang tadi. Nah itu tugas kita. Semua di tampung dan tugas kita mengolah mana yang prioritas.”

Ibu Rini juga menambahkan:

“Pimkol rapat hanya penentu kebijakan prioritas mana yang diutamakan skala prioritas mana yang bisa ditunda itu tergantung Pimkol dan sebelum diputuskan kita sudah survey, skala prioritas yang mana setelah survey nanti untuk rapat-rapat berikutnya bari kita rapat dengan KSM. Kadang-kadang kita perlu ketua RW juga tapi yang pasti kita skala prioritas diutamakan. Kadang tapi yang sudah mengajukan lama ke kita setelah kita survey ternyata ini bukan skala prioritas terpaksa kita tunda tapi itu kendala di masyarakat juga ada.” (Rini: Pimkol, Juni 2012)

Bantuan dari pemerintah yang hanya tiga kali turun dalam setahun, terlebih mengenai hal skala prioritas dan kesiapan swadaya mau tidak mau menyebabkan tidak semua KSM dapat menerima bantuan, untuk Bapak Sugito di KSM Bunga Matahari bersikap mawas diri bahwa tidak secara terus-menerus akan menerima

bantuan, karena masih ada yang lebih membutuhkan. Tidak banyak pula KSM yang akhirnya mundur dan menarik diri, sehingga hal ini menjadi kendala dan akhirnya mengurangi partisipasi KSM untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kejenuhan masyarakat dan sikap pesimis KSM yang belum ditanggapi yang berpikir berkali-kali melakukan pengajuan tetapi tetap saja belum di dapat ditanggapi oleh pemegang otoritas, dimana dalam PNPM Mandiri Perkotaan ini pemegang otoritas adalah BKM karena pengajuan yang belum dapat di respon KSM yang terganjal dengan masalah swadaya dan lain-lain.

“Biasanya kebentur masalah masyarakat itu swadaya masyarakat itu, mereka mampu atau tidak. Walaupun sudah mengajukan cukup lama tapi swadaya kurang bagus otomatis enggak bisa kalo swadaya nya begitu. Intinya skala prioritas yang kedua adalah kesiapan swadaya.” (Rini: Pimkol, Juni 2012)

Begitu pula dengan yang disampaikan Bapak Suyatno selaku koordinator BKM Kaliabang Tengah:

“Ya kita kembalikan lagi katakan satu kelurahan ada 30 RW yang satu tahun ini ada tiga tahapan yang masing-masing ada beberapa RT/RW yang tadinya sudah mendapatkan atau KSM sudah mendapatkan maka untuk KSM yang belum mendapatkan atau KSM yang benar-benar membutuhkan secara mendesak dengan kita mensurvey lokasi yang urgent itu yang di prioritaskan.”(Suyatno: Koordinator Pimkol, Juni 2012)

Respon BKM yang dipimpin oleh kesebelas Pimpinan kolektif terhadap pengajuan dari masyarakat selalu ditampung, tetapi kembali ke tugas mereka adalah memilih dengan baik wilayah mana yang menjadi skala prioritas mengingat bantuan yang hanya setahun tiga kali turun, dan diharapkan setiap bantuan yang turun benar-benar diperuntukkan untuk wilayah yang membutuhkan bantuan dari PNPM Mandiri Perkotaan. Walaupun diakui oleh Bapak Azie dalam menentukan skala prioritas, perbedaan pendapat tidak dapat dihindarkan.

“.., Pas penentuan titik prioritas aja kita ada adu argumentasi biasa, tapi abis itu langsung ngopi lagi. Itu yang saya suka disini.” (Ahmad Azie: Pimkol, Juni 2012)

Kepentingan perempuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan tidak boleh dikesampingkan, terlebih pengaturan harus adanya keterlibatan perempuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan sebesar 30%. Sejauh mana perempuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan ditanggapi oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Salah satu informan mengakui saat ini sebagai Pimkol, dia sudah jarang aktif di Kelurahan Kaliabang Tengah karena kesibukannya. Bu Afrina juga mengatakan keberadaan perempuan dalam BKM terkadang sering dikesampingkan, ketidakhadiran perempuan di BKM dalam setiap pertemuan untuk mengambil keputusan sering kali tidak perhitungkan.

“Jadi kalo saya liat nih, itu tadi mbak saya gak pernah terlibat. Tau-taunya nanti saya taunya karena kita yang dari kota berkunjung ke Kaliabang, jadi untuk Kaliabang sebetulnya saya jarang aktif. Karena untuk rapat saya juga jarang diundang. Kalo saya tidak diinformasikan saya juga tidak ingin terlalu terjun supaya aman-aman saja gitu loh, artinya kalo kita terlalu banyak tanya kenapa saya tidak diundang? saya batalkan loh, nanti begitu kan jadinya. Jadi selama kegiatan itu berjalan apa adanya dibiarkan berjalan saja, meskipun saya ga diundang.”

Ibu Afrina juga menambahkan:

“Untuk saat ini terjadi apa ya? Yang aktif, aktif.. yang tidak ya tidak aktif gitu aja kayaknya. Makanya dia termasuk yang terendah yah? makanya itu terendah dalam berkoordinasi dan terendah dalam mengakses. Diantara sebelas itu saya kan bukan koordinator ya, ada koordinator bapak-bapak itu. Kadang kita ketinggalan informasi, dia melakukan kegiatan bersebelas kadang di sahkan hanya empat orang saja itu dianggap benar sebenarnya itu salah. Tapi ya karena alasan dari saya pribadi, ya karena saya sibuk. Saya biarkan saja saat semua itu untuk urusan membantu masyarakat ya biarkan saja, tetapi sebenarnya itu yang membuat jelek kinerjanya.” (Afrina: Pimkol, Juni 2012)

Dalam struktur Pimkol diakui juga salah satu Pimkol BKM Kelurahan Kaliabang Tengah, bahwa untuk pemenuhan kuota partisipasi perempuan memang sudah terpenuhi namun secara keaktifan kurang terpenuhi.

“Pada awalnya kuota pemenuhan 30% itu makanya di pimkol ada 3 perempuan, memenuhi kan..tapi itu sejalanannya waktu ya kita tidak bisa memaksakan mereka untuk aktif terus kan? Karena mereka punya aktifitas masing-masing. Namun kita ada di lapangan saya rasa bukan

tercapai lagi tapi melebihi 30% (bunyi telpon seluluer terdengar kembali) dalam hal memberi makanan, minuman atau konsumsi itu melebihi. Namun dalam kepengurusan walaupun secara terstruktur memenuhi namun secara keaktifan kurang terpenuhi.” (Ahmad Azie: Pimkol, Juni 2012)

Peran perempuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan terutama dalam KSM sejauh ini lebih banyak bentuk partisipasi dalam menyediakan konsumsi bagi yang bekerja bakti sebagai swadaya. Sementara itu, program yang dikhususkan untuk perempuan masih kurang meskipun pernah ada program untuk perempuan di Kelurahan Kaliabang Tengah, yaitu pelatihan tata boga yang menghadirkan koki profesional dan pembelian alat-alat masak dan itu baru satu kali dilaksanakan pada akhir tahun 2010 (lihat lampiran 10).

“Ada, kemaren kan di akhir tahun 2010 ada salah satu kegiatan pelatihan tata boga coba di check itu ketua KSM ibu-ibu di RW 30, dia ketua KSM-nya dia mendatangkan koki dari cetering lumayan gede satu set ternyata mereka tidak menyediakan alat-alat akhirnya kita membeli alat-alat juga. Itu mereka dipanggil sekitar 30-40 orang mereka menawarkan menu A,B,C,D kita terima tolong punya modulnya juga buat peserta kayak cara bikin mie ayam, tapi mienya bikin bukan beli. Alatnya ada di kelurahan dan itu belum maksimal, ternyata masih diperdebatkan alatnya ada tapi yang buka usahanya enggak ada eh malah bingung jatohnya malah di sewain alat-alatnya.” (Fajar Maulana: Faskel, Juni 2012)

Gambar 5.5 Foto kegiatan Pelatihan Tata Boga di Kelurahan Kaliabang Tengah



Sumber :Dokumentasi Faskel Tim 2 (Kecamatan Bekasi Utara)

Gambar 5.6 Foto partisipan perempuan yang mengikuti pelatihan tata boga



Sumber: Dokumentasi Faskel Tim 2 (Kecamatan Bekasi Utara)

Pelatihan yang dilaksanakan pada akhir tahun 2010 lalu yang dikhususkan perempuan di Kelurahan Kaliabang Tengah tidak diteruskan pada tahun-tahun berikutnya. Program untuk perempuan tersebut seolah berhenti di tahun tersebut dan pada tahun 2011 sampai tahun 2012 belum ada lagi program serupa. Alat-alat yang dibeli untuk keperluan pelatihan menjadi pembelian yang kurang tepat karena tidak terpakai dan sekarang disewakan daripada tidak terpakai. Sehingga pencapaian partisipasi perempuan di Kelurahan Kaliabang Tengah memang rendah dan hanya terserap dari swadaya penyediaan makan dan minum untuk yang melakukan kerja bakti.

Gambar. 5.7 Salah satu oven peninggalan pelatihan tata boga akhir tahun 2010 yang tidak terpakai dan tersimpan di kantor BKM Kelurahan Kaliabang Tengah.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Fasilitator mengatakan setelah adanya pelatihan, dampak yang ingin dihasilkan dari pelatihan tata boga tersebut adalah munculnya usaha-usaha baru di bidang tata boga yang dikembangkan oleh Ibu-ibu yang sudah mengikuti pelatihan tata boga tersebut. Namun, pembelian alat-alat masak yang sudah dibeli sekarang disewakan. Output yang ingin dicapai yaitu munculnya usaha-usaha baru dari hasil pelatihan tidak tercapai.

Hal lain dikatakan Bu Rini, selain sebagai salah Pimkol di Kelurahan Kaliabang Tengah yang juga tinggal di RW 30 yang melaksanakan pelatihan tata boga.

“Sebetulnya untuk wilayah kita ini, perempuannya itu rata-rata 75% ibu rumah tangga, tapi saya lihat mereka punya motivasi untuk maju. Makanya saya bilang pemberdayaan di RW 30 itu memang layak untuk maju gitu, karena mereka aktif untuk urusan perempuan ya. Jadi mereka memiliki kemampuan, di RW 30 kumplit lah pokoknya, RW 30 itu posyandunya bagus, untuk pusbindu khusus lansia itu bagus terus selain itu juga di setiap RT kita memiliki kegiatan masing-masing itu ada arisan ada pengajian. Jadi kalo kegiatan perempuan di RW 30 itu saya pikir (anak Bu Rini datang dari dalam rumah membawa minuman untuk saya) itu sudah bagus sekali bahkan untuk RW 30 untuk urusan kematian pun kepengurusan anak yatim itu kita kelola dengan baik, itu untuk perempuan loh. Kalo di tingkat kelurahan kita pernah bikin pelatihan tata boga, hampir setiap RW mengirimkan utusannya untuk ikut pelatihan tata boga. Saya lihat alatnya kita punya alatnya ya itu ada di kantor, jadi pelatihan itu berlanjut hasilnya bisa dipraktekan diluar itu. Mungkin saat itu ikon-nya (dibaca: icon) Ibu Tasipah namanya, itu Alhamdulillah itu dia pembuatan popcorn sudah berjalan baik terus ada pembuatan cake-cake panggang dan pizza itu semua bisa dijual itu juga kaya bronis panggang yang dulu dia enggak bisa bikin sekarang udah bisa dijual seloyang 45 ribu dan untuk alat itu kita sampai saat ini masih menerima pesenan alat pizza karena kalo kita beli harga biasa itu kan mahal, kalau kita karena beli harga produsen jadinya murah. nah yang sekarang ini yang mau dateng kesini itu ibu ade suryani kebetulan dia bendahara UPS itu berlanjut juga dia ada pesenan kue-kue gitu untuk acara nah itu kita bisa back-up. Ini bukan omong kosong ya, kalo mbak mau liat silahkan ada hajat apa kita bisa back-up dan yang pasti tujuan dari pelatihan itu kayak pedagang-pedagang kue kecil kayak tukang gemblong dengan harapan kadar terigu jadinya keras nah dengan pelatihan ada peningkatan. terus untuk masalah bikin mi pangsit itu kita berjalan juga bagus bakso juga bagus.”(Rini: KSM, Juni 2012)

Perbedaan pendapat mengenai ketersediaan program yang memang dikhususkan untuk perempuan di Kaliabang Tengah, ditenggarai bahwa yang terjadi adalah pelatihan yang dilakukan memang pernah dilaksanakan di RW 30. Namun pelatihan tersebut bukan prakarsa KSM di RW 30, melainkan merupakan prakarsa bahwa bentukan KSM itu adalah KSM binaan kelurahan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Irwan:

“Oh kalo di kita sih belum, masih fokus di infrastruktur tapi kalo secara organisasi di BKM sudah ada itu di RW 30 yang merupakan KSM kelurahan.” (Irwan, Juni 2012)

Jika melihat dampak partisipasi di luar konflik yang terjadi yang ditimbulkan dari kejadian di Kelurahan Kaliabang Tengah dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah benar adanya partisipasi perempuan di Kelurahan Kaliabang Tengah masih rendah karena di setiap KSM belum menyediakan program untuk perempuan. Kegiatan mereka masih memfokuskan pada kegiatan lingkungan yaitu infrastruktur, sementara untuk kegiatan sosial masih minim terutama kegiatan ekonomi yang sampai saat ini belum berjalan sehingga penyediaan pinjaman bagi perempuan yang ingin membuka usaha masih menjadi kendala. Adapun program untuk perempuan yang baru satu kali diadakan di Kelurahan Kaliabang Tengah merupakan KSM binaan Kelurahan, karena ini dilaksanakan di tingkat kelurahan permasalahan yang terjadi tidak semua perempuan di masing-masing RW mengikuti pelatihan tersebut. Seperti yang dikatakan Bu Afrina:

“KSM perempuan dulu pernah di bentuk tapi itupun konflik gitu karena kegiatannya hanya itu tadi harusnya si KSM itu dibentuk untuk apa ya untuk mengakomodir kebutuhan perempuan itu sendiri kan. Tapi kemarin itu kegiatannya justru pelatihan masak-memasak, ada yang enggak ke-cover daerah untuk diajak. Akhirnya jadi ga jalan tuh barang-barang yang udah dibeli tapi dibiarin gitu aja. Itu pola pembinaan gitu sih kalo menurut saya. Kaliabang perempuannya di minimalkan, bukan tidak potensi tapi diminimalkan karena lebih banyak kefungsiannya ke pimkol laki-laki, pengurus laki-laki gitu loh aktifitasnya jadi pengurus BKM yang perempuan dia tidak terakses untuk aktif gitu. Tapi bukan berarti nanti perempuan di Kaliabang tidak

aktif, tetapi di bidang lain aktif seperti saya mendirikan PAUD dan ada perempuan-perempuan lain yang bikin PAUD. Perempuan juga aktif tetapi tidak dalam lingkungan PNPM itu sendiri melainkan di luar PNPM. Ada yang aktif perempuan di PNPM tapi ada di kelurahan lain” (Afrina: Pimkol, Juni 2012)

BKM Kelurahan Kaliabang juga tetap mengusahakan adanya program yang dikhususkan untuk perempuan hal ini yang diutarakan oleh Bapak Suyatno selaku koordinator BKM Kelurahan Kaliabang Tengah

“memang kita masih rencana dan gagasan ada, namun terus terang saja belakangan ini agak kesibukan waktu lalu artinya usulan sudah ada tapi kapannya masih lihat perkembangan ke depannya.”(Suyatno, Juni 2012)

Meskipun pendonor meminta agar bantuan yang diperoleh kelurahan digunakan untuk pembangunan fisik, BKM sebagai fasilitator pemerintah dan masyarakat juga sebagai penentu skala prioritas juga diharapkan membagi secara adil penggunaan bantuan yang turun 3 kali dalam setahun. Salah satu putaran bantuan dapat diperuntukkan untuk kegiatan sosial terutama mengakomodir perempuan untuk secara luas dapat terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Apabila melihat penyebab kemiskinan di Kelurahan Kaliabang tengah bukan hanya masalah kondisi lingkungan yang masih kurang, tetapi dalam permasalahan sosial dan ekonomi juga dapat ditanggulangi melalui PNPM Mandiri Perkotaan.

Permasalahan bidang sosial ekonomi di Kelurahan Kaliabang Tengah

- Anak putus sekolah
- Anak usia sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan dasar
- Tingginya angka pengangguran
- Gizi buruk pada balita
- Warga miskin yang menempati rumah tidak layak huni
- Daya beli rendah
- Pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan

Jumlah perempuan di Kelurahan Kaliabang Tengah hampir menyamai jumlah laki-laki, dari data kondisi demografis Kelurahan Kaliabang Tengah:

Kondisi Demografis

- Jumlah Penduduk : 62447
- Jumlah Penduduk Dewasa : 49957
- Jumlah Laki-Laki : 31759
- **Jumlah Perempuan : 30688**
- Jumlah KK : 14363
- Jumlah KK Miskin : 3986
- Jumlah Jiwa Miskin : 16314

Banyaknya jumlah perempuan ini, BKM harus dapat melihat sebagai potensi untuk memperkecil jumlah jiwa miskin dan KK miskin yang ada di Kelurahan Kaliabang Tengah. Dalam setahun di tiga putaran bantuan, satu putaran diperuntukkan untuk kegiatan sosial yang ditujukan untuk perempuan. Menyediakan pelatihan tata boga, kerajinan tangan dan lain sebagainya. Agar pelatihan tidak sia-sia, bagi mereka yang mengalami kekurangan modal untuk membuka usaha, BKM melakukan kerja sama ke beberapa perusahaan di sekitar wilayah ataupun mengajukan kerjasama dengan bank-bank pemerintah atau swasta. Walaupun nanti kerja sama dengan perusahaan dan bank-bank swasta tidak tercapai, setidaknya cara lain agar pelatihan menjadi bermanfaat dengan memberikan pelatihan membuat kerajinan tangan dengan memanfaatkan barang-barang bekas untuk diolah kembali dan memiliki nilai jual. Pelatihan pemanfaatan barang bekas pakai ini memberikan dampak yang cukup banyak, perempuan dapat membuka usaha tanpa modal besar dengan memanfaatkan barang bekas. Barang yang di kreasikan pun dijual yang pemasarannya dibantu oleh BKM yang nantinya penghasilan dari terjualnya barang tersebut dapat membantu perekonomian keluarga terutama suami untuk meringankan beban hidup mereka. Anak dapat bersekolah, tidak kurang gizi dan lain sebagainya. Dampak lainnya adalah jumlah sampah dapat dikurangi melalui pemanfaatan barang-barang yang tidak terpakai lagi.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil temuan lapangan mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kaliabang Tengah melalui identifikasi faktor-faktor Model CLEAR yang ditawarkan Pratchett, Stocker dan Lowndes (2004), maka diperoleh kesimpulan mengenai penyebab rendahnya partisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kaliabang Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan menyediakan waktu yang dimiliki rata-rata penduduk Kelurahan Kaliabang Tengah sebagai pekerja menjadi faktor partisipasi di Kelurahan Kaliabang Tengah masih rendah. Sehingga yang dapat berpartisipasi hanyalah orang-orang yang benar-benar dapat meluangkan waktu sebesar-besarnya. Pada saat sosialisasi dilakukan dan informasi yang ditangkap oleh masyarakat adalah tujuan program ini diperuntukkan untuk orang miskin, maka mereka yang merasa tidak menjadi bagian dari program ini memutuskan untuk tidak terlibat. Selain itu Sosialisasi yang pertama dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan melalui fasilitator kelurahan dan konsultan telah berupaya untuk melakukan sosialisasi dengan mengundang perangkat-perangkat kelurahan meliputi RW dan RT sebagai perwakilan wilayah, namun yang terjadi tidak semua RT/RW merespon undangan sosialisasi dari PNPM Mandiri Perkotaan.
2. Keinginan masyarakat miskin untuk berpartisipasi ada, tetapi ketika diharuskan ada swadaya 30% keinginan mereka dalam pengajuan menjadi gugur karena tidak siap dalam melakukan swadaya. Kemampuan waktu perempuan dalam pertemuan seperti rapat-rapat tidak dapat mengikuti. Perempuan tidak dapat ikut dalam pertemuan pada malam hari karena masalah perijinan dari suami dan ajaran agama mereka yang melarang mereka untuk keluar pada malam hari. Ketika masyarakat miskin ingin berpartisipasi

tetapi diminta untuk melakukan pengajuan bantuan, sikap jenuh dan pesimis masyarakat yang pernah mengajukan permohonan bantuan tetapi di tunda maka masyarakat miskin yang pernah melakukan pengajuan mundur secara perlahan.

3. Program-program yang dikhususkan untuk perempuan di Kelurahan Kaliabang masih kurang karena program yang lebih utamakan adalah kegiatan lingkungan. Sehingga perempuan kurang difasilitasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kaliabang Tengah.

6.2 Saran

1. Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan secara intensif ke 30 RW yang ada di Kelurahan Kaliabang Tengah. Setiap RW di kunjungi oleh fasilitator kelurahan atau konsultan.
2. Menyediakan program-program yang diperuntukan perempuan dalam hal ini adalah kegiatan sosial. Potensi jumlah perempuan di Kelurahan Kaliabang Tengah yang hampir menyamai jumlah laki laki, dapat diakomodir melalui pelatihan-pelatihan yang dapat menciptakan cikal bakal usaha-usaha baru yang dikelola oleh perempuan. Perempuan yang memperoleh penghasilan dari usahanya diharapkan dapat membantu suami meringankan kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Peran aktif BKM dan pengurus KSM dituntut lebih aktif, karena program ekonomi bergulir tidak berjalan di Kelurahan Kaliabang Tengah maka strategi mereka adalah dengan melakukan pendekatan ke pihak swasta untuk bekerjasama melalui *channeling* sehingga tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Adi, Isbandi, R., (2007), *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas (dari Pemikiran Menuju Penerapan)*, Jakarta: FISIP UI Press.
- Adi, Rukminto, I., (2008), *Intervensi Komunitas (Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Admihardja, Kusnaka dan Hikmat Harry, (2001), *PRA (Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Bandung: Humaniora.
- Agustino, Leo, (2008), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Daniel, Moehar., Darmawati dan Nieldalina, April (2006), *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Dunn, William, (1999), *Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Farazmand, Ali, (2004), *Sound Governance: policy and administrative innovations*, United State of America: Praeger Publishers.
- Herdiansyah, Haris, (2011), *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Indrawijaya, Adam, I dan Pranoto, Juni (2011), *Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jatidiri dan Karakter Bangsa dalam Pembangunan Nasional)*, Bandung: Alfabeta.
- Irawan, Prasetya, (2007), *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Depok, DIA FISIP UI.
- Karianga, Hendra, (2011), *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Persepektif Hukum dan Demokrasi)*, Bandung: PT. Alumni.
- Kumar, Somesh, (2002), *Methods For Community Participation: A Complete Guide for Practioners*, United Kingdom: Intermediate Technology Publication Ltd.,
- Kurtz, Linda, F., (1997), *Self-Help and Support Groups: A Handbook for Practioners*, United State of America: SAGE Publication, Inc.

- Morphet, Janice, (2008), *Modern Local Government*, London: SAGE Publication Ltd.
- Mudzhar, Atho dan Alvi, Sajida, S., (2002) *Woman in Indonesian Society: Access, Empowerment and Oppurtunity*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Neuman, W., Lawrence, (2006), *Social Research Methods (Qualitative and Quantitaive Approaches) Sixth Edition*, USA: Pearson Education, Inc.
- Nugroho, Riant, (2008), *Public Policy (Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan)*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina, M., (2001), *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sastropoetro, R.A., Santoso (1988), *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: PT. Alumni.
- Setiana, Lucie (2005), *Teknik penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sinambela, Lijan, P., dkk (2006), *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soetomo, (1995), *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Suharto, Edi, (2009), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suparlan, Parsudi (1993), *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Supriatna, Tjahya (1997), *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, Bandung: Humaniora Utama Press.
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Abidin, Sadi, Z., (1993), *Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Todaro, Michael, P., (2003), *Economic Development*, England: Pearson Education Limited.
- Winarno, Budi, (2012), *Kebijakan Publik (Toeri, Proses, dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: CAPS.

II. SERIAL

Artikel Jurnal

Prasetyo, Pius S., (1995), *Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menangani Masalah Kemiskinan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAR, Tahun VI, Nomor 13, Bandung: FISIP UNPAR.

Pratchett, Lawrence, et.al., (June 2009), *Empowering Communities to influence Local Decision Making (Evidence based lessons for policy makers and practitioners)*, United Kingdom: University Southampton.

Saribanon, N., et.al., (September 2007), *Pendekatan Tipologi dalam Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Studi Kasus Pengelolaan Sampah Pemukiman Berbasis Masyarakat di Kotamadya Jakarta Timur*, Jurnal Teknik Lingkungan Vol.8 No.3, 235-244.

Yulianti, Yoni (2012), Artikel *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok*, Padang: Universitas Andalas.

Dokumen Lembaga

Departemen Pekerjaan Umum, (2010), *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*, Jakarta.

Kapermas Kota Bekasi, (2011), *Menuju Bekasi Yang Cerdas, Sehat Dan Ikhsan*, Bekasi.

III. KARYA ILMIAH

Listya, Hernida Kusuma, (2011), *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi*, Surabaya: ITS Surabaya.

Permana, Erwin (2010), Tesis “*Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan (Studi Kasus di LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya Kecamatan Pancoran Mas Depok)*” Jakarta: FEUI.

Santoso, Lukman Adi, (Juli 2011), *Pengaruh PNPM dan Alokasi Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum Terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2009)*, Jakarta: FEUI.

Sudarini, (2001), Tesis *Proses “Partisipasi Masyarakat Sebagai Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat dalam Pelaksanaan P2KP (Suatu Studi Tentang Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di Kelurahan Lenteng Agung)”*, Jakarta: FISIP UI.

IV. PUBLIKASI ELEKTORNIK

PNPM Mandiri Perkotaan Kota Bekasi, (2011), *Capaian Partisipatif Kecamatan Bekasi Utara*, Bekasi: Data SIM Korkot Kota Bekasi.

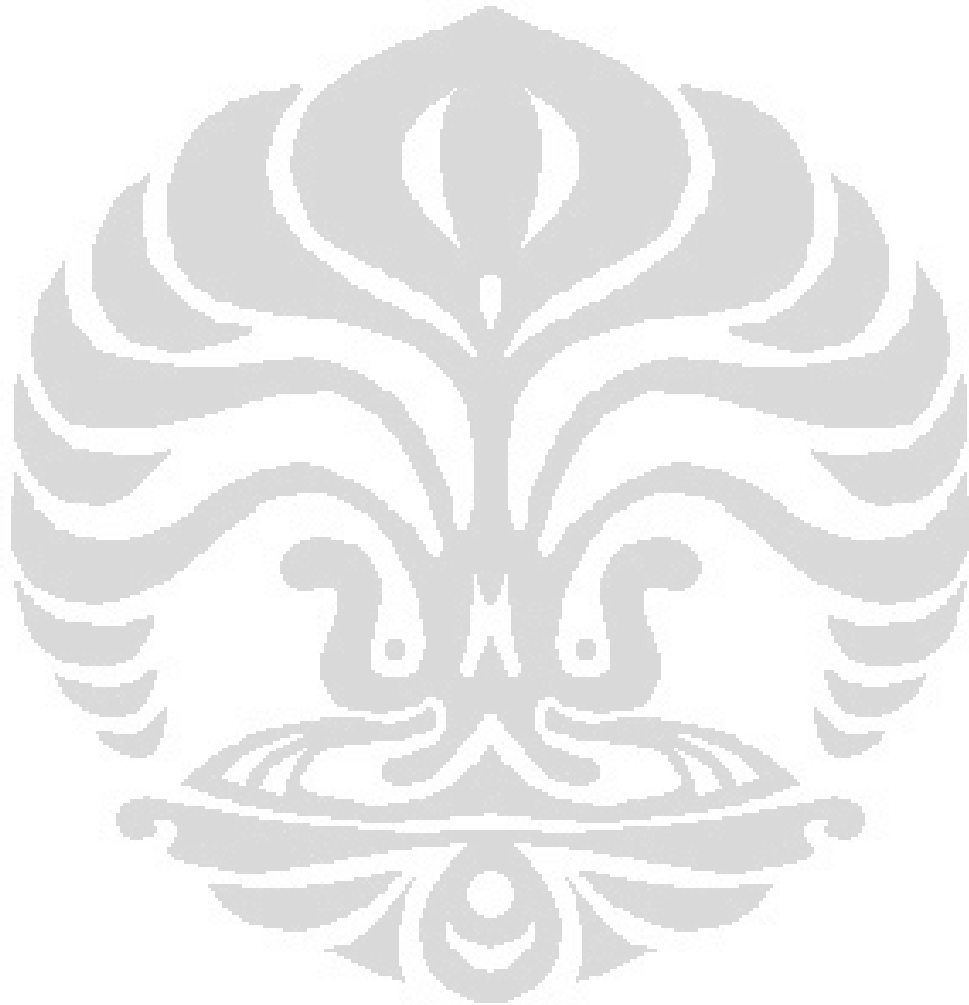
BPS, (2010), *Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010*, (bps.go.id) di unduh pada tanggal 7 Mei 2012 Pukul 21.30 WIB.

BPS, (2011), *Laporan Bulanan BPS Data Sosial Ekonomi Edisi 15 Agustus 2011*, (dds.bps.go.id) di unduh pada tanggal 28 Maret 2012 Pukul 10.37 WIB.

BPS Jawa Barat, (2010), *Jumlah dan Peresentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kota/Kabupaten di Jawa Barat* (jabar.bps.go.id) diunduh pada tanggal 7 April 2012 Pukul 13.30 WIB

Tribun News, (1 Juli 2011), *4.6 Juta Orang di Jawa Barat Hidup Miskin*, Bandung (tribunnews.com) di akses pada tanggal 7 Mei 2012 Pukul 22.00 WIB.

LAMPIRAN



INDIKATOR PENILAIAN AWARD

BKM/LKM

No.	Uraian	Indikator	Dokumen yang dicek	Bobot	Nilai (0-3)	Nilai x Bobot
A	1	Keaktifan BKM	Keaktifan BKM melakukan rapat rutin	Daftar Hadir Rapat	5	
	2	BKM mempunyai sekretariat BKM	Ada ruangan sekretariat	Cek Lapangan	5	
	3	BKM telah melaksanakan pemilu sesuai AD/ART	Telah dilaksanakan pemilu ulang sesuai dengan ketentuan	Berit acara pemilu	5	
	4	BKM telah melaksanakan audit	Telah keluar opini dari KAP	Dokumen hasil audit	5	
	5	BKM berpartisipasi dalam musrenbang kelurahan dan kecamatan	BKM diberi kesempatan menyampaikan programnya	Daftar hadir musrenbang	5	
	6	Pertemuan dengan pemerintah kelurahan	Adanya pertemuan BKM dengan pemerintah kelurahan	Daftar hadir	5	
B	1	Pengelolaan PPM oleh oleh sekretariat	Ada ruangan sekretariat	Dokumen PPM	5	
	2	Media warga/buletin	Adanya buletin secara rutin terbit	Buletin warga	5	
	3	Keaktifan Unit-unit Pengelola	UP2 melakukan pertemuan rutin	Daftar Hadir Rapat	5	
	4	Kinerja Sekretariat	Kinerja administrasi	Hasil Penilaian Kinerja	5	
	5	Jadwal buka sekretariat	sekretariat bkm buka dan melayani masyarakat	Cek Lapangan	5	
	6	Kelengkapan Administrasi Sekretariat	Adanya kelengkapan administrasi baik pembukuan maupun aturan-aturan	Cek AD/ART SK Peraturan BKM	5	
C	1	BKM telah melaksanakan tinjauan partisipatif	Daftar ps dan renta terbatu	Dokumen PJM	10	
	2	BKM telah melaksanakan RWT	RWT sudah dilaksanakan	Berita acara RWT dan dokumen pelaporan	5	
	3	Swadaya Masyarakat	Prosentase swadaya dibandingkan dengan dana BLM	Data SIM	5	
	4	Partisipasi Masyarakat	Kehadiran dalam setiap kegiatan	Data SIM	7,5	

5	BKM telah melaksanakan channeling	Kegiatan BKM telah dilaksanakan oleh pihak lain/ kerja sama antara BKM dengan pihak lain	MOU kerja sama	7,5		
6	Peta tematik	Adanya peta tematik	Peta tematik	5		
					Jumlah	
					Nilai akhir	Jumlah/3

PJOK

No.	Uraian	Indikator	Dokumen yang dicek	Bobot	Nilai (0-3)	Bobot x Nilai
1	PJOK melakukan pertemuan rutin dengan Lurah dan BKM	Adanya pertemuan antara PJOK dengan Lurah dan BKM	Daftar hadir	20		
2	PJOK melakukan berkunjung ke sekretariat BKM	Adanya pertemuan antara PJOK dengan BKM di sekretariat BKM	Daftar hadir	20		
3	PJOK melakukan monitoring kegiatan KSM/BKM	Adanya monitoring oleh PJOK terhadap pelaksanaan kegiatan KSM/KSM	laporan monitoring PJOK	20		
4	Tejalin Komunikasi dengan tim faskel	Adanya komunikasi yang baik dengan tim faskel	SMS, notulensi pertemuan	20		
5	Laporan ke Satker	PJOK secara rutin (tiap bulan) memberikan laporan ke kapemas	Laporan bulanan PJOK	20		
					Jumlah	
					Nilai akhir	Jumlah/3

Lurah

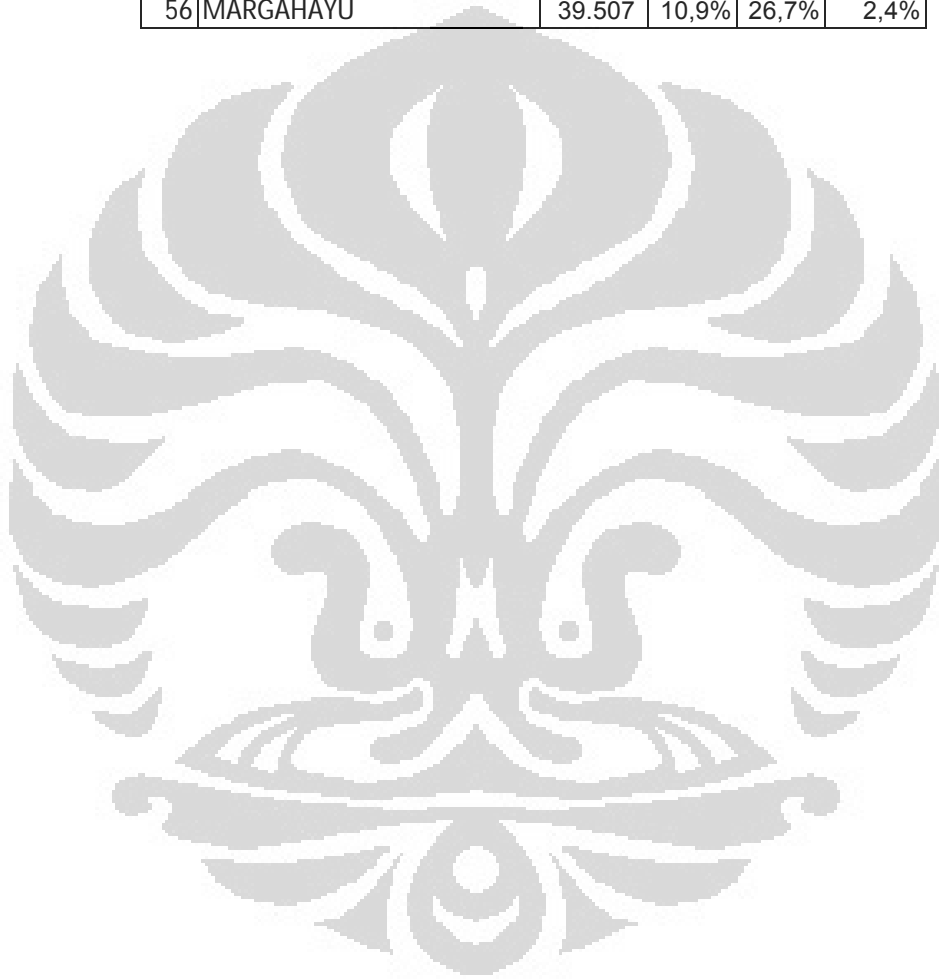
No.	Uraian	Indikator	Dokumen yang dicek	Bobot	Nilai (0-3)	Bobot x Nilai
1	Lurah melakukan pertemuan rutin dengan BKM	Adanya pertemuan antara Lurah dengan BM setiap bulan	Daftar hadir	20		
2	Lurah melakukan pertemuan rutin dengan BKM dan lembaga lainnya	Adanya pertemuan antara Lurah dengan BKM dan lembaga lainnya.	Daftara hadir	20		
3	Lurah melakukan monitoring kegiatan PNPM	Adanya kunjungan lapangan untuk melihat kegiatan KSM/BKM	laporan monitoring lurah	20		
4	Tejalin Komunikasi dengan tim faskel	Adanya komunikasi yang baik dengan tim faskel	SMS, notulensi pertemuan	20		
5	Laporan ke Satker	Lurah secara rutin (tiap bulan) memberikan laporan ke camat	Laporan bulanan Lurah	20		
Jumlah						
Nilai akhir						Jumlah/3

Keterangan Nilai

- 0 Sama sekali tidak ada/tidak sesuai
- 1 hanya sebagian ada/sesuai
- 2 Ada/sesuai tetapi tidak lengkap/terpenuhi
- 3 Ada/Sesuai dan Lengkap/terpenuhi

TIM	KELURAHAN	DWS	% P	% M	%DWS
1	JATIMELATI	11.271	50,0%	35,4%	27,8%
2	JATI WARINGIN	31.755	49,7%	30,3%	33,1%
3	JATISAMPURNA	13.239	49,0%	18,9%	4,5%
4	JATICEMPAKA	35.697	48,5%	29,3%	24,8%
5	JATIMAKMUR	41.763	48,0%	37,7%	24,3%
6	CIMUNING	16.190	47,8%	29,6%	9,5%
7	JATIBENING	33.802	47,2%	29,2%	23,8%
8	JATIMURNI	12.483	46,4%	38,4%	32,6%
9	JATIRAHAYU	26.810	46,2%	28,3%	7,9%
10	JATILUHUR	13.432	43,0%	22,0%	1,2%
11	JATISARI	9.089	42,4%	26,8%	3,7%
12	AREN JAYA	43.204	40,0%	19,6%	1,9%
13	JATIBENING BARU	20.667	39,8%	41,4%	8,8%
14	KALI BARU	14.715	39,1%	27,8%	3,0%
15	MARGA MULYA	11.346	38,7%	17,4%	28,7%
16	HARAPAN MULYA	12.010	37,1%	26,7%	25,6%
17	MARGA JAYA	5.338	36,1%	27,6%	2,8%
18	MUSTIKASARI	4.780	36,1%	22,6%	8,4%
19	DUREN JAYA	22.690	35,8%	21,5%	4,8%
20	JATIRASA	5.725	35,3%	13,2%	2,2%
21	JATIASIH	7.711	33,8%	23,9%	10,7%
22	HARAPAN BARU	14.306	33,6%	25,0%	3,2%
23	JATIMEKAR	6.531	33,4%	22,5%	16,5%
24	PADURENAN	7.857	32,8%	29,9%	15,4%
25	BOJONG RAWALUMBU	11.319	32,7%	32,2%	2,3%
26	JATIKRAMAT	15.328	32,5%	23,7%	5,7%
27	KALIABANG TENGAH	49.957	32,3%	18,8%	1,5%
28	JAKA MULYA	10.066	32,3%	23,8%	5,9%
29	PEKAYON JAYA	13.417	32,0%	29,1%	6,1%
30	JATIRADEN	6.100	31,8%	21,0%	2,8%
31	PERWIRA	23.316	31,3%	25,2%	4,5%
32	HARAPAN JAYA	53.795	30,6%	25,6%	2,3%
33	MUSTIKAJAYA	12.973	29,0%	29,2%	6,9%
34	TELUK PUCUNG	30.434	28,9%	15,4%	2,5%
35	JATIRANGGON	8.637	28,9%	19,3%	8,3%
36	CIKETINGUDIK	5.398	27,5%	29,9%	2,0%
37	KRANJI	24.787	26,9%	24,3%	2,0%
38	KAYURINGIN JAYA	39.575	26,7%	27,3%	1,6%
39	SEPANJANG JAYA	10.950	26,4%	32,4%	2,4%
40	JAKA SETIA	12.686	25,5%	28,5%	1,0%
41	SUMUR BATU	6.913	25,5%	29,9%	2,2%
42	BINTARA	13.239	25,1%	24,6%	2,6%
43	BOJONG MENTENG	11.319	24,0%	32,9%	2,7%
44	PENGASINAN	6.950	23,1%	30,5%	1,8%
45	JATIRANGGA	6.585	22,5%	20,3%	10,5%
46	BANTARGEBAH	16.619	22,2%	33,0%	1,3%

47	BEKASI JAYA	32.923	22,0%	24,4%	3,8%
48	JATI KARYA	5.113	21,1%	18,2%	6,8%
49	JATIWARNA	12.265	21,0%	20,1%	7,2%
50	BINTARA JAYA	9.503	20,2%	19,7%	6,7%
51	JAKA SAMPURNA	17.577	19,2%	22,5%	3,7%
52	PEJUANG	14.704	17,3%	30,6%	5,5%
53	CIKIWUL	6.038	15,2%	28,6%	3,3%
54	KOTA BARU	32.331	11,5%	23,7%	1,9%
55	MEDAN SATRIA	11.445	11,3%	26,8%	5,7%
56	MARGAHAYU	39.507	10,9%	26,7%	2,4%



PROFIL LKM

Nama LKM : KALIABANG SEJAHTERA
 Kelurahan : KALIABANG TENGAH
 Kecamatan : BEKASI UTARA
 Kota : Kota Bekasi
 Propinsi : Jawa Barat
 Alamat Sekretariat LKM : Pondok Ungu Permai Kelurahan
 Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi.
 Kontak Person :
 ■ Nama : Suyatno
 ■ Jabatan : Koordinator
 Tanggal Pembentukan : 13 Juni 2010
 Tanggal pengesahan Akta Notaris : Rabu, 30 Juni 2010
 Nama Notaris : Elok Kurniati, SH
 Rekening : Bank Bank BRI Unit Pejuang
 No. Rek : 0937-01-047149-53-5
 Jumlah Anggota LKM : Orang (P: 8 , W: 3)

I. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan bukanlah hal yang baru bagi bangsa Indonesia yang pendapatan perkapitanya masih jauh dari angka sejahtera. Masalah tersebut seperti krisis moneter yang berkepanjangan yang berawal pada tahun 1997 serta banyaknya bencana alam melanda negeri ini sehingga sedikit banyak telah menyebabkan masalah kemiskinan semakin merebak dan berdampak negatif pada berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan serta daya beli masyarakat. Dalam hal Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Kaliabang Tengah dilakukan sepenuhnya oleh semua komponen masyarakat (masyarakat sebagai pelaku utama) dalam hal ini terbentuk dalam LKM, sehingga mampu menjadi solusi dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Kaliabang Tengah. Salah satunya program yang banyak melibatkan serta memberdayakan masyarakat terutama masyarakat miskin adalah PNPM-MP. PNPM-MP itu sendiri merupakan upaya pemerintah guna membangun kemandirian masyarakat serta pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi kemiskinan. PNPM-MP itu sendiri berlandaskan pada kemandirian masyarakat yang diharapkan dapat mengakar serta mampu memberikan penguatan modal bagi perkembangan sosial

masyarakat dimasa mendatang serta menyiapkan pondasi kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat setempat. Dan untuk memudahkannya, maka dibuatlah profil ini sebagai bahan presentasi program PNPM oleh LKM Kaliabang Sejahtera di kelurahan Kaliabang Tengah.

A. Kondisi Umum dan Geografis

Luas Wilayah : 397785
 Jumlah Dusun : 0
 Jumlah RW : 30
 Jumlah RT : 274
 Batas wilayah :
 ➤ Sebelah Barat : berbatasan dengan PEJUANG
 ➤ Sebelah Timur : berbatasan dengan BAHAGIA
 ➤ Sebelah Selatan : berbatasan dengan SETIA ASIH
 ➤ Sebelah utara : berbatasan dengan PERWIRA

B. Kondisi Demografis

Jumlah Penduduk : 62447
 Jumlah Penduduk Dewasa : 49957
 Jumlah Laki-Laki : 31759
 Jumlah Perempuan : 30688
 Jumlah KK : 14363
 Jumlah KK Miskin : 3986
 Jumlah Jiwa Miskin : 16314
 Mata Pencaharian Utama :

C. Pengelolaan BLM

BLM I			BLM II			BLM III			
Thp.1	Thp.2	Thp.3	Thp.1	Thp.2	Thp.3	Thp.1	Thp.2	Thp.3	
105	175	70	60	60	40	40	60	20	20
APBN	APBD	APBN	APBN	APBN	APBD	APBN	APBN	APBD	APBN
v	v	v	v	v	X	v	v	X	v

II. INFORMASI PEMBERDAYAAN

A. Proses Pembentukan LKM

LKM Kaliabang Sejahtera pertama kali dibentuk melalui Rembug Pembentukan LKM pada Tanggal 13 Juni 2010 yang dihadiri oleh 56 orang. Dari 75 calon perwakilan dari

21 Rw terpilih 11 orang anggota LKM (8 orang laki-laki dan 3 orang perempuan). Dalam rembug tersebut dibahas dan disepakati pula Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar LKM.

Visi LKM adalah

Terbangunnya warga masyarakat sebagai suatu tatanan baru hidup masyarakat, dimana warga masyarakat berhimpun atas prakasa sendiri, bekerja sama dan secara damai berupaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan menyatakan kepedulian bersama dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat hal yang sama.

Misi LKM adalah

Membangun kapital social dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan social dan menggalang solidaritas serta kesatuan social serta pada gilirannya memperkuat keswadayaan masyarakat warga Kelurahan Kelurahan Kaliabang Tengah.

Adapun nama-nama Anggota LKM terpilih masa bakti 2010 -2013 adalah :

NO	NAMA	L/P	USIA	PEKERJAAN	POSISI
1	Suyatno	L		Kary. Swasta	Koord. Pimpinan Kolektif
2	Tahapan Bambang Sutopo SH.	L		Pengacara	Pimpinan Kolektif
3	H. Setiawan	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
4	Abdul Rosyad	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
5	Ahmad Azie	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
6	Mahyani	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
7	Nurhadi	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
8	Danang Wijaya	L		Kary. Swasta	Pimpinan Kolektif
9	Rini Wijayanti	P		IRT	Pimpinan Kolektif
10	Pardiyanti	P		IRT	Pimpinan Kolektif
11	Dra. Afrina Sari	P		Dosen	Pimpinan Kolektif

Personel Sekretariat dan Unit Pengelola :

NO	NAMA	L/P	USIA	PEKERJAAN	POSISI
1	Dede Darisman	L			Sekretaris
2	Ahmad Hidri	L			Sekretaris
3	Hardono	L			UPK
4	Nasori	L			UPK
5	Sugito	L			UPK
6	Abdul Haris	L			UPL
7	Suwoko	L			UPL
8	Novi Hartanto	L			UPS
9	Guntur	L			UPS
10	Tri Amri Pujiningsih	P			UPS
11	Ashari	L			DPK
12	Irwan Sidi Umar	L			DPK
13	Nur Patnayati	P			DPK

B. Tridaya Berorientasi IPM-MDGs dan Perkembangan KSM

Kegiatan penyusunan PJM Pronangkis di Kelurahan Kaliabang Tengah difasilitasi oleh Tim Perencanaan Partisipatif (Tim PP) yang anggotanya terdiri dari semua unsur lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan Kaliabang Tengah, diantaranya unsur pemerintahan Kelurahan, LKM, relawan yang tergabung dalam Tim PS, lembaga-lembaga yang ada serta tokoh-tokoh masyarakat.

Dengan tujuan untuk merealisasikan harapan-harapan atau cita-cita yang riil yang ada di masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Hasil atau temuan yang didapat oleh tim PP di masyarakat dikumpulkan sebagai bahan acuan untuk dijadikan bahan / data obyektif yang dijadikan sebuah Draft awal PJM Pronangkis, setelah mendapat kesepakatan dalam Lokakarya, hasil kesepakatan tersebut dijadikan bahan dasar dalam penyusunan PJM Pronangkis 3 tahun kedepan, dan Rencana Tahunan (Renta).

a. Kegiatan Infrastruktur

Kegiatan		Putaran I	Putaran II	Putaran III
Infrastruktur	:	Rp. 312.800.000,-	Rp. 152.500.000,-	Rp. 76.000.000,-

b. Kegiatan Ekonomi Bergulir

Kegiatan		Putaran I	Putaran II	Putaran III
Ekonomi	:	Rp.-	Rp.-	Rp.-

c. Kegiatan Sosial

Kegiatan		Putaran I	Putaran II	Putaran III
Sosial	:	Rp. 27.200.000,-	Rp.-	Rp.-

	Lembaga	(Bentuk Kerjasama)	Dana	

C. Perkembangan LKM

Sejak terbentuknya kepengurusan LKM Kaliabang Sejahtera di kelurahan Kaliabang Tengah, kami berusaha eksis melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, meskipun dalam perjalanannya berbagai hambatan dan tantangan sering ditemui namun tetap berjalan dengan satu tekad untuk menciptakan lingkungan yang Asri dan masyarakatnya hidup dalam ketenangan serta ditunjang dengan ekonomi memadai, dan tak lupa sifat kebersamaan di antara pengurus selalu dijaga agar organisasi dapat berjalan dengan baik.

Dalam melaksanakan fungsinya dan pertumbuhan kinerja Anggota LKM, perlu adanya pembagian peran yang jelas kepada anggotanya, maka anggota LKM dibagi dalam 4 peran, sebagai berikut:

1. Peran Humas (hubungan masyarakat)

- Sosialisasi
- Hubungan kerja dengan lembaga lain
- Menampung aspirasi anggota Perkumpulan

2. Peran penelitian dan perkembangan

- Memberikan rekomendasi atas proposal KSM
- Pemetaan Swadaya
- Statistik dan Data Base Kemiskinan

3. Peran Pengarahan dan Pengembangan Dana

- Pembinaan/Pendampingan KSM
- Pendekatan Partisipatif
- Pelatihan

4. Peran Pengawasan

- Mengelola pengaduan masyarakat (P P M)
- Menilai kinerja UPK
- Pelaporan

Masa tugas jabatan anggota LKM disetiap peran dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Rembug Anggota LKM.

D. Kegiatan Kemitraan BKM dengan Pihak Lain

No	Nama Instansi/	Kegiatan	Jumlah	Pemanfaat

E. Transparansi dan Akuntabilitas

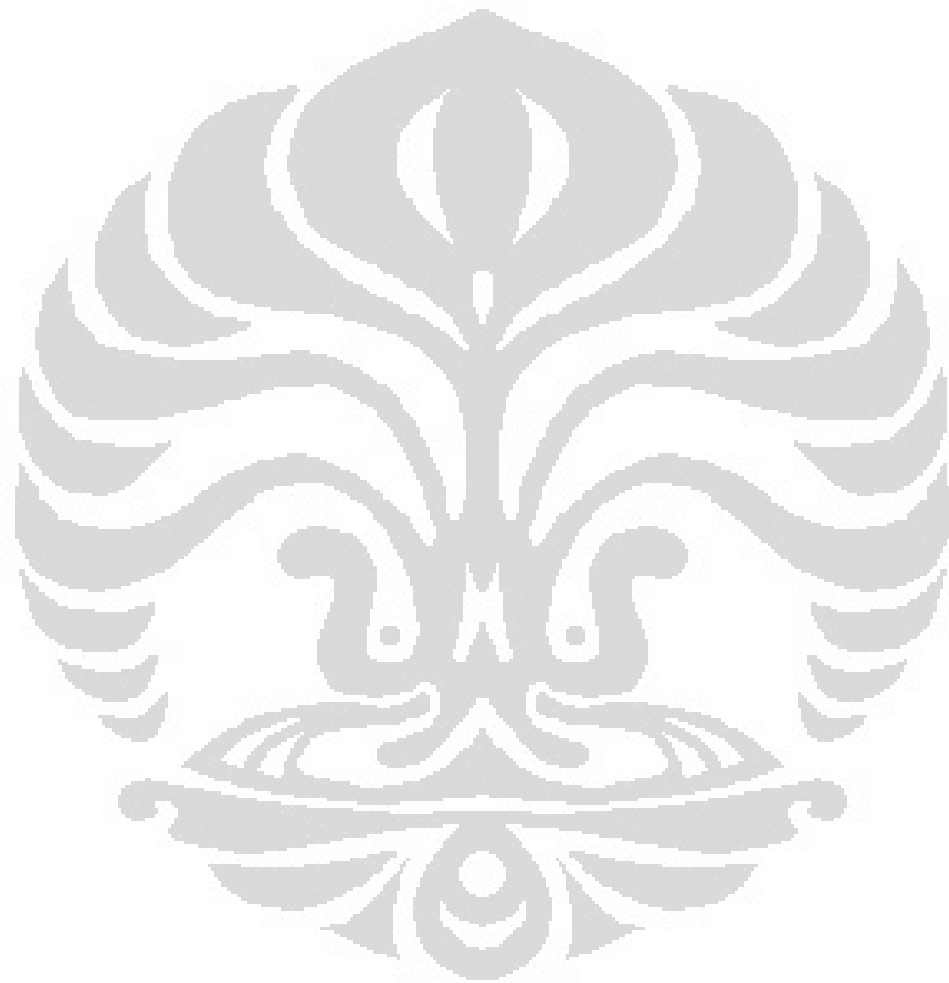
Sebuah Lembaga yang sehat harus mampu menampilkan keterbukaan (*Transparansi*) dalam pengelolaannya, dan berjalan sesuai dengan prosedural yang berlaku (*akuntabilitas*) salah satu prinsip keterbukaan dan prosedural adalah Laporan Pertanggung Jawaban. LKM Kaliabang Sejahtera merupakan satu dari lembaga yang mempunyai prinsip tersebut di atas, bukti adanya LPJ BKM, RWT, Audit dan Papan Info sebagai contohnya. Belum lagi agenda rapat dan sosialisasi rutin di masyarakat.

F. Laporan Keuangan

LKM Kaliabang Sejahtera Kelurahan Kaliabang Tengah pada saat ini adalah BKM untuk kepengurusan tahun 2011-2014. Sejak tahun 2008-2011, LKM Kaliabang Sejahtera telah mendapatkan amanah berupa dana BLM sebesar total Rp. 590.000.000 yang berasal dari dana BLM Pusat (APBN) sebesar Rp. 415.000.000 dan dari BLM Daerah (APBD) kota Bekasi sebesar Rp. 175.000.000 . Alokasi dana tersebut digunakan sebesar Rp. 20.000.000 untuk BOP BKM, sebesar Rp. 541.000.000 untuk kegiatan di masyarakat yang terserap melalui 18 KSM infrastruktur yang kegiatannya berupa pembuatan jalan lingkungan (Paving Blok dan Cor Beton), pembuatan saluran air dan perbaikan rumah tidak layak huni. Sedangkan untuk kegiatan sosial disalurkan melalui 2 KSM yang menyalurkan dana kegiatan sosial melalui kegiatan bantuan pengadaan peralatan posyandu dan pelatihan tata boga.

Kegiatan-kegiatan PNPM yang sudah dilaksanakan, dimanfaatkan oleh 126 KK dimana 108 KK diantaranya adalah KK miskin.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan PNPM tersebut diantaranya terlihat pada swadaya masyarakat yang terkumpul sampai saat ini sebesar Rp. 84.221.500. dana tersebut terkumpul selama masa kegiatan berlangsung melalui gotongroyong warga dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.



Pedoman Wawancara Untuk BKM

Tanggal Wawancara :

Waktu :

Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

- *Can do (Mampu)*
 1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berpartisipasi dalam program PNPM Mandiri Perkotaan.
 2. Pelatihan khusus sebelum mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan.
 3. Pengalaman berorganisasi.
- *Like to (Ingin)*
 1. Latar belakang mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan.
 2. Pentingnya keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan.
 3. Keinginan untuk terus berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan.
 4. Merasa menjadi bagian dari PNPM Mandiri Perkotaan.
 5. Mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan tidak menghiraukan perbedaan seperti, suku, agama, ras dan lain-lain.
- *Enable to (Dimungkinkan)*
 1. Bagaimana dapat mengetahui adanya program PNPM Mandiri Perkotaan.
 2. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi
 3. Proses partisipasi bagi masyarakat diberikan kemudahan.
 4. Proses partisipasi masyarakat menyediakan informasi yang dibutuhkan partisipan.

5. Disertakan dalam pengambilan keputusan dengan mengikuti voting dan sebagainya.
 6. Bagaimana peran BKM terhadap kemandirian masyarakat.
 7. Cara berkomunikasi secara horizontal maupun vertikal.
- *Asked to (Diminta)*
 1. Cara PNPM Mandiri meminta anda untuk mengikuti program ini.
 2. Kompensasi berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan.
 3. Mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan dengan sukarela.
 4. Mengikuti program PNPM Mandiri tanpa paksaan siapapun.
 5. Pendapat mengenai fasilitator program PNPM Mandiri Perkotaan.
 - *Responded to (Menanggapi)*
 1. Merasa keterlibatan dalam PNPM Mandiri Perkotaan akan berpengaruh pada pelaksanaan program.
 2. Mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan siapapun pimpinannya.
 3. Organisasi yang dengan kondisi yang menyenangkan membuat bertahan dalam organisasi.
 4. Pendapat didengarkan dalam setiap pertemuan.
 5. Partisipasi masyarakat menyertakan harapan bahwa kontribusi masyarakat akan mempengaruhi keputusan yang dibuat.

Pedoman Wawancara Untuk Partisipan Perempuan (BKM dan KSM)

Tanggal Wawancara :

Waktu :

Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

- *Can do (Mampu)*
 1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berpartisipasi dalam program PNPM Mandiri Perkotaan.
 2. Pelatihan khusus sebelum mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan.
 3. Pengalaman berorganisasi.
- *Like to (Ingin)*
 1. Latar belakang mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan.
 2. Pentingnya keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan.
 3. Keinginan untuk terus berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan.
 4. Merasa menjadi bagian dari PNPM Mandiri Perkotaan.
 5. Mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan tidak menghiraukan perbedaan seperti, suku, agama, ras dan lain-lain.
 6. Mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan untuk mengusung persamaan gender, bahwa perempuan juga bisa mengikuti program ini.
- *Enable to (Dimungkinkan)*
 1. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi.
 2. Bagaimana dapat mengetahui adanya program PNPM Mandiri Perkotaan.
 3. Proses partisipasi bagi masyarakat diberikan kemudahan.

4. Proses partisipasi masyarakat menyediakan informasi yang dibutuhkan partisipan.
 5. Proses partisipasi masyarakat mengkomunikasikan kepada partisipan bagaimana input mereka mempengaruhi keputusan.
 6. Disertakan dalam pengambilan keputusan dengan mengikuti voting dan sebagainya, perempuan juga mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.
 7. Cara berkomunikasi secara horizontal maupun vertikal.
 8. PNPM memberikan kesempatan kaum perempuan untuk terlibat dalam program untuk mengatasi *issue gender*.
 9. PNPM Mandiri Perkotaan memberikan program-program yang di khususkan untuk memberdayakan kaum perempuan.
- *Asked to (Diminta)*
 1. Cara PNPM Mandiri meminta anda untuk mengikuti program ini.
 2. Kompensasi berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan.
 3. Mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan dengan sukarela.
 4. Mengikuti program PNPM Mandiri tanpa paksaan siapapun.
 5. Pendapat mengenai fasilitator program PNPM Mandiri Perkotaan.
 - *Responded to (Menanggapi)*
 1. Merasa keterlibatan dalam PNPM Mandiri Perkotaan akan berpengaruh pada pelaksanaan program.
 2. Mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan siapapun pimpinannya.
 3. Organisasi yang dengan kondisi yang menyenangkan membuat bertahan dalam organisasi.
 4. Pendapat didengarkan dalam setiap pertemuan.
 5. Partisipasi masyarakat menyertakan harapan bahwa kontribusi masyarakat akan mempengaruhi keputusan yang dibuat

Pedoman Wawancara Untuk KSM

Tanggal Wawancara :

Waktu :

Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

- *Can do (Mampu)*
 1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berpartisipasi dalam program PNPM Mandiri Perkotaan.
 2. Pelatihan khusus sebelum mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan.
- *Like to (Ingin)*
 1. Latar belakang mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan.
 2. Pentingnya keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan.
 3. Keinginan untuk terus berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan.
 4. Merasa menjadi bagian dari PNPM Mandiri Perkotaan.
 5. Mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan tidak menghiraukan perbedaan seperti, suku, agama, ras dan lain-lain.
- *Enable to (Dimungkinkan)*
 1. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi.
 2. Bagaimana dapat mengetahui adanya program PNPM Mandiri Perkotaan.
 3. Proses partisipasi bagi masyarakat diberikan kemudahan.
 4. Proses partisipasi masyarakat menyediakan informasi yang dibutuhkan partisipan.
 5. Proses partisipasi masyarakat mengkomunikasikan kepada partisipan bagaimana input mereka mempengaruhi keputusan.

6. Disertakan dalam pengambilan keputusan dengan mengikuti voting dan sebagainya.
 7. Cara berkomunikasi secara horizontal maupun vertikal.
- *Asked to (Diminta)*
 1. Cara PNPM Mandiri meminta anda untuk mengikuti program ini.
 2. Kompensasi berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan.
 3. Mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan dengan sukarela.
 4. Mengikuti program PNPM Mandiri tanpa paksaan siapapun.
 - *Responded to (Menanggapi)*
 1. Merasa keterlibatan dalam PNPM Mandiri Perkotaan akan berpengaruh pada pelaksanaan program.
 2. Mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan siapapun pimpinannya.
 3. Organisasi yang dengan kondisi yang menyenangkan membuat bertahan dalam organisasi.
 4. Pendapat didengarkan dalam setiap pertemuan.
 5. Partisipasi masyarakat menyertakan harapan bahwa kontribusi masyarakat akan mempengaruhi keputusan yang dibuat.

Transkrip Wawancara

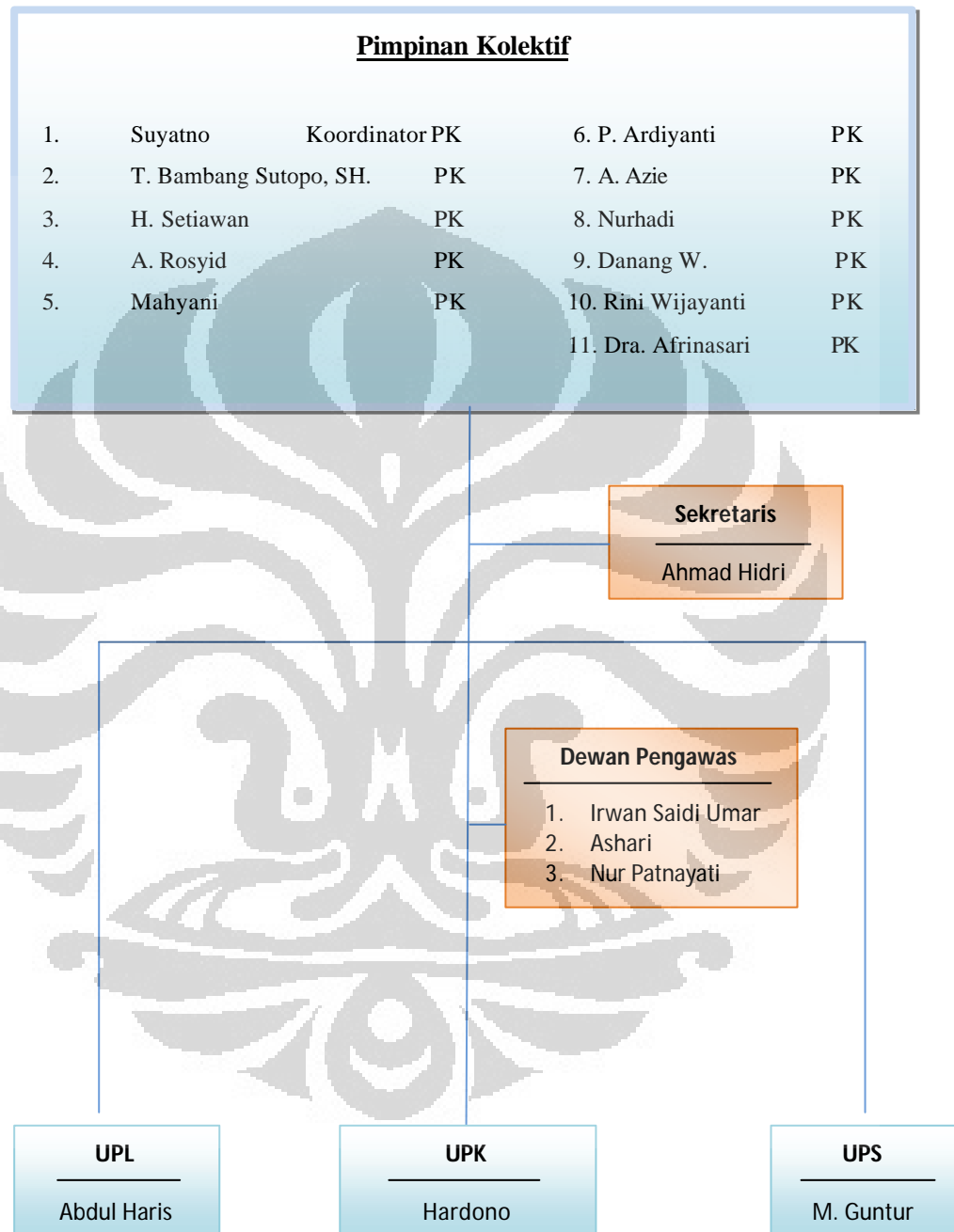
Tentang

Model Partisipasi dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan). Studi: Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Penulisan transkrip wawancara ini akan memuat jawaban dari informan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Jawaban akan disesuaikan dengan dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan, daftar pertanyaan secara keseluruhan tidak disertakan kembali karena daftar tersebut sudah tercantum dalam lampiran sebelumnya.

Wawancara terdiri dari 10 informan yang terdiri dari anggota KSM, BKM, Anggota KSM dan BKM berjenis kelamin perempuan dan fasilitator kelurahan. Berikut ini akan di lampirkan jawaban informan :

Struktur Organisasi BKM Kaliabang Tengah



Struktur Organisasi LKM Kaliabang Sejahtera

Nama-nama KSM di Kelurahan Kaliabang Tengah (2010-Sekarang)

No.	Nama KSM	Ketua
1	Kencana Permai	Sidiq Ariya
2	Ceria	H. Sholeh
3	Kenanga I	Hasanudin
4	Kenanga II	H. Sudarno
5	Anggrek II	Ramlan S.G
6	Cendana	Irwan Sidi Umar
7	Melati	Fahmi R.M
8	Jagung III	Ronianto
9	Dirgantara	Jayadi
10	Mawar	Drs. H. Yanto
11	Lori Indah	Marullah
12	Kamboja I	Hasanudin S.M
13	Cendana II	Yasuroto
14	Permata Bunda II	Utim Yugi M.
15	Permai	Hidi
16	Bunga Matahari	Basuki
17	Persada II	Budi Santoso
18	Kemuning	Slamet Riyadi
19	Mekar Jaya	Mahfud
20	Tectona Grandis	Harrasid
21	Bunga Matahari II	Sugito
22	Kencana II	Jauhari
23	Pelita Hati	Mariyati
24	Bunga Lestari	Dahri Z.
25	Padi	Andy
26	Dahlia	Sugimin
27	Bunga	Jamhari
28	Karya Bakti	H. M. Amin
29	Poncol Indah	H. Sidiq

Sumber: Diolah dari 29 Proposal KSMKSM di Kelurahan Kaliabang Tengah.

Foto-Foto Kondisi Infrastruktur di Kelurahan Kaliabang Tengah





Kondisi Saluran Air





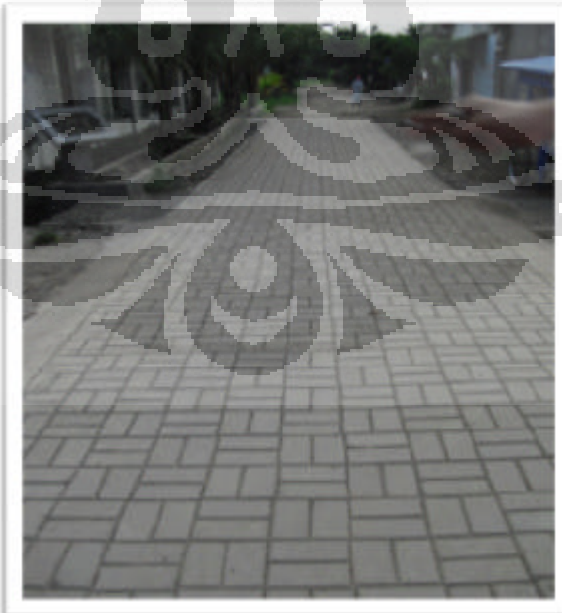
Kondisi Jalan





Kondisi Rumah Tidak Layak Huni

**Foto-Foto Kegiatan Lingkungan PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahan Kaliabang
Tengah**







Pembangunan Posyandu

Foto-Foto Kegiatan Sosial Pelatihan Tata Boga





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Irma Septiany

Tempat dan Tanggal Lahir : Bekasi, 30 September 1989

Alamat : Perum Taman Mulasakti Blok M2/8a RT
011/021 Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi
Utara, Kota Bekasi 17125.

Email : irmaseptiany@ymail.com,
irma.septiany@gmail.com

Nama Orang Tua : Ayah : Abdul Kadir Daulay
Ibu : Yasnia Linda Sofyan

Riwayat Pendidikan Formal :

SD : SDN Harapan Jaya XIII Bekasi

SMP : SLTPN 25 Bekasi

SMA : SMAN 4 Bekasi

Diploma 3 : Universitas Indonesia
Program Administrasi Perkantoran dan
Sekretari

Sarjana : Universitas Indonesia
Program Ekstensi Administrasi Negara

Prestasi :

1. Tahun 2003, Juara II Lomba Basket Putri tingkat SMP se-Bekasi
2. Tahun 2006, Juara II Lomba Basket Putri tingkat SMA se-Bekasi
3. Tahun 2009, Mapres UI Non-Akademik UKM Marching Band
4. Tahun 2010, Mapres UI Non-Akademik UKM Marching Band
5. Tahun 2010, Penghargaan Menpora atas Prestasi Marching Band